

PRABOWO SIAP PIKUL UTANG JOKOWI

UTANG
JOKOWI



AWASI BARANG
IMPOR ILEGAL
DUA ANUGERAH
UNTUK KALTARA
BERKAT INOVASI DAN
TRANSFORMASI
KALTIM PALING
RAWAN DI PILKADA
AKMAL: JAGA
KEDAMAIAN
KAWAL RUU TNI/POLRI
SALING SERANG
CALON GUBERNUR
SUMSEL 2024
3 MENGUAK TAKDIR DI
BANGKA BELITUNG
USULKAN
PELANTIKAN TIGA
GELOMBANG
TIKET PESAWAT
INDONESIA TERMAHAL
LEPAS SAJA KE
MEKANISME PASAR
PILGUB SUMBAR
2024, MAHYELDI-
VASCO RUSEIMY
BELUM ADA LAWAN
PILWAKOT PALEMBANG
2024 ADEM AYEM
TIDAK ADA
PERANG MISI VISI
DUTA AYAH DAN
BUNDA ASUH
ANAK STUNTING

info indonesia

inovasi untuk negeri



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

COMING
SOON

• iNOVASI UNTUK NEGERI •
info indonesia
AWARD 2024



**DARI
SUMSEL
UNTUK
INDONESIA
EMAS**

EDISI
BULAN
JULI
2024

DAFTAR ISI



7 INFO UTAMA

Beda literasi, sangat mungkin beda pandangan. Apalagi jika menyangkut kemampuan pemerintah membayar utang.



22

INFO SUMSEL

Progres pembangunan di Sumatera Selatan terus berjalan ke arah positif. Salah satu capaiannya adalah terus berkurangnya penduduk miskin di Sumsel. Hasil tersebut cukup membanggakan bagi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi.



36

INFO KALTIM

Tiga daerah di Kalimantan Timur memiliki tensi kerawanan tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).



56

INFO PILKADA

Sudah tiga nama beredar sebagai bakal calon dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung. Awal Agustus akan lebih jelas lagi status pencalonannya.



66

INFO NASIONAL

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan strategi kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Strategi tersebut bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak terkait.



76

INFO PALEMBANG

Sejak dilantik menjadi Pj Walikota Palembang pada Rabu 16 Juni 2024 lalu, Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta, berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya. Ia pun siap melanjutkan program-program yang dilakukan para pendahulunya. Termasuk di dalamnya program pengentasan kemiskinan, melalui peningkatan lapangan kerja.



87

INFO KHUSUS

Aspek akseptabilitas (penerimaan) kesepakatan antarpolisi memang berpengaruh terhadap pencalonan. Namun, akan banyak kemungkinan pasangan calon lepas dari pola koalisi partai yang terbentuk dalam Pilpres, seperti Koalisi Indonesia Maju.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

34 INFO KALTARA

78 INFO EKONOMI

82 INFO ISTANA

86 KAJI

38

INFO PROFIL

Ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kartika Sandra Desi menjadi perempuan pertama yang menakhodai DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel).

DEFISIT

Defisit itu kekurangan. Jadi, defisit anggaran adalah kekurangan dana. Maka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berarti nilai pendapatan negara kurang dari angka yang sudah disusun secara tahunan.

Nah, untuk APBN 2024, tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Bendahara Negara sudah menyampaikan total defisitnya diproyeksikan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih tinggi dari target sebelumnya, yakni Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.

Juga layak dipahami, proyeksi pembengkakan defisit menunjukkan asumsi-asumsi yang melandasi APBN belum tentu terpenuhi. Sebagai pengingat, ketika pengesahan APBN 2024, pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi terkendali di tingkat 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen, harga minyak dunia (ICP) 82 dolar AS per barel, lifting minyak 635 ribu barel per hari, serta lifting gas 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, perbedaan antara asumsi dan kenyataan menunjukkan pengaruh domestik (dalam negeri) dan eksternal (global). Ini terlihat dari prognosis Belanja Negara semester II 2024 yang diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari alokasi dalam APBN 2024. Dalam data outlook APBN 2024, rincian alokasi tambahan belanja negara itu antara lain: Tambahan alokasi bantuan beras serta bantuan daging ayam dan telur untuk Januari-Juni serta perpanjangan bantuan beras tiga bulan (Agustus, Oktober, Desember) Rp11 triliun, penambahan volume subsidi pupuk Rp24 triliun, kebutuhan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun Rp500 miliar, percepatan belanja yang bersumber pembiayaan luar negeri dan dalam negeri Rp105,9 triliun, tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada, juga belanja non-K/L sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi Rp37,1 triliun.

Jelaslah menyelenggarakan negara bukan pekerjaan sederhana. Dari gambaran proyeksi melebarinya defisit APBN 2024, tampaknya yang diperlukan Indonesia adalah semakin banyak warga yang tak bergantung langsung pada APBN.

Bu Menkeu sudah mengingatkan, beberapa hal seperti geopolitik, kebijakan suku bunga, kinerja ekonomi negara-negara maju, isu perubahan iklim, digital technology, aging population, itu semuanya akan menjadi faktor yang harus terus kita amati dan jaga, agar pengaruhnya kepada ekonomi (dalam negeri) bisa kita mitigasi. Lebih dari itu, justru harus semakin banyak orang Indonesia yang ahli dan mendapat penghasilan dari bidang-bidang tadi. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



SOAL WARISAN UTANG UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Beda literasi, sangat mungkin beda pandangan. Apalagi jika menyangkut kemampuan pemerintah membayar utang.

Memasuki semester kedua, Juli-Desember 2024, urusan utang pemerintah kian menjadi sorotan. Meskipun sebenarnya sejak Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengemukakan posisi utang dan kemampuan Bayarnya masih aman.

(85 persen) dari produk domestik bruto (PDB) masing-masing negara. Sedangkan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB sebesar 38,64 persen.

Dengan kondisi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih sangat aman, sebab ketika

fisitnya melonjak dari 6,1 persen tapi kita bisa konsolidasi fiskal dalam waktu yang sangat segera sehingga dari sisi rasio utang kita begitu naik kemudian turun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis, 6 Juni 2024.

Sri Mulyani pun menegaskan, ukuran rasio utang terhadap PDB menjadi fokus



Penegasan posisi aman itu sudah dikemukakan Menkeu Ani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. Menurut dia, rasio utang Indonesia tersebut lebih rendah jika dibandingkan negara lain seperti Malaysia (60,4 persen), Thailand (61 persen), India (88,5 persen), hingga Argentina

melonjak saat masa Pandemi Covid-19 karena ekonomi terhenti dan kebutuhan belanja membengkak, mampu turun seiring pandemi yang juga berangsur berakhir.

“Kalau kita lihat dari sisi rasio utang Indonesia terhadap GDP ratio kita meski dalam situasi syok tahun 2020 yang de-

yang terus pemerintah lihat setiap perodenya, sebab bagi pemerintah yang terpenting ialah menjaga batas rasio utang tetap di level aman sesuai ketentuan undang-undang. “Ini sangat diperhatikan sekali dan di-noticed sebagai suatu komitmen dari pengelolaan APBN yang baik,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu Ani menjelaskan, dalam kondisi 10 tahun yakni pada tahun 2012 ke 2022, hampir semua negara mengalami lonjakan rasio utang. "Kita lihat hampir G20 semua naik dari sisi debt GDP ratio, even seperti negara Rusia dalam hal itu. Saudi pun juga kenaikan dari utangnya karena mereka ingin



membangun," katanya.

Tren kenaikan utang pemerintah ini sudah terjadi sejak 2015, atau sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Jumlah utang pemerintah semakin besar, terutama dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Selama ini, SBN menjadi komponen dominan dalam

utang pemerintah. Bahkan, sejak 2001 hingga 2023, porsi SBN sebagai sumber pendanaan pemerintah semakin besar.

Pada 2001 misalnya, sebanyak 51,9 persen porsi utang pemerintah berasal dari SBN. Sementara pada 2023, porsi utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai 88,6 persen.

Nah, pada periode pemerintahan baru Prabowo-Gibran, pembayaran SBN tertinggi justru memasuki jatuh tempo pembayaran. Pada 2025, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 704 triliun. Ini menjadi jumlah pembayaran utang jatuh tempo tertinggi

"Akhirnya mereka bilang bertahap, karena kalau Rp 400 triliun kan pasti investor sudah mempertanyakan dong," kata Aviliani saat ditemui di kawasan Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2024.

"Kalau anggaran sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, itu kan menjadi pertanyaan mereka pastinya terhadap multiplier effect ekonomi, dan itu akan berdampak juga nanti pada obligasi yang dijual pemerintah kan," tegasnya.

Menurut Aviliani, meski pemerintah sudah memastikan anggaran Rp 71



dalam 40 tahun ke depan.

Kalangan ekonom yang memiliki literasi tinggi soal keuangan negara memang mengingatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 akan berat. Dengan utang jatuh tempo yang membengkak, ada pula kebutuhan anggaran demi merealisasikan program Presiden Terpilih Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, dengan besarnya beban itu tak heran Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menetapkan anggaran makan bergizi gratis Prabowo senilai Rp 71 triliun pada 2025. Padahal, kebutuhan itu mulanya diungkap Tim Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2024 sekitar Rp 400 triliun.

triliun untuk program yang dulu disebut makan siang gratis bagi para siswa itu tidak akan membuat APBN 2025 bengkok defisitnya, juga harus dipastikan kepada masyarakat strategi pembayaran utang jatuh tempo yang mulai melebar pada 2025 hingga 2029 nanti.

Mengutip data profil jatuh tempo utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2024 baru mencapai Rp 434,29 triliun. Dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.

Sedangkan, pada 2025 utang jatuh tempo naik menjadi Rp 800,33 triliun. Rinciannya SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

Selanjutnya, pada 2026 naik lagi menjadi Rp 803,19 triliun, terbagi men-

jadi SBN Rp 703 triliun dan pinjaman Rp 100,19 triliun. Angka utang jatuh tempo mulai melandai pada 2027 menjadi Rp 802,61 triliun, terdiri dari SBN Rp 695,5 triliun dan pinjaman Rp 107,11 triliun.

Sedangkan Pada 2028, utang jatuh tempo menjadi hanya sebesar Rp 719,81 triliun yang terdiri dari SBN Rp 615,2 triliun dan pinjaman Rp 104,61 triliun, dan 2029 kembali turun menjadi Rp 622,3 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo dalam bentuk SBN sebesar Rp 526,1 triliun dan pinjaman sebesar Rp 96,2 triliun.

"Nah ini kan yang masih banyak menjadi pertanyaan orang. Saya rasa memang pengelolaan APBN tahun depan itu agak berat, karena kan utang jatuh temponya cukup besar," tutur Aviliani.

bisa masuk lagi kan, sekarang kan banyak yang keluar juga nih gara-gara itu," tegas Aviliani.

Sebagaimana diketahui, usai pemerintah menjelaskan terkait anggaran makan bergizi gratis dan kepastian pengelolaan fiskal yang hati-hati pada 2025, rupiah ditutup menguat 0,3 persen di angka Rp16.390/US\$ pada Senin, 24 Juni 2024. Rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya yakni di level Rp16.470/US\$.

Namun, aliran modal asing tercatat masih keluar sejak pekan lalu. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), pekan lalu tepatnya pada data transaksi 19-20 Juni 2024, investor asing tercatat jual netto Rp0,78 triliun, terdiri dari jual netto Rp1,42 triliun di pasar saham, beli netto Rp0,45 triliun di SBN dan beli netto

anggaran negara yang kuat untuk membayar utang negara yang kian menumpuk.

Namun posisi utang seperti itu dan kondisi serta kemampuan bayar akan berbeda dalam pandangan masyarakat dengan literasi keuangan yang beragam, namun jarang yang setara dengan para ekonom yang memiliki kompetensi dan otoritas memadai. Ini terlihat dari hasil survei big data Indef terhadap para netizen di media sosial yang hasilnya keluar pada awal Juli 2024.

Secara ringkas, kajian Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyimpulkan, mayoritas pengguna media sosial ragu presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming



Ini yang menurut dia membuat aliran modal asing masih terus keluar di Indonesia walaupun nilai tukar rupiah sudah mulai kembali menguat setelah pemerintah dan tim sinkronisasi kebijakan Prabowo-Gibran menjelaskan soal anggaran program makan bergizi gratis maupun defisit dan rasio utang APBN 2025 yang dipastikan tetap dalam batas aman.

"Karena sebenarnya kalau bisa sudah bisa menyampaikan clue-clue sebenarnya nanti itu di Agustus itu seperti apa sih. Jadi ini juga untuk supaya investor

Rp0,19 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Sepanjang tahun ini, berdasarkan data settlement sampai dengan 20 Juni 2024, investor asing tercatat jual netto Rp42,10 triliun di pasar SBN, jual netto Rp9,35 triliun di pasar saham, dan beli netto Rp117,77 triliun di SRBI.

Toh memang pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mewarisi utang dari zaman Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Setidaknya pemerintahan Prabowo-Gibran harus mempersiapkan

Raka mampu menyelesaikan masalah utang semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Continuum Indef melaksanakan riset melalui media sosial X selama 15 hari, dari 15 Juni-1 Juli 2024.

Indef kemudian menganalisis 22 ribu perbincangan dari 18 ribu akun yang membahas soal kondisi utang negara. Indef menemukan ada 218 ribu kata kunci yang masuk dalam kategori perbincangan mengenai utang. Alhasil, lembaga riset big data milik Indef ini menyebut sebanyak 72,5 persen netizen menyatakan ragu.

"Angkanya ini cukup mengejutkan, ternyata 72,5 persen pesimis utang ini mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani Prabowo-Gibran dalam 5 tahun mendatang," kata Direktur Pengembangan Big Data Continuum Indef, Eko Listiyanto dalam diskusi Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Eko menafsirkan pembicaraan di jagat maya ini menunjukkan sebagian masyarakat menilai kondisi utang negara sudah terlalu buruk. Dengan begitu, sambungnya, optimisme mereka terhadap kemampuan presiden baru dalam menyelesaikan masalah utang itu menurun.

Menurut Eko, kekhawatiran publik mengenai utang tersebut sebenarnya terkonfirmasi di dunia nyata. Dia men-



"Ini sangat diperhatikan sekali dan di-noticed sebagai suatu komitmen dari pengelolaan APBN yang baik"

gatakan ketika isu Prabowo akan memperlebar defisit 2025 mencuat, banyak investor kabur dari Indonesia. Hal itu menyebabkan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp 16.400/US\$.

"Itulah yang terjadi di sektor riil dan keuangan kenapa kemudian ketika ada isu defisit APBN diperlebar, bukannya senang karena ekonomi bisa tumbuh tinggi, tapi yang terjadi malah kabur dan menahan diri," katanya.

Toh Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya tetap optimistik dengan kondisi keuangan pemerintahan pada 2024 maupun 2025 dan seterusnya. Yang terjadi kemudian adalah pengangkatan anggota Tim Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono.

Thomas mengemukakan, pelantikannya menunjukkan keberlanjutan

pemerintahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Keponakan Prabowo itu dilantik sebagai Wamenkeu II yang mendampingi Wamenkeu I Sua-hasil Nazara.

"Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menun-

dan Belanja Negara (APBN) 2025 selaras antara kebutuhan pemerintahan saat ini dengan program pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mendatang. "Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke



jukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih (Prabowo Subianto)," ujar Tommy, nama ringkasnya, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

la menjelaskan, tugasnya adalah memastikan agar Anggaran Pendapatan

depan," katanya.

Para ekonom tetap optimistik asal pemerintahan Prabowo-Gibran hati-hati mengelola anggaran negara mulai 2025. Untuk menghadapi persepsi negatif publik, Tommy Djiwandono pasang badan. ●



MITIGASI DEFISIT ANGGARAN 2024

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan lebih tinggi dari target semula. Namun, sebelum pemerintahan Jokowi-Ma'ruf beralih ke Prabowo-Gibran, upaya mitigasi tak kurang juga.

Jadi, defisit APBN yang lebih tinggi dari target sudah terbuka dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam rapat itu, Menkeu Ani mengemukakan total keseluruhan defisit pada tahun ini diprediksi akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7 persen dari PDB.

Angka itu lebih tinggi dari yang ditargetkan sebelumnya di dalam APBN yakni Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB. Banyak faktor menjadi pemicunya.

"Kenaikan defisit Rp80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tadi mengalami beberapa koreksi, atau tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar dari PNPB, pajak dan bea cukai, terutama di semester-I. Tetapi kemudian kita bisa tumbuh tipis

di semester-II. Dan juga belanja negara yang mengalami positive growth hingga 9,3 persen," ungkap Bu Menkeu dalam rapat dengan Banggar DPR yang berlangsung, Senin, 8 Juli 2024.

Rinciannya, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen (year-on-year/yoy), utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).

Cakupan pendapatan negara, antara lain penerimaan dari pajak, yang diproyeksikan mencapai Rp1.921,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari yang sudah ditargetkan sebelumnya yaitu Rp1.988,9 triliun. Selain itu, pen-



erimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang diproyeksikan mencapai Rp296,5 triliun.

"Sementara PNBP (diprediksi) akan tercapai Rp549,1 triliun atau di atas target 111,6 persen atau dalam hal ini tetap tumbuh negatif 10,4 persen karena tahun lalu memang PNBP kita sangat, sangat, sangat tinggi," jelasnya.

Jelas pula kenaikan defisit APBN terkait dengan penerimaan negara yang tidak mampu membiayai belanja. Dibandingkan posisi 2023, penerimaan negara pada 2024 hanya naik Rp 18,6 triliun (0,67 persen). Pada saat yang sama, belanja membengkak Rp 291 triliun (9,32 persen).

Kinerja penerimaan negara itu, kata Bu Menkeu, antara lain dipengaruhi oleh tren penurunan harga komoditas yang mengurangi laba bisnis sumber penerimaan pajak. "Penurunan profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang CPO, batu bara, dan tembaga. Mereka juga meminta restitusi yang lebih cepat," ungkap Sri Mulyani.

Penerimaan negara dari batu bara saja, lanjut Sri Mulyani, bisa mencapai

Rp 68 triliun pada semester I-2024. Sekarang tinggal tersisa Rp 14,2 triliun atau anjlok 53,9 persen. "Komoditas sawit juga turun dari Rp 15,6 triliun ke Rp 6,8 triliun. Tembaga juga turun dari tahun lalu Rp 10,8 triliun tahun ini Rp 6,6 triliun," papar Sri Mulyani.

Sementara belanja negara meningkat tajam. Pada semester I-2024, belanja



Sementara PNBP (diprediksi) akan tercapai Rp549,1 triliun atau di atas target 111,6 persen atau dalam hal ini tetap tumbuh negatif 10,4 persen karena tahun lalu memang PNBP kita sangat, sangat, sangat tinggi.

negara melonjak 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong dengan kenaikan 11,9 persen. Dari belanja pemerintah pusat, faktor utama peningkatan adalah belanja Kementerian/Lembaga yang melonjak 16,8 persen.

Sri Mulyani mengakui bahwa salah satu penyebab kenaikan belanja K/L adalah keputusan pemerintah untuk mengerek gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri sebesar delapan persen. Juga kenaikan tunjangan pensiun sebesar 12 persen.

Dalam UU APBN 2024, anggaran belanja pegawai tercatat Rp 484,4 triliun. Melonjak 17,5 persen dibandingkan 2023. Sementara belanja non-K/L tumbuh 7,6 persen pada semester I-2024. Salah satunya disebabkan oleh belanja bantuan sosial (bansos).

Hingga semester I-2024, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 14,2 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian ada penyaluran Kartu Sembako senilai Rp 22,2 triliun

kepada 18,7 juta KPM.

Jadi, total belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber (peredam kejut) untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Adapun realisasi penerbitan SBN neto hingga semester I-2024 tercatat sebesar Rp206,2 triliun atau 30,9 persen terhadap APBN. Di tengah dinamika pasar keuangan, stabilitas pasar SBN tetap terjaga dengan kenaikan imbal hasil (yield) yang tetap terkendali.

Kemenkeu memastikan pembiayaan defisit melalui utang dilakukan secara terukur untuk mendapatkan biaya yang paling efisien dan risiko yang terkendali. Penerbitan Surat berharga Negara (SBN) dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, baik terkait diversifikasi instrumen, currency mix, timing penerbitan, maupun komposisi tenor.

"Kehati-hatian inilah yang diharapkan mampu menjaga kredibilitas dari APBN, stabilitas kebijakan fiskal, dan stabilitas seluruh makroekonomi," kata Menkeu pula.

Nah, sebagai alternatif mengimbangi defisit itu, pemerintah kata Bu Menkeu akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun. Dengan begitu, pembiayaan defisit APBN melalui utang atau melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bisa lebih ditekan lagi.

"Inilah, sebetulnya tahun 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar dipakai pada saat situasi sekarang, pada saat suku bunga dunia tinggi, rupiah sedang mengalami tekanan. Kami bisa menjaga agar SBN tidak di-issue lebih banyak sehingga dengan demikian kami bisa menjaga competitiveness dari yield SBN kita tanpa mengalami tekanan yang besar. Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp100 triliun tambahan dari yang Rp 51 triliun yang

sudah kita usulkan UU APBN," jelasnya.

Menkeu Sri Mulyani juga melaporkan bahwa untuk semester-I 2024 APBN telah mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB. Angka tersebut tentu tidak terlalu menggembarakan mengingat pada periode yang sama pada tahun lalu anggaran negara masih tercatat surplus Rp152,3 triliun.

"Namun apabila kita lihat dari postur APBN keseluruhan APBN 2024, di mana desain dari APBN 2024 adalah defisit mencapai Rp552,8 triliun, maka realisasi defisit Rp77,3 triliun masih di dalam range yang ada di dalam APBN kita," jelasnya.

Mantan Managing Director World Bank ini juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tanah air secara keseluruhan pada tahun ini akan berkisar di 5,0-5,2 persen. Target ini jauh lebih rendah dari sebelumnya di mana dalam asumsi makro APBN 2024 pemerintah mematok ekonomi tanah air bisa tumbuh di level 5,2 persen.

Alasannya, perekonomian dunia kata Menkeu

Sri masih cenderung stagnan bahkan melemah. Selain itu situasi dan kondisi geopolitik, serta kebijakan fiskal dan moneter yang ketat dari berbagai negara maju pasti berimbas pada negara-negara di emerging market termasuk Indonesia.

"Proyeksi untuk semester-II dari pertumbuhan ekonomi kita memperkirakan pada kisaran 5,0-5,2 persen sehingga outlook untuk keseluruhan tahun ini di 5,0-5,2 persen. Ini masih mendekati dari asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN yang 5,2 persen," ujar Bu Menkeu.

Sedangkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa defisit APBN 2024 melebar ke angka 2,7 persen terhadap PDB masih dalam posisi aman. Hitung-hitungannya, pelebaran mencapai 0,41 persen dari target awal 2,29 persen terhadap PDB.

la mengemukakan, angka tersebut masih di bawah batas maksimal defisit APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal tiga persen dari PDB. "Itu bagus, artinya masih di bawah tiga persen," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa, 9 Juli 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa angka 2,7 persen pun masih di bawah proyeksi



pemerintah pada awal 2024. “Kemarin kan pembahasan [defisit] sampai 2,8 persen, jadi 2,7 persen dalam range yang baik. Tahun depan 2,8 persen, aman lah,” tuturnya.

Pada Februari 2024 pemerintah sudah memproyeksikan defisit dengan rentang 2,29 persen hingga 2,8 persen. Hal ini akibat pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun

jadi Rp854 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tambahan belanja terdiri dari tambahan bantuan sosial (bansos) untuk beras, daging ayam, dan telur, tambahan belanja pupuk subsidi, serta realisasi dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.

Rinciannya antara lain tambahan alokasi bantuan beras serta bantuan daging ayam dan telur untuk Januari-Juni serta perpanjangan bantuan beras 3 bulan (Agustus, Oktober, Desember) Rp11 triliun. Selain itu, penambahan volume subsidi pupuk Rp24 triliun.

pelaksanaan dan prognosis yang telah disampaikan telah mempertimbangkan situasi terkini, yakni turunnya harga komoditas dan laporan beberapa tambahan belanja.

Alhasil, tercapai kesepakatan pemerintah dengan DPR. “Dengan demikian apakah laporan semester dapat disetujui dan jadi kesimpulan DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam realisasi semester-I dan prognosis semester-II APBN 2024, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.



PMK-07 TAHUN 2024

PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN

YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024



atau bertambah Rp14 triliun. Selanjutnya pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras hingga Desember dengan anggaran Rp11 triliun.

Apapun, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah sudah sepakat menambah belanja negara pada 2024 sebesar Rp87,1 triliun menjadi Rp3.412 triliun dibandingkan dengan target awal Rp3.325 triliun.

Berdasarkan data outlook APBN 2024, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.558 triliun atau naik Rp90,7 triliun dari target awal belanja pemerintah pusat 2024 yang sebesar Rp2.467 triliun. Di sisi lain, target transfer ke daerah menyusut Rp3,6 triliun dari Rp857 triliun men-

Selanjutnya pos belanja tambahan lainnya adalah kebutuhan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun Rp500 miliar, juga percepatan belanja yang bersumber dari pembiayaan luar negeri dan dalam negeri Rp105,9 triliun.

Tercatat pula tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada. Juga belanja pemerintah non-Kementerian/Lembaga yang memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi Rp37,1 triliun.

Dalam rapat dengan Banggar DPR itu Menkeu Ani mengemukakan, laporan

Bu Menkeu menyatakan, Banggar memberikan catatan terkait relaksasi Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar lima persen. Ia menyatakan Banggar meminta agar mekanisme relaksasi Automatic Adjustment dilakukan secara selektif dan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. “Ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami bendahara negara dalam mengelola keuangan negara,” ucapnya.

Bagaimana dengan APBN 2025? Kita simak saja pidato Presiden Jokowi pada pengantar APBN yang lazimnya berlangsung pada 16 Agustus menjelang peringatan HUT Proklamasi RI. •

KOSLAP KEJAR PERTUMBUHAN 8 PERSEN

Salah satu nama sandi Prabowo adalah Koslap, 08, kosong delapan. Belakangan, beberapa kali ia mengemukakan cita-citanya membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka delapan persen per tahun. Setelah dilantik menjadi Presiden kedelapan RI tentu.

Acaranya, Peluncuran Geoport One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berlangsung di The St. Regis Hotel, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir menggantikan Presiden Joko Widodo yang bersiap melantik tiga Wakil Menteri di Istana Negara.

Prabowo menyampaikan Jokowi telah menginstruksikan dirinya untuk hadir dalam acara yang diinisiasi oleh Kementerian Perekonomian tersebut.

sedang melatih saya supaya nanti tidak terlalu kaget setelah saya dilantik. Insya Allah,” sambungnya.

Ia menjelaskan cara Jokowi tersebut merupakan pelajaran kepemimpinan sebagai sosok pemimpin yang baik. “Jadi itulah cara beliau. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legawa, pemimpin yang menyiapkan penggantinya,” jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, latihan itu sudah berlangsung beberapa waktu. “Beliau sekarang mengikutsertakan saya dalam hampir semua rapat kabinet dan saya



“Saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Joko Widodo. Apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah catatan-catatan dan poin-poin dari beliau,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo mengakui Jokowi tengah melatihnya agar tidak kaget saat dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024 mendatang. “Saya kira Bapak Presiden

duduk di sebelah presiden sekarang. Mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan,” lanjutnya.

Mengenai acaranya, Prabowo mengharapkan Geoport Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat menciptakan efisiensi dan menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses

pembangunan bisa lebih cepat. "Kecepatan sekarang adalah elemen penting dari pemerintahan yang efektif. Dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antarnegara sangat keras. Oleh karena itu, negara dan bangsa yang dapat memberikan kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan baik akan unggul," papar Prabowo.

Di acara itu pula ia mengemukakan lagi gagasannya tentang target pertumbuhan delapan persen per tahun. Prabowo tampak kurang puas dengan proyeksi pertumbuhan pemerintahan Jokowi yang mematok angka di kisaran lima persen per tahun.

"Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Saya optimis kita bisa mencapai delapan persen pertumbuhan (ekonomi).

Bahkan, saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya gak sebut negara mana, banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," ungkapnya.

Dari ungkapan Prabowo, memang sebelumnya ia telah mengemukakan soal pertumbuhan delapan persen. Yang paling banyak dipublikasikan adalah pernyataannya ketika tampil di Qatar Economic Forum 2024 di ibu kota negeri itu, Doha, pada Rabu, 15 Mei 2024.

Dalam sesi wawancara dengan Ha-sinda Amin dari Bloomberg Television, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi. "Saya sangat yakin dapat mencapai pertumbuhan produk domestik bruto [PDB] sebesar delapan persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Saya bertekad untuk melampaui itu," kata Prabowo.

Wawancara itu berlangsung sekitar 15 menit saja. Namun, banyak poin yang telah disampaikan oleh Prabowo. Utamanya terkait dengan ekonomi dan politik.

Sebelum mengemukakan pertumbuhan delapan persen itu, Prabowo mengungkapkan prioritas atau fokus

kebijakan selama menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membangun fondasi yang kuat dan saya bertekad untuk membangun fondasi tersebut.

"... Fokus utama saya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, menurunkan angka kemiskinan, serta hilirisasi dan industrialisasi... Semua ini membutuhkan tata kelola yang baik.

tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, hal yang akan menjadi pendorong pertumbuhan di tahun-tahun pertama adalah konsentrasi pada sektor pertanian, produksi pangan, distribusi pangan dan energi. Prabowo ingin Indonesia mengusung green economy dengan cara yang sangat cepat. Prabowo menyebutkan antara lain produksi bahan bakar solar dari minyak kelapa sawit dan ini akan menjadi pen-



Saya bertekad untuk mengurangi korupsi, pemborosan dan dengan itu kami sangat percaya diri, kami sangat optimis, kami sangat bertekad untuk mewujudkan semua ini," ujar Prabowo.

Nah, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen itu Prabowo mengatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dimulai oleh Jokowi. Menurut dia, hilirisasi akan memakan waktu beberapa

dorong pertumbuhan yang sangat kuat.

"Kami mengimpor US\$20 miliar setiap tahun untuk minyak diesel, jadi dapatkah Anda bayangkan penghematan yang akan kami dapatkan jika kami beralih ke bahan bakar nabati?" ujarnya beretorika.

Ketika ditanya apakah hilirisasi merupakan kebijakan proteksionisme, Prabowo menjawab ada kesalahan persepsi. Dengan menerapkan hilirisasi,

Indonesia tidak proteksionis. Justru, Prabowo mengungkapkan hal itu sangat logis.

Alasannya, setiap negara di dunia akan memperjuangkan atau melindungi kepentingan inti nasional rakyatnya dan dia berpikir bahwa Indonesia ingin melakukan industrialisasi dan itu adalah sumber daya alam RI. "Kami harus melindungi kepentingan masyarakat dalam arti bahwa Indonesia harus mendapatkan nilai penuh. Kami tidak bisa terus mengimpor barang-barang industri sepanjang waktu, itu tidak adil

timnya telah mempelajari kebutuhan program makan siang dan susu gratis. "Kami telah mempelajari semua angka-angka dan kami sangat yakin bisa melakukannya. Kami sangat yakin kami bisa melakukannya," tegasnya.

Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit tiga persen PDB sebenarnya menunjukkan kebijakan yang sewenang-wenang. Dia mengatakan tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut. Namun, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi manajemen

yang dihadapi pemerintah adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik.

Menurut Prabowo, Indonesia tengah memperkenalkan e-governance, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah Indonesia akan melalui e-katalog. "Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.

Nah, konteks peluncuran Geoportal 2.0 di Jakarta tentu saja berkaitan



bagi rakyat. Kami tidak akan menjadi masyarakat industri yang maju jika hanya menjadi produsen bahan mentah," tegas Prabowo.

Tak urung Haslinda Amin menyoal program makan siang gratis. Haslinda bertanya bagaimana cara Prabowo melaksanakan program makan siang dan susu gratis, tanpa harus menaikkan defisit APBN yang dibatasi tiga persen dari PDB.

Prabowo pun menjawab bahwa

fiskal yang baik.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Prabowo mengatakan saat ini yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting. Dia mengaku masalah



Saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Joko Widodo. Apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah catatan-catatan dan poin-poin dari beliau.

dengan digitalisasi yang dikemukakan Prabowo saat diwawancarai Haslinda di Doha. Di Jakarta, Prabowo

malah mengaku bertaruk dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya enggak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya.

"Your excellency, if you can achieve 8 percent growth, once, sekali saja dalam lima tahun yang akan datang, kita mencapai delapan persen. mereka they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya!"

"Saya bilang: You're on. Kalau kami mencapai delapan persen, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat saja," ucap Prabowo yang bernama sandi Koslap itu. ●

PIDATO PRABOWO DI PELUNCURAN GEOPORTAL ONE MAP POLICY 2.0

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saudara-saudara sekalian, saya diinstruksikan untuk mewakili bapak presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau.

Baru saja kita diberi presentasi (oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) tentang upaya untuk membuat suatu infrastruktur percepatan pembangunan, selain infrastruktur fisik juga ada infrastruktur konektivitas, dan juga infrastruktur pengelolaan.

Yang kita hadapi sekarang adalah yang sudah dicapai, one map policy yang sangat strategis dan dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemukiman ruangan sehingga proses pembangunan bisa cepat.

Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antar negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan yang paling baik itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita butuh iklim yang baik, untuk itu kita perlu governance yang baik.

Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemukiman ruangan, tadi disampaikan hampir sebesar 20 juta hektare. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi.

Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi menko perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis kita bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan.

Bahkan ia mengaku bertaruh den-

gan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya enggak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya.

"Your excellency, if you can achieve 8 percent growth, once, sekali saja dalam lima tahun yang akan datang, kita mencapai 8 persen. mereka they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya!"

ini, one map policy, dengan e-catalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisienan. Saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuahkan hasil dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional kita bisa mempercepat pembangunan.

Saya kira itu dari saya, saya ucapkan



Saya bilang "You're on. Kalau kita mencapai 8 percent, you harus beli saya makan malam". Ya, kita nanti lihat saja.

Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Dengan program-program seperti

terima kasih dan rasa hormat saya, penghargaan setinggi-tingginya kepada yang telah bekerja keras untuk menyusun rencana-rencana seperti one map policy dan seterusnya

Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat menko perekonomian, seluruh menteri, dan mereka-mereka yang bekerja keras sehingga kita berhasil hari ini meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy Beyond 2024

Saya kira itu dari saya. Wassalamu'alaikum wr.wb. •

KOMPETISI DUA KUBU DALAM PILKADA 2024

Ada hal yang menarik dari kesenjangan wacana publik, dengan praktik konkret di lapangan dalam dinamika Pilkada 2024. Banyak tokoh dan pembesar politik menyatakan pemilihan presiden sudah selesai dan partai-partai — termasuk di jajaran provinsi dan kabupaten/kota — tak terikat lagi dengan koalisi 01, 02, ataupun 03. Namun, apa yang terjadi di lapangan ternyata berbeda.

Pertengahan Maret 2024, saya mewawancarai mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan tegas, ia menyatakan tak tertarik jabatan lain, ingin kembali jadi gubernur. Bahkan, untuk wakil, juga mantap akan mengajak lagi Emil Dardak.

Jauh-jauh, sebelum pemilihan presiden (pilpres), para petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dari Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN sudah menyatakan akan mendukung Khofifah menjadi gubernur Jawa Timur lagi.

Balasannya, Khofifah dan Emil juga habis-habisan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden.

Koalisi pilpres ternyata semakin menguat dalam dinamika persiapan Pilkada 2024, setidaknya di Jawa Timur. KIM segera menindaklanjuti deklarasi Khofifah, dengan pengukuhan rekomendasi yang diserahkan secara langsung oleh ketua umum masing-masing.

Begitu solidnya “Koalisi Pilpres 02” di Jawa Timur, tawaran koalisi PDI Perjuangan yang akan menempatkan wakil gubernur tak bisa diterima karena sudah ada Emil Dardak, pendukung fanatik Prabowo-Gibran.

Kehadiran wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui Khofifah juga bisa dimaknai sebagai restu dan dukungan Presiden Joko Widodo.

Persaingan Dua Kubu

Makin mengerucutnya dua kubu dalam Pilkada 2024, antara “Koalisi Pemenang Pilpres Plus” dan “Koalisi PDIP Plus”, sebut saja begitu, juga terjadi di beberapa provinsi strategis.

Di Jawa Tengah, bahkan belum jelas siapa yang akan dijagokan PDIP, apakah mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, atau Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto yang dikenal sebagai Bambang Pacul. Selain kemungkinan membaca lawan siapa yang akan dihadapi, juga menunggu siapa kawan yang akan bergabung. Tak sederhana peta politik pilkada di Jawa Timur.

KIM belum terkonsolidasi, antara Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra, atau Kapolda Jawa Tengah Irijen Ahmad Luthfi. Sudaryono, yang sering menyatakan dirinya mendapat tugas langsung dari Prabowo Subianto, sudah mendeklarasikan

Oleh: Bambang Sadono
Pemandu Kanal Inspirasi untuk Bangsa

secara terbuka pencalonannya, baik melalui media, termasuk baliho, maupun dalam pertemuan terbuka di banyak tempat.

Tanda-tanda mengerucut ke Luthfi mulai tampak setelah PAN terang-terangan mendukung dan anggota KIM yang lain tidak ada tanda-tanda menolak. Sisanya tinggal mencari pos lain untuk Sudaryono, yang pasti mudah untuk pemenang pilpres.

Memang, masih ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dukungan kursinya di DPRD Jawa Tengah cukup signifikan. Namun, potensi untuk merapat menjadi plus ke KIM sangat terbuka. Peta ini mengarah pada terbentuknya koalisi besar KIM plus, dengan menjagokan Ahmad Luthfi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah sudah mulai memberi sinyal akan mendukung. Bahkan, jika benar spekulasinya calon wakil gubernur yang dipilih adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, otomatis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasti akan bergabung.

“Head to Head”

Peta Jawa Tengah cenderung mengarah ke head to head dalam pemilihan gubernur, November. Ahmad Luthfi, didukung KIM plus, akan menghadapi calon dari PDIP atau PDIP Plus.

Di Jakarta, fenomena dua kubu sisa koalisi pilpres juga terjadi. Bahkan, tanda-tanda semakin nyata ketika PKB, PKS, dan PDIP menginisiasi untuk mencalonkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketika ada tanda-tanda Koalisi 01 dan 03 menguat di Jakarta, Koalisi 02 juga makin terkonsolidasi.

Bergabungnya PDIP ke koalisi yang akan mencalonkan Anies mengindikasikan mengerasnya koalisi pilpres 01-03, untuk menghadapi koalisi besar 02. Padahal, selama ini, Anies dianggap lawan permanen PDIP di DKI Jakarta.

Suasana head to head ini menyebabkan Partai Golkar mempertimbangkan Ridwan Kamil, walaupun yang bersangkutan juga diharapkan menjadi andalan calon gubernur di Jawa Barat. Sebenarnya, sejak lama, Golkar juga sudah menyiapkan Ketua DPD DKI Ahmed Zaki Iskandar. Tanda-tanda persiapan head to head dua kubu besar ini terlihat ketika Ridwan Kamil yang saat ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga diusulkan oleh Partai Gerindra.

Kecenderungan fenomena head to head juga terasa di Sumatera Utara. Munculnya nama Bobby Nasution, Wali Kota Medan, menantu Presiden Jokowi sebagai calon gubernur, menjadi indikasi kuat. Golkar menjadi kerepotan untuk bertahan membela kadernya sendiri, Musa Rajekshah, yang merupakan wakil gubernur petahana dan sejak lama mempersiapkan diri jadi calon gubernur.

Edy Rahmayadi, Gubernur petahana yang tidak bisa lagi diu-

sung KIM, setidaknya Gerindra dan Golkar, mencari tambatan baru di PDIP yang pada periode sebelumnya menjadi lawan beratnya. Bahkan, PDIP sampai disebut perlu mengirim Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk bertempur di medan keras Sumatera Utara.

Lebih Prestisius

Jangan-jangan, menang dalam kontestasi pilkada lebih prestisius dibandingkan dengan keberhasilan memenangi Pilpres 2024. Prabowo dan Jokowi yang sudah berhasil memenangi pilpres mengapa merasa perlu untuk mengusahakan

Apakah pengaruhnya masih akan menjadi faktor dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pilkada seperti saat berlangsungnya pilpres. Inilah yang sekaligus akan menjadi legacy-nya setelah pensiun sebagai presiden, dan menjadi modal untuk menentukan langkah berikutnya.

Kritik keras yang masih terus dilancarkan oleh PDIP, terutama melalui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, semakin memperkuat kesan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi medan pembuktian, siapa yang sejatinya jawara dalam perpolitikan Indonesia.

Membayangkan Pilkada 2024 akan menjadi perhelatan poli-



kemenangan di mayoritas pilkada?

Bagi Prabowo, pemerintahannya akan lebih efektif, efisien, dan produktif jika terjadi linierisasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Berbagai kebijakan yang tidak segaris, karena kepentingan politik berbeda di setiap tingkatan pemerintahan, menyebabkan aplikasinya menjadi sulit, lambat, dan mahal.

Bagi Jokowi, momentum pilkada akan menjadi pembuktian tingkat kepuasan yang menurut beberapa lembaga survei masih tinggi, sampai masa akhir jabatannya, sekitar 80 persen.

Yang lebih cair, lebih simpel, dan riang gembira agaknya tak akan menjadi kenyataan. Partai-partai akan berhitung untung rugi, tak sekadar menang kalah di pilkada, tetapi juga dalam peran serta di pemerintah pusat lima tahun mendatang.

Politik barter dalam pilkada yang menentukan calon juga akan dipengaruhi koalisi pemerintahan baru selain KIM atau "Koalisi Pilpres 02". Akibatnya, iklim Pilkada 2024 akan bisa menghangat melebihi suasana Pilpres 2024. Jangan heran kalau mungkin akan banyak tangan yang kelihatan atau tersembunyi ikut cawe-cawe. ●



PENDUDUK MISKIN BERKURANG, INFLASI TERJAGA

Progres pembangunan di Sumatera Selatan terus berjalan ke arah positif. Salah satu capaiannya adalah terus berkurangnya penduduk miskin di Sumsel. Hasil tersebut cukup membanggakan bagi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi.

Bersama Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengabarkan bahwa angka Penduduk miskin Maret 2024 turun jika dibandingkan dengan Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan Maret 2024 tercatat mencapai 984 ribu orang atau turun 61,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2023 yang berjumlah 1.045,68 ribu orang.

"Alhamdulillah dan kita terimakasih angka penduduk miskin di Sumsel turun," jelas Elen.

Menurut Elen penurunan angka kemiskinan ini bisa terus dilanjutkan dengan fokus memperhatikan dan mengelola produksi dan distribusi bahan-bahan pokok seperti beras, telur ayam dan

cabai merah.

"Untuk beras kita akan coba mengkoordinasikan dengan Dinas Pertanian," jelas Elen.

Sementara Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto menjelaskan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 10,97 persen, mengalami penurunan 0,81 persen poin terhadap Maret 2023.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 10,04 persen, turun 1,03 persen poin dari Maret 2023. Untuk wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin sebesar 11,53 persen mengalami penurunan 0,68 persen poin dari Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 29,4 ribu orang dari 371,75 ribu orang pada Maret 2023

menjadi 342,34 ribu orang pada Maret 2024.

Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 32 ribu orang dari 673,93 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 641,90 ribu orang pada Maret 2024.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 554.197/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 413.237 atau 74,57 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 140.960 atau 25,43 persen.

"Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sumatera Selatan memiliki 5,10 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp

2.826.405,-/ rumah tangga miskin/bulan,” terangnya.

Komitmen Kendalikan Inflasi

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi juga terus berkomitmen dalam upaya mengendalikan inflasi di Sumsel. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi di Sumsel cukup stabil di mana deflasi month to month (mtm) Sumsel sebesar 0,03%, dan inflasi year on year (yoy) sebesar 2,48%, kemudian inflasi year to date (ytd) 0,64%, namun kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai.

“Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus mengendalikan inflasi di Sumsel. Kita bersama semua pihak akan menyusun strategi untuk mengendalikan inflasi,” ucap Elen saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumsel yang dihadiri sejumlah Bupati dan Walikota Se-Sumsel bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel.

Dikatakannya, sejumlah komoditas penyumbang inflasi yang patut menjadi perhatian adalah bawang merah, bawang putih, tomat, dan daging ayam ras. Sedangkan penyumbang utama inflasi Juni secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,34%.

Dia juga menyebut, komoditas penyumbang utama inflasi yoy antara lain emas perhiasan, beras, cabai merah, tarif air PDAM, dan daging ayam ras.

“Kalau kita amati komoditas tanaman pangan penyumbang inflasi adalah tanaman pangan hortikultura (tanaman jangka pendek). Selain itu Sumsel sebagai daerah penghasil beras, ternyata beras pun masih menjadi penyumbang inflasi juga. Artinya apa?, di sini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana program pasca panen padi seperti pengeringan dan penggilingan, juga proses distribusinya. Nah, kita akan melibatkan Bulog un-

tuk distribusinya sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

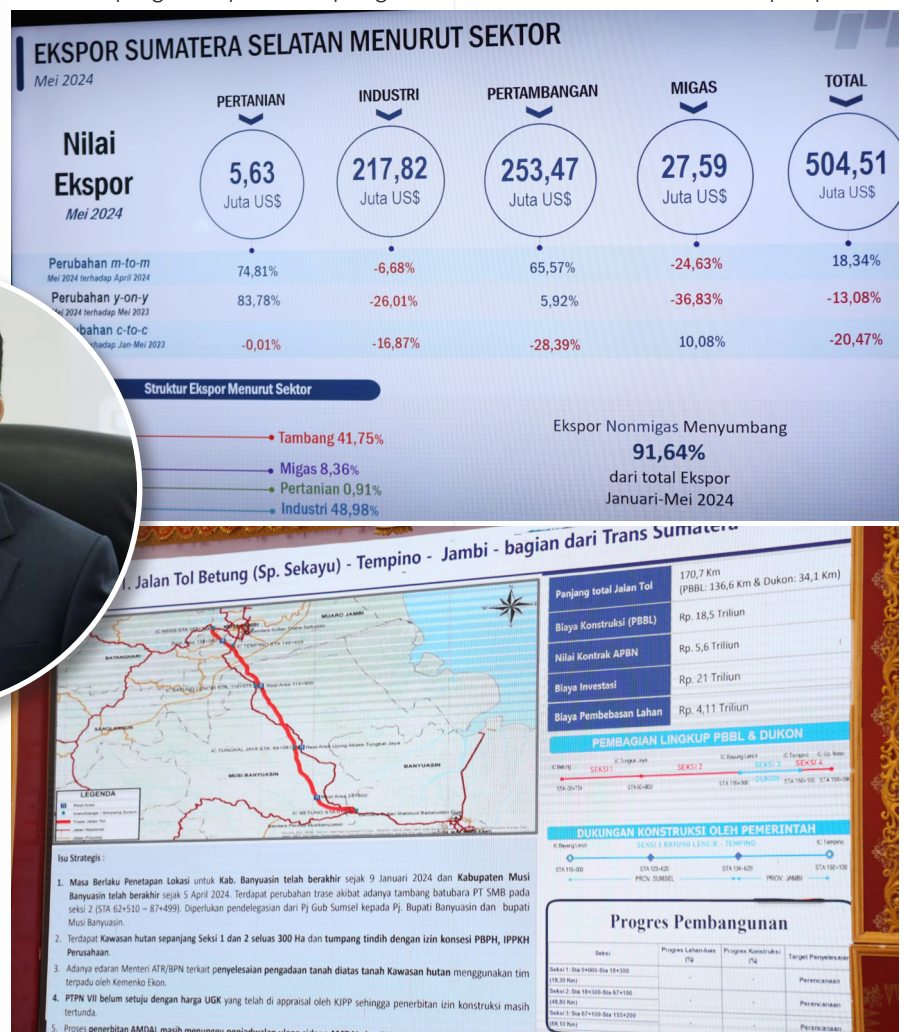
Ditegaskan Elen Setiadi, beberapa waktu sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin utama yang harus dilakukan oleh penjabat kepala daerah.

Pertama adalah pengendalian inflasi, kedua mewaspadai terhadap dampak el nino, ketiga mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keempat pengalokasian anggaran stimulus ekonomi dan bantuan sosial.

Kelima program prioritas pengen-

Keempat memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok daerah.

“Melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumsel ini, saya sampaikan segera bentuk Project Management Office agar masing-masing TPID bisa lebih mudah bersinergi. Selain itu agar para Kepala Daerah pada setiap rakor TPID untuk memimpin langsung kegiatan tersebut karena hal ini akan berdampak pada ki-



tasan kemiskinan ekstrim dan stunting, dan keenam adalah upaya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Elen Setiadi memberikan sejumlah catatan penting dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama memperkuat produksi pangan.

Kedua mengakselerasi penerapan teknologi, ketiga mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

nerja dan penilaian, serta kita akan melibatkan Bulog sebagai stabilisator dan fasilitator,” imbuhnya.

Sementara itu Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sekaligus selaku Ketua Harian TPID Sumsel Edward Chandra menyebutkan kegiatan HLM kali ini melibatkan para Kepala Daerah Bupati dan Walikota, juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepala Lembaga/Instansi vertikal di Sumsel. ●

TERUS DORONG REALISASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi, secara khusus mengharapkan sejumlah proyek strategis di wilayah Provinsi Sumsel dapat segera dituntaskan tepat waktu.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Elen Setiadi akan memberikan dorongan agar proyek strategis nasional di Sumsel segera dituntaskan.

"Beberapa proyek itu menjadi catatan kami termasuk bendungan tiga dihaji Kabupaten OKU Selatan, kita dorong diharapkan segera rampung termasuk proyek lainnya," ucapnya kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII, Feriyanto Pawenrusi dalam rangka menyampaikan proses kegiatan yang tengah berjalan serta mohon dukungan program di tahun anggaran 2025

Sementara itu, Kepala BBWSS VIII, Feriyanto Pawenrusi merinci saat ada sejumlah proyek strategis yang tengah menjadi pekerjaan rumahnya mulai dari bendungan tiga dihaji, proyek irigasi Komerang dan Irigasi Lematang. Untuk itu pihaknya meminta dukungan Pj Gubernur Elen Setiadi termasuk juga untuk program proyek tahun 2025 yaitu pembangunan Saka Gilas dan revitalisasi Danau Ranau.

Keyakinan yang sama disampaikan Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Pelaksana Komite Per-

cepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo yang mengungkapkan hampir semua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumsel berjalan on the track.

Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat Rapat Koordinasi Pembahasan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Griya Agung.

"Semuanya bisa dikatakan on track yah. Memang ada beberapa masalah yang harus kita tindaklanjuti di Jakarta. Tadi sudah kita perjelas dengan, Gubernur dan semua tadi sudah tahu dan



datang juga nanti masing-masing akan melaksanakan tugasnya. Dan hasilnya akan kita laporkan pada Menko,” ujar Wahyu.

Dalam waktu dekat menurut Wahyu, Menko akan melakukan rapat evaluasi membahas tentang progres PSN di seluruh provinsi salah satunya di Sumsel.

“Proyek-proyek ini hampir semuanya on the track kecuali ada satu yang terkait mundurnya Air Product. Sehingga ini harus kita cari bagaimana gantinya dari rencana pembangunan yang ada di Muara Enim,” jelas Wahyu.

Wahyu mengatakan ada tiga yakni sektor transportasi seperti jalan tol dan pelabuhan serta kereta api.

“Karena untuk logistik ya jadi penting semua karena itu untuk jalan tol akan kita upayakan percepatan,” tambahnya.

Wahyu Utomo juga mengatakan Rakor ini dalam rangka mengingat arahan Presiden RI yang menegaskan bahwa PSN yang sudah mulai tidak ada lagi yang mangkrak. Dimana Presiden meminta agar proyek-proyek ini harus diteliti betul agar permasalahan seperti pengadaan tanah, pembiayaan dan perizinan yang menjadi kriteria dasar perlu diperhatikan agar pelaksanaan PSN dapat terealisasi sesuai target

Dalam tahapan PSN biasanya ada beberapa proses yang dilewati mulai dari tahapan persiapan, tahapan transaksi, tahapan konstruksi dan selesai. Tahapan proyek-proyek di Sumsel ini menurut Wahyu perlu evaluasi untuk mengetahui mana saja proyek yang perlu mendapat perhatian bersama.

Provinsi Sumsel merupakan bagian dari rencana besar pemerintah. Dimana berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2024 saat ini ada 218 proyek dan 15 program yang tersebar di 14 sektor di Indonesia yang masing-masing memiliki besaran dan target dengan total nilainya Rp 6200 triliun.

Jika dilihat sebagian besar diharapkan agar proyek ini dapat dibiayai swasta. Baik swasta murni maupun melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Untuk di Sumsel jelas Wahyu terdata di KPIP bahwa ada 3 proyek yang sudah selesai dari 15 PSN di Sumsel.

Kemudian ada 4 proyek yang beroperasi sebagian dan 4 dalam tahapan konstruksi, serta 2 tahap transaksi dan 2 penyiapan.

“Kita akan bahas satu-satu proyek ini. Tentu kami menginginkan terutama yang masih dalam tahapan translasi dan penyiapan agar bisa didorong ke tahap konstruksi. Tapi konstruksi ini harus kita pastikan terkait perizinan, ketersediaan lahan dan komitmen

Untuk diketahui, Proyek Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati ini termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang diprioritaskan untuk mendukung mobilitas pengangkutan batubara di wilayah Provinsi Sumsel.

Elen Setiadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan mendukung penuh penyelesaian pembangunan Kereta Api Logistik



pembiayaan,” jelasnya.

Tinjau Pembangunan Pronas Kereta Api

Guna memastikan Pronas berjalan sesuai jalurnya Pj Gubernur Elen Setiadi bersama Direktur PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Rudi Ass Aturdida, meninjau pembangunan proyek strategis nasional Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati di Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang.

Lahat-Kertapati, mengingat proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional dalam mendukung pasokan energi nasional Jawa, Bali dan Sumatera.

Usai meninjau langsung dan mendapat informasi dari Direktur KAI dan dari PT Kereta Api Logistik (Kalog), Elen mengungkapkan memang dalam proses pembangunan terdapat kendala di lapangan, namun pihaknya akan menyelesaikan dan paling lambat akhir bulan ini sudah selesai. ●

MENDULANG APRESIASI LEWAT PROGRAM KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan pembangunan melalui program unggulan dan program prioritas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sukses mendulang prestasi dan apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya berhasil memborong dua penghargaan sekaligus dalam ajang CNN Indonesia Awards 2024. Kedua penganugerahan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, pada malam penganugerahan CNN Indonesia Awards 2024 dengan tema “Dari Bumi Sriwijaya, Merangkai Masa Depan Nusantara”.

Kedua penghargaan tersebut masing-masing dalam kategori Public Government Award, Pemprov Sumsel menerima anugerah Outstanding National Movement for Tourism & Development Creative Economy, kemudian untuk kategori Outstanding Leadership in Governance diberikan kepada Pj Gubernur Elen Setiadi.

Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Elen Setiadi mengaku bangga atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai jajaran Pemprov Sumsel. Dimana penghargaan yang telah didapat tersebut merupakan hasil kerjasama dari

semua pihak selama ini.

Keberhasilan Pemprov Sumsel dalam ajang CNN Awards 2024 ini sambung Elen, merupakan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumsel berkembang dengan baik. Berdasarkan laporan BPS untuk triwulan I tahun 2024 mencatat pertumbuhan

buhan ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,06% (yoy), yang merupakan yang tertinggi di Sumatera dengan kontribusi sebesar 13,58% terhadap pulau Sumatera.

“Sedangkan untuk inflasi, pada bulan Juni 2024 BPS mencatat di provinsi Sumatera Selatan terjadi deflasi (month to month) sebesar 0,03%, inflasi year on year sebesar 2,48% (lebih rendah dari nasional 2,51%) dan inflasi year to date sebesar 0,64%”, bebernya.

Elen menambahkan, CNN Indonesia Awards di Provinsi Sumatera Selatan menjadi penting bagi semua pihak atas kinerja dan dukungan yang sangat kuat dari para pemangku kepentingan dalam menunjukkan komitmen untuk membangun Sumatera Selatan.

“Kekompakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, badan usaha swasta serta para tokoh-tokoh nasional. Apresiasi juga saya sampaikan kepada bapak Chairul Tanjung dan CNN yang telah menyelenggarakan acara ini,” pungkasnya.

Selain Pemprov Sumsel sejumlah Kabupaten dan kota lainnya juga mendapatkan penghargaan diantaranya penghargaan Collaborative Community Service Excellence untuk Kabupaten Banyuasin, Leading Public Service Innovation untuk Kota Palembang, Best Disaster & Crisis Management diterima oleh Kabupaten Musi



Banyuasin, dan Best Promoted Local Brand untuk Kabupaten Lahat.

Malam penganugerahan CNN Indonesia Awards 2024 itu turut dihadiri sejumlah pejabat pusat yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Jaksa Agung RI St. Burhanudin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan CEO CT. Corp Chairul Tanjung.

Terima Penghargaan dari Kapolri

Apresiasi juga diberikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi yang diserahkan oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo kepada Pj Gubernur Elen Setiadi saat upacara dan syukuran Peringatan Hari Bhayangkara ke 78 di Halaman Mapolda Sumsel.

Penghargaan yang diterima Elen Setiadi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1020/VI/2024/ 26 Juni 2024 tentang pemberian penghargaan kepada Warga Negara Indonesia yang berpartisipasi dalam melaksanakan tugas Kepolisian yaitu berkontribusi terhadap penguatan kapasitas dan kapabilitas Polda Sumsel dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.

Pj Gubernur Elen Setiadi menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya kepada Polri yang telah menjalankan tugas dengan baik memberikan pengayoman dan kenyamanan pada masyarakat khususnya di Sumsel.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada jajaran Polda Sumsel atas dedikasinya dalam bertugas melayani masyarakat di Sumsel," kata Elen.

Dia mengharapkan, pada momen Peringatan Hari Bhayangkara ke 78 Tahun, Polri mampu meningkatkan rasa Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam mendukung pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di Provinsi Sumsel.

Selain itu Elen Setiadi juga mengajak seluruh stakeholder untuk kerjasama dan bersinergi dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ser-

entak pada bulan November 2024 mendatang.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh stakeholder, termasuk jajaran Polda Sumsel terus mempererat sinergitas dalam menyukseskan Pilkada serentak," tandasnya.



Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo mengucapkan terimakasih kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Instansi Vertikal yang telah mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian di Sumsel.

"Kepolisian Polda Sumsel telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tak lupa juga kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Forkopimda dan para undangan, para Instansi Vertikal yang selama ini telah mendukung pelaksanaan

tugas kepolisian. Mohon maaf jika dalam pelayanan kami ada kekurangan," kata Rachmad.

Rachmad Wibowo juga berharap diusia ke 78 Bhayangkara para aparat kepolisian semakin baik dalam melayani masyarakat.

"Di usia ke 78 ini kami akan berjanji tidak akan menyakiti hati masyarakat, dan kami upayakan para kepolisian di Sumsel bertugas dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sebagai aparat kepolisian kita harus bisa memprediksi permasalahan di masyarakat, responsif, transparan dan berkeadilan agar ketertiban di masyarakat bisa tetap terjaga. Kami mohon doa restu kepolisian daerah Sumsel menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," tandasnya. •

FOKUS JALANKAN PROGRAM UNGGULAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menjalankan berbagai program unggulan seperti penurunan inflasi, penurunan kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan dan kebencanaan. Dimana permasalahan tersebut telah ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait.

Konsistensi yang dijalankan tersebut membuat perkembangan Sumsel baik dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan yang cukup positif.

Terbukti hasil rilis BPS Tanggal 1 Juli 2024 jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumsel Bulan Maret 2023 berjumlah 1.100,083 orang (11,78%) dan mengalami penurunan menjadi 984,024 orang (10,97%) pada Maret 2024 dari

sangat erat dipengaruhi kondisi cuaca. Pada saat musim penghujan potensi bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang. Saat musim kemarau ancaman kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

"Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan bencana dengan menetapkan status Siaga dan Tanggap Darurat dan telah melakukan evakuasi, penyelamatan kepada warga yang terdampak. Bantuan berupa logistik, obat-

tahun ini berjalan lancar, tanpa ada kendala berarti. Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergi yang baik antara instansi terkait, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Kemenag Sumsel, Pengelola Asrama Haji Sumsel, TNI dan Polri, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Kemudian Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Palembang, Kantor Imigrasi Palembang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Saudi Arabi-



jumlah penduduk Sumsel 8,8 juta jiwa.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menerima kunjungan Pimpinan dan anggota komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam rangka pengawasan terhadap program keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana bertepatan di Griya Agung.

Dalam hal penanganan bencana, menurut dia, wilayah Provinsi Sumsel

obatan, peralatan penanggulangan banjir dan mendirikan dapur umum," tuturnya.

Kemudian terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, Elen mengungkapkan, tahun ini embarkasi/debarkasi Palembang memberangkatkan 8.467 jemaah haji dengan rincian 7.263 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.109 jemaah asal Bangka Belitung, dan 95 petugas kloter.

"Alhamdulillah, proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji embarkasi/debarkasi Palembang

an Airlines, Angkasa Pura II Palembang, hingga pihak DAMRI," ungkapnya.

Selanjutnya, pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki, yang diukur dari 3 (tiga komponen) kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG Sumsel Tahun 2023 sebesar 93,19 berada di atas angka nasional sebesar 91,85. Sumsel berada di peringkat 9 nasional.

Elen Setiadi menguraikan, Provinsi

Sumsel pada tahun 2023 mendapat Penghargaan Anugerah Parahita Eka-praya (APE) yaitu penghargaan yang diberikan oleh Presiden sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dengan kategori madya yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 pada kategori pratama.

Ia berharap kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR-RI agar memberikan dukungan serta partisipasi aktif sesuai tugas serta kewenangannya. Kiranya data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait, benar-benar dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pembangunan dimasa yang akan datang khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Daerah.

Sementara Ketua Tim Kunjungan sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang mengatakan, kunjungan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI Reses masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, menjadi kunjungan yang terakhir bagi komisi VIII DPR RI, sebelum 1 Oktober nanti yang akan dilakukan pelantikan kembali.

"Oleh karena itu kunjungan kali ini sangat strategis buat kedepan, maka kami menyampaikan berbagai hal yang kami hadapi, dan tantangan yang ada. Kunjungan kita melakukan reses, DPR RI sudah reses mengunjungi dapil, memastikan program berjalan dan pengawasan, berbagai hal tentu akan kita bicarakan di tempat kunjungan terkait dengan apa yang diputuskan di komisi masing-masing. Di komisi VIII persoalan sosial kita masih banyak hal yang didiskusikan terutama dalam hal penanganan masyarakat miskin," tandasnya.

Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah Serentak

Salah satu program unggulan itu yakni komitmen menekan lajunya in-

flasi diantaranya dengan launching Gerakan Tanaman cabai dan Bawang Merah sebagai komoditas komersial yang dipusatkan di Lahan Kelompok Tani Setia Makmur Jalan Gubernur H Asnawi Mangku Alam Kelurahan Kebun Bunga Palembang.

Gerakan Tanaman Cabai dan Bawang Merah serentak diikuti 17 kabupaten/kota se Sumsel tersebut di launching oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi

diaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

Edward menyebut produksi cabai tersebar di sejumlah daerah di Sumsel yakni tKabupaten Muara Enim, Kabupaten OKI dan Musi Rawas. Sedangkan untuk bawang merah dihasilkan oleh Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas.

"Beberapa upaya peningkatan produksi dilakukan diantaranya den-



Sumsel Edward Chandra mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Pj Gubernur Elen Setiadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh Sekda Edward Chandra mengatakan, cabai dan bawang merah merupakan penyumbang terbesar atas peningkatan inflasi di Provinsi Sumsel.

Pemprov Sumsel bertekad menjaga laju inflasi dibawah angka nasional dengan cara menjaga stabilitas harga, berpedoman pada 4K meliputi keterse-

gan perluasan areal pertanaman, pemanfaatan teknologi pengembangan produksi yang tepat guna, peningkatan jaringan pemasaran dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sebagai tenaga penggerak dan pemberi edukasi kepada petani cabai," ungkapnya.

Gerakan tanam serentak cabai dan bawang merah di 17 kabupaten/kota ini juga melibatkan berbagai pihak termasuk Bank Indonesia dan dunia perbankan lainnya. ●

DUTA AYAH DAN BUNDA ASUH ANAK STUNTING

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, bersama Pj Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel Melza Elen Setiadi dikukuhkan sebagai Duta Ayah dan Bunda Asuh Anak Stunting sekaligus Ayah dan Bunda Genre oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo pada rangkaian puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXXI tingkat Provinsi Sumsel tahun 2024 bertempat di Taman Olahraga Megang (TOM) Kota Lubuklinggau..

Kepala BKKBN RI Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo menilai partisipasi aktif dan komitmen Pj Gubernur dan Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel dalam mendukung program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting patut diapresiasi.

"Dengan mengucapkan Bismillahir-

rahmanirrahim, saya mengukuhkan Penjabat Gubernur Provinsi Sumsel dan Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel, sebagai duta Bapak dan Bunda Asuh anak stunting, karena partisipasi aktif mensukseskan program bangga kencana percepatan penurunan stunting," ucapnya.

Sementara itu Pj Gubernur Elen

Setiadi menegaskan pihaknya terus fokus memastikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bahkan pemerintah telah membangun sistem

"iBangga" atau Indeks Pembangunan Keluarga untuk mengukur tiga dimensi dalam keluarga, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan.



“Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata nilai iBangga sebesar 61,48 dan termasuk provinsi dengan nilai iBangga di atas nilai Nasional,” ungkapnya.

Elen Setiadi menegaskan, Provinsi Sumsel juga patut bangga karena pertumbuhan ekonomi di daerah ini berkembang dengan baik, dibuktikan dengan laporan BPS untuk triwulan I tahun 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,06% (yoy), ini merupakan tertinggi di Sumatera dengan kontribusi sebesar 13,58% terhadap pulau Sumatera.

“Begitu pula dengan persentase penduduk miskin, pada Maret 2024 sebesar 10,97 persen, menurun 0,81 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret



Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata nilai iBangga sebesar 61,48 dan termasuk provinsi dengan nilai iBangga di atas nilai Nasional.

2024 sebesar 984,24 ribu orang, turun 61,4 ribu orang terhadap Maret 2023,” tambahnya

Elen mengakui, dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas tidak lepas dari kerjasama dengan instansi dan lintas sektor, terkait serta komitmen yang tinggi antar pemerintah dan masyarakat.

“Kami selalu siap mendukung Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Kami tahu bahwa program ini sangat bermanfaat,” tegasnya.

“Semoga keluarga di Provinsi Sumatera Selatan bersatu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Tuhan Yang Maha Esa. Majulah Keluarga Indonesia. Majulah Keluarga Sumatera Selatan,” tambahnya. •



RAIH APRESIASI PSN KATEGORI PROVINSI

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menerima Apresiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) kategori provinsi yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto.

Penghargaan tersebut diterimanya saat menghadiri Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kita sudah melakukan beberapa eskalasi percepatan pembangunan yang ada di provinsi Sumsel seperti jalan tol, pelabuhan, stasiun dan lainnya," ujar Elen Setiadi se usai menerima penghargaan.

Adapun Geoportal Satu Peta 2.0 merupakan sebuah peta canggih yang memuat berbagai data geospasial di seluruh Indonesia dan dapat diakses oleh publik.

Pemerintah resmi meluncurkan peta canggih yang komprehensif dan detail melalui Kebijakan Satu Peta atau One

Map Policy. Kebijakan ini diluncurkan untuk mengintegrasikan data geospasial yang selama ini terpencar di beberapa kementerian dan lembaga.

Peta canggih itu bisa diakses masyarakat secara umum untuk mencari data wilayah secara terperinci melalui Geoportal KSP 2.0

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan satu peta itu akan mampu membantu Indonesia menyerap target investasi.

Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai kebijakan one map policy akan menciptakan efisiensi dan tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat.

Peluncuran dan penyampaian hasil PSN serta KEK ini dihadiri oleh Menteri



KLHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolkam Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Kebijakan Satu Peta 2024

Sebelumnya, Elen Setiadi menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) One Map Policy Summit 2024 atau Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan Kemko Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pelaksanaan kegiatan satu peta ini sudah berjalan selama 8 tahun dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres 9 tahun 2016, kemudian diperbaharui dengan Perpres 23 tahun 2021.

Menurut Airlangga kebijakan satu peta ini mencakup 4 tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh BIG. Kemudian,



sinkronisasi yang dilakukan Kementerian Perekonomian serta berbagai data dan informasi geospasial yang dikoordinasikan juga oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Kebijakan satu peta ini telah menyelesaikan dari 151 peta tematik dari 23

Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi," jelas Airlangga.

Ada beberapa produk kebijakan satu peta saat ini sudah dimanfaatkan secara luas oleh K/L dan Pemerintah daerah, seperti untuk perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.

Menko Airlangga Hartarto juga berharap, Rakernas ini dapat merumuskan strategi pencapaian target, kebijakan satu peta, perkembangan implementasi, dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta arah kebijakan dalam implementasi kebijakan satu peta setelah 2024. ●



2 ANUGERAH UNTUK KALTARA BERKAT INOVASI DAN TRANSFORMASI

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, menerima penghargaan anugerah merdeka belajar kategori Transformasi Pengelolaan Pendidikan Kelompok Pemda Transformatif (Provinsi).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (5/7).

Anugerah tersebut merupakan kali kedua yang diterima oleh Kaltara setelah pada 2023 juga mendapat penghar-

Kami kepada pemda yang mengupayakan perwujudan sekolah yang kita cita-citakan melalui transformasi sistem pendidikan, sekolah yang sistem pembelajarannya berpusat pada murid, bukan berpusat pada birokrasi atau administrasi," ucap Nadiem.

Keberhasilan transformasi sistem pendidikan tersebut bukan merupakan atas usaha Kementerian, melainkan atas usaha bersama, baik dari pemda, kepala sekolah, guru penggerak hingga orang

tersebut.

"Semoga ke depan pendidikan di Kaltara semakin baik untuk menciptakan pelajar yang berkarakter sesuai cita-cita program merdeka belajar," terang Zainal.

Inovasi Teknologi Tepat Guna

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, juga menerima piagam dan Lencana Abdi Inovasi Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes



gaan penghargaan dalam subkategori di bidang transformasi pendidikan vokasi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo, yang juga disaksikan oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem menyampaikan selamat atas penghargaan kepala daerah yang telah berusaha dengan berbagai upaya membela hak belajar di daerah dan meneruskan spirit merdeka belajar.

"Anugerah ini merupakan apresiasi

tua murid yang aktif membela merdeka belajar.

"Kini saya sampaikan bahwa gerakan merdeka belajar merupakan milik bapak ibu semua. Besar harapan saya agar anugerah merdeka belajar ini menjadi pengingat bahwa transformasi pendidikan kita baru saja dimulai, demi terwujudnya para pelajar pancasila yang cerdas berkarakter," ungkap Nadiem.

Gubernur Zainal Paliwang turut bangga dan mengapresiasi seluruh elemen pendidikan yang berupaya melaksanakan program merdeka belajar di Kaltara hingga mendapatkan penghargaan

PDTT).

Piagam dan lencana ini disematkan oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, kepada Zainal Paliwang pada Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara XXV di Lapangan Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin, 15 Juli 2024.

"Alhamdulillah karena Bapak Gubernur Kalimantan Utara juga mendapatkan Piagam Penghargaan dan Lencana Abdi Desa karena kontribusi dan kerja kerasnya membina inovasi desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara, Edy Suharto.

Edy mengungkapkan piagam penghargaan ini diperoleh atas upaya dan kerja keras gubernur dalam membina dan memberikan motivasi dalam pengembangan inovasi teknologi tepat guna (TTG) di Kaltara.

Ia bersyukur dalam setiap tahunnya Kaltara selalu mendapatkan juara dan pada tahun ini mendapat dua juara, yaitu Juara 1 Posyantek Berprestasi dan Juara 2 Inovasi TTG Unggulan.

"Kami dari Dinas PMD Kaltara setiap tahunnya mendorong dan membina inovator TTG di 447 desa dan 35 kelurahan di Kaltara, untuk selalu mencari dan menciptakan inovasi yang membantu masyarakat desa dalam berbagai hal seperti pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, industri rumah tangga dan sebagainya," jelasnya.

"Setiap tahunnya kita adakan Lomba dan para pemenang juara 1 kita akan ikutkan lomba inovasi TTG dan Posyantek Tingkat Nasional," katanya.

Sebelumnya, Kaltara memboyong 2 penghargaan dalam ajang bergengsi Gelar TTG Nusantara XXV Tahun 2024.

Edy menyebutkan peserta Lomba TTG dan Posyantek dari Kaltara yang selama ini dibina dan difasilitasi langsung oleh Gubernur Kaltara melalui Dinas PMD Kaltara, ini sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional.

"Juara 1 tingkat nasional kategori Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek TTG) diraih oleh Posy-

antek Karya Mandiri dari Desa Sempayang, Kabupaten Malinau, di ketuai Joser Febrianto dan pembinanya Kepala Desa Sempayang Bapak Aprem," ujarnya

"Pada juara 2 tingkat nasional kategori TTG Unggulan diraih oleh Tim IoT Energy Tarakan yang diketuai oleh Ferdianto dan kawan-kawan, inovasinya berupa Alat Pendeteksi Kebocoran Pipa Gas Sambungan Rumah, tim ini mendapat-

untuk juara 1 sebesar Rp25 Juta, juara 2 Rp15 juta serta fasilitas transportasi tiket pesawat, hotel dan akomodasi selama di Lombok dari Kementerian Desa PDTT.

Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah. Gubernur Kaltara secara langsung menyerahkan piagam, piala, Rp10 juta, biaya perjalanan dan akomodasi kepada para pemenang juara 1 tingkat provinsi untuk mewakili



kan pendampingan dari PT Pertamina EP Tarakan," sambungnya.

Ia menuturkan para pemenang selain mendapatkan piagam dan piala juga mendapatkan uang pembinaan,

lomba TTG tingkat nasional pada acara Rembuk Desa di Tarakan, 4 Juli 2024.

Edy menambahkan, dalam ajang TTG Nusantara ini ada berbagai kegiatan seperti seminar internasional, temu bisnis, rapat kerja teknis dan stand pameran TTG. Khusus untuk stand pameran alat-alat TTG dilombakan, Dinas PMD Kaltara turut serta membuka 1 stand pameran.

"Kami berharap stand pameran Dinas PMD Kaltara juga bisa mendapatkan juara, jika stand kita mendapatkan juara, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan mendapatkan Juara Umum," tuntasnya. ●



KALTIM PALING RAWAN DI PILKADA AKMAL: JAGA KEDAMAIAN

Tiga daerah di Kalimantan Timur memiliki tensi kerawanan tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam IKP 2024, Kaltim berada di posisi lima daerah berkategori rawan tinggi dengan skor 77,04, di bawah Jawa Barat (77,04), Maluku Utara (84,86), Sulawesi Utara (87,48), dan DKI Jakarta (88,95).

Potensi kerawanan tinggi di Benua Etam pada Pilkada 2024 itu juga mendapatkan perhatian besar dari Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

"Kita waspada di Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara, karena semakin banyak jumlah pemilihnya, pergerakan massa akan semakin besar. Tapi bukan berarti Mahulu tidak rawan. Rawan juga, misal karena pergerakan distribusi logistik dan bencana," kata Akmal Malik, Sabtu, 13 Juli 2024.

Terkait Kaltim yang berada pada peringkat kelima dalam hal kerawa-

nan Pilkada 2024, kata Akmal, simulasi kepolisian dalam sistem pengamanan dalam kota (Sispamkota) untuk pengamanan sangat baik guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat tahapan Pilkada.

Kegiatan simulasi pengamanan Pilkada 2024 diinisiasi oleh Polda Kaltim yang dilaksanakan di bekas Bandara Temindung Samarinda dengan melibatkan para personel TNI/Polri dan stakeholder lainnya.

Kegiatan simulasi tersebut menggambarkan ratusan pendukung calon kepala daerah berunjuk rasa di eks Bandara Temindung. Mereka kecewa dan protes atas hasil Pilkada 2024.

Langkah preventif segera dilakukan, negosiasi pun ditawarkan, tetapi aksi mereka semakin brutal karena ulah beberapa provokator.

Aksi kian menegangkan karena ada penyusup yang datang dan meledakkan bom. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI sudah terlatih bergerak cepat dan sigap melakukan langkah-langkah pengamanan secara tegas dan terukur. Akhirnya, dalam waktu segera kondisi kembali bisa diamankan dan masyarakat bisa kembali tenang.

Menurut Akmal, deteksi tingkat kerawanan tinggi ini cukup baik, sehingga Kaltim bisa terus meningkatkan kekompakan seluruh komponen terkait untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar dan sukses. Dia mengatakan beberapa waktu ke depan pihaknya akan terus bersinergi dengan Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kejaksaan Tinggi dan lainnya untuk memastikan Pilkada Serentak di Kaltim terselenggara dengan sukses tanpa hambatan

berarti.

Dia menambahkan, meskipun simulasi kali ini dilakukan di Samarinda sebagai ibu kota provinsi, namun kesiapsiagaan akan tetap dilakukan di seluruh wilayah Kaltim.

Sebelumnya, Akmal yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengapresiasi pelaksanaan Pemilu Serentak yang dinilai sangat kondusif. Kondisi yang sama diharapkan terjadi saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

Meski begitu, Akmal tak menampik sejumlah kerawanan yang berpotensi mewarnai Pilkada di Kaltim. Ia pun mengingatkan seluruh pihak dapat menjaga kerukunan hidup bermasyarakat kendati berbeda pilihan di Pesta Demokrasi.

"Harusnya jauh lebih mudah karena TPS tidak sebanyak Pemilu lalu. Tetapi potensi konflik bisa saja lebih tinggi karena kedekatan pasangan calon dengan pemilih cenderung lebih dekat. Tetapi harapannya kita semua bisa menjaga kedamaian selama Pilkada," katanya, Jumat, 5 Juli 2024.

Salah satu yang dinilainya mampu meminimalkan kerawanan Pilkada dari sisi teknis penyelenggaraan ialah adanya kebijakan KPU untuk mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Khusus pada Pilkada 2024 di Kaltim, TPS berkurang dari sebelumnya berjumlah 11.441 TPS pada saat Pileg dan Pilpres, kini menjadi 6.229 TPS pada Pilkada 2024.

Selain itu, masyarakat juga hanya akan mencoblos dua surat suara, yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih bupati maupun wali kota beserta wakilnya.

Sementara, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto, menjelaskan, simulasi pengamanan Pilkada 2024 dilakukan mulai masa kampanye hingga pascapilkada.

Dia optimistis dengan kekompakan TNI/Polri dan seluruh stakeholder terkait serta dukungan masyarakat, pelaksanaan Pilkada 2024 di Kaltim bisa berlangsung sukses dan lancar.

Di sisi lain, Bawaslu Kaltim mewaspadaai sejumlah gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Benua Etam. Politik uang hingga polar-

isasi massa jadi sorotan yang perlu dimitigasi para pengawas.

"Kerawanan tinggi di Pilkada Kaltim merata di semua dimensi kepemiluan, dari hulu ke hilir," ucap Komisioner Bawaslu Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Galeb Akbar Tanjung.

Galeb merinci, kerawanan pemilu di Kaltim berpotensi terjadi di semua lini tahapan pemilu. Dari pemutakhiran data pemilih, pendistribusian logistik, pencalonan, kampanye, hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara.

itu tak lepas dari belum ditetapkannya hasil Pileg untuk DPR imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk menghitung ulang surat suara di 147 TPS se-Kaltim. Hadirnya IKN juga jadi salah satu indikator kerawanan pemilu.

"Pada pileg lalu, di IKN hanya ada tiga TPS khusus, sehingga ada potensi pemilih yang kehilangan haknya. Apalagi dalam waktu dekat akan ada eksodus pekerja lagi ke sana," katanya.

Singkatnya, jarak antara Pileg dan Pilkada juga jadi pertimbangan Bawaslu untuk



Bawaslu Kaltim pun sudah memetakan kategori kerawanan per kabupaten/kota se-Kaltim.

"Kukar dan Kubar kategorinya rawan tinggi, delapan kabupaten/kota lainnya sedang," sambungnya.

Tingginya angka kerawanan pemilu

merekomendasikan ke KPU agar tak melakukan kesalahan berulang serta memastikan jaminan pemilih dapat menggunakan haknya dengan fasilitas yang ideal.

"Bawaslu pun membuat posko kawal hak pilih sebagai upaya pencegahan," ucapnya. ●



Kartika Sandra Desi NAKHODAI PARTAI GERINDRA, SUKSES HANTARKAN PRABOWO- GIBRAN MENANG DI SUMSEL

Ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kartika Sandra Desi menjadi perempuan pertama yang menakhodai DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel).



Karir politik wanita kelahiran Bayung Lencir, Musi Banyuasin, 26 September 1978 ini cukup mentereng, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Sebelumnya wanita yang akrab disapa Cici ini sudah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel periode 2014-2019 menggantikan H Nopran Marjani SPd yang maju di Pilkada di Kabupaten Lahat.

Cici juga dua kali terpilih sebagai Anggota DPRD Sumsel dari Dapil Musi Banyuasin.

Cici sendiri meru-

pakan Alumni Universitas Syakyakirti yang pernah menjabat sebagai komisaris PT Bintang Raksa Karsyatanzia pada 2011-2014, sosoknya yang sederhana ditantang untuk membesarkan partai berlambang kepala Burung Garuda itu.

Namun, Cici tidak sendiri, dirinya dibantu sedikitnya 50 pengurus dalam memimpin partainya, seperti Sekretaris Sujarwoto dan Bendahara Prima Salam sesama koleganya di DPRD Sumsel.

Setelah dilantik, istri dari H Syahril ini resmi mendampingi Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel sejak Rabu 3 Desember.





ber 2019. Terpilihnya Kartika Sandra Desi (KSD) sebagai Ketua DPD merupakan rekomendasi langsung dari DPP Partai Gerindra.

Setelah resmi memimpin Partai Gerindra Sumsel, ibu dua anak yang pernah menjabat sebagai direktur CV Raksa pada periode 2003-2014 ini mengatakan jika Gerindra adalah partai besar yang harus selalu mendukung semua aspirasi rakyat.

KSD berhasil menyelesaikan ujian Tesis Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Tidak hanya sukses di dunia politik, Cici juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Terbukti, dirinya pernah menjadi bendahara PMI Musi Banyuasin, Wakil Ketua Gapeksindo Banyuasin, Wakil Ketua KNPI Musi Banyuasin hingga menjadi Ketua DPC Gerindra Musi Banyuasin.

KSD juga sempat menjadi Komisaris

PT Bintang Raksa Karsyatanzia pada 2011-2014, Direktur CV Raksa 2003-2014 dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018.

Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel ternyata pernah nyaleg untuk DPRD Sumsel tahun 2009. Waktu itu sempat nyalon nomor urut 4 dan dengan perolehan suara peringkat kedua di Gerindra.

Namun masih belum terpilih.

"Aku dulu sudah pernah nyaleg untuk DPRD Sumsel tahun 2009. Waktu itu sempat nyalon nomor urut 4 dan dengan perolehan suara peringkat kedua di Gerindra,"katanya, mengutip dari berbagai sumber berita online Sumsel.

Meski belum terpilih waktu itu tidak membuatnya kapok untuk kembali





tampil dalam kontestasi Pileg DPRD Sumsel.

KSD mengaku motivasinya tetap bertahan berjuang di partai karena ingin mewujudkan cita-citanya.

"Saya akan memperjuangkan tempat kami di Muba yang banyak masalah lahan dan memperjuangkan pemekaran kabupaten (Muba Timur)," tutur Cici yang sempat menjabat Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Muba.

Menurutnya, banyak masalah lahan tidak selesai. Banyak penggusuran PT-PT. Lahan yang ditempati warga kebanyakan Hutan Kawasan.

"Harapan kita dibebaskan, biar warga bisa memanfaatkannya dan memiliki kejelasan hukum untuk tempat tinggal. Jangan sudah bertahun-tahun, digusur," sambungnya.

"Saya tertarik bisa terjun di komisi yang memperjuangkan itu," kata Cici.

Wanita berhijab ini mengaku setelah dilantik dirinya fokus di dewan, meski tetap melakukan aktivitas biasa.

"Untuk usaha tetap seperti biasa, ditinggalkan tuh idak. Paling memantau. Kita fokus ke dewan memperjuangkan aspirasi konstituen," sambungnya, waktu itu.

Pada 2023 KSD sempat diberitakan bahwa menjadi salah satu dari pimpinan DPRD Sumsel yang diketahui tidak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, isu itu dibantah oleh KSP yang menyebut bahwa dirinya secara rutin melaporkan harta kekayaan kepada KPK RI.

"Saya melapor terus setiap tahun, ada buktinya. Silakan cek saja," katanya.

KSP mengaku sebagai warga negara yang baik dirinya dari awal periode 2014 secara rutin melaporkan jumlah harta kekayaan kepada KPK RI.

"Tidak pernah telat dan ada buktinya kok kiriman balik dari KPK bahwa sudah diterima," tegasnya.

Isu tersebut akhirnya tidak terbukti dan data LHKPN milik KSD bisa diakses melalui laman LHKPN KPK RI.

Karir politik KSD semakin maju setelah berhasil meraih suara tertinggi di dapil Sumsel 1 partai Gerindra yang meliputi wilayah, Palembang, Banyuasin, Muba, Lubuklinggau, Muratara dan Musi Rawas.

Dalam perolehan suara yang sangat signifikan, Cici berhasil mengungguli petahana, Ir H Eddy Santana Putra dengan selisih yang mencolok.

Berdasarkan data resmi realcount Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Februari 2024, Cici berhasil mengumpulkan dukungan sebanyak 38.752, disusul dua petahana Siti Nurizka Puteri Jaya raih 17.510 suara dan Eddy Santana Putra memperoleh 13.293 suara.

Dalam keterangannya, Cici menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel yang telah memberikan kepercayaan besar terhadap Pak Prabowo dan partai Gerindra.

"Posisi ini tidak hanya milik saya pribadi, tetapi juga milik seluruh rakyat Sumatera Selatan yang telah bersatu dalam mendukung perubahan yang lebih baik," kata Cici singkat.

Dengan hasil yang mengejutkan ini, masyarakat Sumsel kini menantikan DPR RI yang baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah Sumsel khususnya Sumsel 1.

Cici yang kini telah menjadi tokoh sentral dalam politik Sumsel, diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan daerah ini.

"Terima Kasih untuk seluruh masyarakat Sumsel, yang memberikan kepercayaannya terhadap pak Prabowo dan Partai Gerindra Sumsel," kata Cici.

Ia juga mengatakan, dengan amanah yang di emban semoga bisa bermanfaat

kepada warga Sumsel.

"Bismillah semoga Allah meridhoi, dengan amanah yang diemban, semoga bisa bermanfaat terutama untuk

anto-Gibran Rakabuming Raka menang telak di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari data hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Prabowo-Gibran meraih



masyarakat Sumsel," tuturnya.

Dibawah kepemimpinan dirinya berhasil menghantarkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subi-

suara 3.649.651. Disusul di posisi kedua oleh pasangan Anies-Cak Imin yang memperoleh suara 997.299 dan Ganjar-Mahfud 606.681 suara. • IRY

BIODATA

Nama : Hj Kartika Sandra Desi
Tempat Tanggal Lahir : Bayung Lencir, Musi Banyuasin, 26 September 1978
Suami : H Syahril
Anak : 2
Partai : Partai Gerindra
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Sumsel

PENDIDIKAN

- SMA Negeri 8 Palembang
- S1 Ilmu Hukum Universitas Sjakhyakirti
- S2 Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang

KARIER

- Komisariss PT Bintang Raksa Karsyatanzia (2011 - 2014)

- Direktur CV Raksa (2003 - 2014)
- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (2014 - 2018)
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (2018 - Sekarang)
- Anggota Terpilih DPR RI Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan

ORGANISASI

- Bendahara PMI Musi Banyuasin
- Wakil Ketua Gapeksindo Banyuasin
- Wakil Ketua KNPI Musi Banyuasin
- Ketua DPC Gerindra Musi Banyuasin
- Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan

Elman LANJUTKAN PROGRAM RIDHO YAHYA, WUJUDKAN PRABUMULIH PRIMA

Setelah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H Elman ST MM resmi dilantik menjadi Pj Wali Kota Prabumulih menggantikan posisi Ridho Yahya yang telah habis masa jabatan pada 18 September 2023.

Dikutip dari laman resmi kotaprabumulih.go.id menyebutkan bahwa H Elman menjabat Sekda Kota Prabumulih pada 10 Juni 2019.

Penunjukkan ayah dua anak ini sebagai Sekda Kota Prabumulih menggantikan Drs H Asmuni Hambali, setelah lolos mengikuti berbagai proses seleksi pencalonan Sekda Kota Prabumulih.

Sebelumnya, Elman merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih. Dirinya bersaing dengan Sembilan orang lainnya dalam mengikuti lelang jabatan Sekda Kota Prabumulih.

Sejumlah nama tersebut seperti Hj Suryati

Ngesti Rahayu, Ir Pribadi, Drs Syamsurizal SP, Yusuf Arni, Heriyani SE MSi, Martodi HS MM, Drs Muhammad Ali dan Drs Aris Apriadi.

Namun tim panitia seleksi jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPTP) hanya meloloskan lima nama. Lantaran kelima nama tersebut memenuhi syarat dan kriteria pencalonan.

Kelima nama tersebut antara lain Elman, Heriyani, Martodi, Muhammad Ali dan

Aris Pariadi. Kemudian kelima nama tersebut wajib mengikuti penilaian kompetensi manajerial (Assesment) di Puslitbang PKASN LAN RI Jatinangor.

Hingga akhirnya nama Elman lah yang berhasil lolos memenangkan lelang jabatan Sekda Kota Prabumulih.

Elman kecil memulai pendidikan di SD Pertamina 1 lulus tahun 1980, SMP Yakta Pena IV lulus tahun 1983, lalu STM Teknik Mesin Yakta Pena Pertamina UEP 2 lulus tahun 1986.

Pria yang juga lulusan S1 Universitas Tridinanti jurusan Teknik Mesin lulus tahun 1993 ini dinilai layak menjadi PJ Wali Kota Prabumulih karena dianggap lebih paham dengan program yang telah dijalankan oleh Ridho Yahya.

Dengan slogan Prabumulih PRIMA (Prestrasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman), Elma akan melanjutkan program yang telah sukses dibuat oleh Wali Kota Prabumulih sebelumnya yakni Ridho Yahya.

Sedikitnya ada 12 program yang sudah dirasakan masyarakat Prabumulih, seperti Program Jargaskot, Rehabilitasi Rumah Ibadah, Penolakan Tambang Batubara, Shalat dan BTA, Layanan Subuh, Pemberian Insentif Masyarakat Berkontribusi Bagi Prabumulih, Program Pengentasan Kemiskinan melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Elman merupakan pria kelahiran Prabumulih 25 Juni 1967 dengan istri



bernama Windriana dan dua anak yakni Okta Jaya Widasta dan Gusti Jaya Prabu.

Tidak hanya sukses meniti karier, Elman juga memiliki latar belakang pendidikan yang mempunya. Gelar magisternya diperoleh dari Universitas Tridianti jurusan Manajemen lulus tahun 2005.

Anak pasangan almarhum Desamin dan almarhumah Rosina ini sudah dua kali mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Yakni Satya Lencana Karya Lencana X dan Satya Lencana Karya Lencana XX.



Elman juga pernah menjabat Kasi Teknik PDAM Tirta Prabujaya tahun 1996. Kepala Cabang PDAM Tirta Prabujaya tahun 1999 dan menjadi Direktur PDAM Tirta Prabujaya tahun 2002.

Kemudian, Kabid PSTR Bappeda tahun 2008, Sekretaris Bappeda Prabumulih dan Plt Kepala Bappeda Prabumulih pada tahun 2012-2013. Dilanjutkan menjadi Kepala Bappeda Pemkot Prabumulih sejak 2014 hingga 2019. Anak ketiga dari lima bersaudara ini memiliki pangkat Pembina Utama Madya dengan golongan ruang IVd. • RY



BIODATA

Nama : H Elman ST MM
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih 25 Juni 1967
Istri : Windriana
Anak : 2
Okta Jaya Widasta
Gusti Jaya Prabu

JABATAN

- Pj Wali Kota Prabumulih

PENDIDIKAN

- SD Pertamina 1 lulus tahun 1980
- SMP Yakta Pena IV lulusan tahun 1983
- STM Teknik Mesin Yakta Pena Pertamina UEP 2 lulus tahun 1986
- Strata 1 (S1) Universitas Tridianti jurusan Teknik Mesin lulus tahun 1993
- Strata 2 (S2) Universitas Tridianti ilmu Manajemen lulus tahun 2005.

KARIER/ JABATAN PNS

- Kasi Teknik PDAM Tirta Prabujaya tahun 1996
- Kepala Cabang PDAM Tirta Prabujaya tahun 1999
- Direktur PDAM Tirta Prabujaya tahun 2002
- Kabid PSTR Bappeda tahun 2008
- Sekretaris Bappeda Prabumulih dan Plt Kepala Bappeda Prabumulih pada tahun 2012-2013
- Kepala Bappeda Pemkot Prabumulih sejak 2014 hingga 2019
- Sekda Pemkot Prabumulih Mei 2019
- Pj Wali Kota Prabumulih 2023.

PENGHARGAAN

- Satya Lencana Karya Lencana X (Dari Presiden RI)
- Satya Lencana Karya Lencana XX (Dari Presiden RI)

ORGANISASI

- KNPI Kota Prabumulih

PANGKAT

- Pembina Utama Madya dengan golongan ruang IVd.

Muhammad Farid

ASLI “JEME” LAHAT, KERJA KOLABORATIF, BERFAEDAH DAN BERMARTABAT

Dalam waktu yang cukup singkat, kerja cepat dan kerja cerdas yang diterapkan Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lahat, mulai membuahakan hasil.

Pola kerja yang menerapkan sistem kolaboratif dengan mengusung slogan berfaedah bermartabat itu, satu persatu mulai kelihatan hasilnya.

Hasil kerja cepat dan cerdas itu dibuktikan dengan mengalirnya penghargaan dari berbagai program kegiatan pemerintah pusat untuk Kabupaten Lahat. Membuktikan bahwa Kabupaten Lahat siap bersaing dan bertengger di kanca nasional juga internasional.

Sosok Muhammad Farid mempunyai tangan dingin memimpin Kabupaten Lahat sejak 9 Desember 2023, menggantikan Bupati Lahat, H Cik Ujang SH dimasa menunggu Pilkada serentak November 2024.

Dilahirkan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 25 Oktober 1980, Muhammad Farid merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Agung Mazani dan Yetty Ferial.

Muhammad Farid, kecil dididik dan dibesarkan di lingkungan militer, lantaran kakeknya merupakan seorang pejuang veteran wilayah Kabupaten Lahat dan mantan Ketua Veteran Sumsel, yakni Kol (Purn) H M Nurdin Lenggang, yang berasal dari Desa Kebun Jati, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Sementara kedua orang tuanya, berlatar belakang dari keluarga pamong.

Sejak di bangku SD hingga SMA, Muhammad Farid selalu menjadi bintang di sekolahnya, serta aktif dalam kegi-

katan organisasi. Menjadi ketua kelas, ketua paskibra hingga kapten tim basket. Menunjukkan jiwa kepemimpinan Muhammad Farid sudah dimilikinya sejak di bangku sekolah.

Saat di bangku SMA, Muhammad Farid bahkan sudah mengajar di Gloria English Course di Kota Palembang. Lulus SMA

pada tahun 1999, ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) jalur UMPTN, selang waktu satu bulan Muhammad

Farid rupanya

juga diterima di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (ST-

PDN)

Jatinangor.

Di saat itu, ia harus mengambil salah satu keputusan untuk melanjutkan ke-

mana, dan memutuskan untuk melanjutkan ke STPDN.

Di STPDN, sosok Muhammad Farid rupanya juga terus bersinar. Bukan hanya cerdas dalam dunia akademis, sosok yang kini sangat agamis ini juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler, baik di Korps Praja sebagai

Wakil Gubernur Praja STPDN, Polisi Praja (Polpra), Pasukan Tanda Kehormatan (Pataka), Pasukan inti (Pasti), Gita Abdi Praja (Drum Band Korps), Ketua Gelar Kreativitas Muda Praja (GK-MDP), Ketua Bhakti Karya Praja (BKP) dan Ketua Kontingen Sumsel.

Tahun 2003, Muhammad Farid lulus dari ST-



PDN, dan pertama kali ditempatkan menjadi staf di Pemkot Palembang. Setahun kemudian, Muhammad Farid langsung diberi kepercayaan menjabat sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Sei Pangeran, Kota Palembang.

Tahun 2007-2008, Muhammad Farid melanjutkan S2 dan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dari Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) IPDN Jatinangor.

Muhammad Farid juga ikut seleksi kompetensi Kementerian Dalam Negeri dan dipercaya menjadi Pamong Pengasuh IPDN Jatinangor. Setelah selesai pendidikannya, kembali lagi mengabdikan sebagai Pegawai Kota Palembang.

Muhammad Farid diberi kepercayaan kembali menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu II, Pemerintah Kota Palembang. Tahun 2011 ia mendapat mutasi/rolling jabatan sebagai Lurah 14 Ulu, Pemerintah Kota Palembang.

Dalam masa tugasnya, wajah Kelurahan 14 Ulu lebih tertata menjadi rapih, bersih serta nyaman dan warganya menjadi saling guyub, gotong royong satu sama lain. Muhammad Farid betul nyata mengimplementasikan pengalamannya dalam memberi pelayanan dan turun langsung dengan masyarakat.

Tahun 2012, Muhammad Farid pindah tugas ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI. Diberi kepercayaan dan dipromosikan menjabat sebagai Es 4 di BNPP RI hingga

tahun 2018.

Enam tahun menjabat sebagai Es 4 di BNPP, Muhammad Farid dipromosikan menjabat Es 3 sebagai Kepala Bidang (Kabid) Fasilitas Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Perbatasan Negara, BNPP RI.

Muhammad Farid kembali dimutasi ke Kementerian Dalam Negeri, men-

Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil.

Pada 2022, saat dibuka open rekrutmen (seleksi terbuka) untuk beberapa Jabatan Tinggi Pratama (eselon 2) di lingkungan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kemendagri, Muhammad Farid ikut mendaftar



jabat sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil selama satu tahun.

Muhammad Farid kemudian dipercaya sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengamanan Sistem Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil. Dirolling kembali menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Madya

sebagai calon Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP.

Muhammad Farid akhirnya menduduki peringkat tiga besar terbaik. Pada 19 Juli 2022, Muhammad Farid akhirnya dilantik sebagai Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP.

4 Agustus 2023, Muhammad Farid dimutasi ke Kementerian Dalam Negeri, menjabat sebagai Direktur Integrasi Data Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil sampai dengan sekarang. ●

BIODATA

NAMA : Muhammad Farid
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Palembang, 25 Oktober 1980
ISTRI : Adhitya Trinia Apriliani
ANAK : Muhammad Qiandra Farid Putra

PENDIDIKAN

- S1 STPDN
- MAPD IPDN

KARIER

- Staf di Pemkot Palembang
- Sekretaris Lurah Kelurahan Sei Pangeran Palembang
- Kasi Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu II Palembang
- Lurah 14 Ulu Palembang
- BNPP RI
- Kabid Fasilitas Pelaksanaan Monitoring Evaluasi In-

frastruktur Ekonomi dan Kesra Perbatasan Negara, BNPP RI

- Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil
- Kasubdit Pengamanan Sistem Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil
- Pranata Komputer Ahli Madya Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Dukcapil
- Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP
- Direktur Integrasi Data Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil
- Pj Bupati Lahat

Ucok Abdul Rauf Damenta

UTAMAKAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PALEMBANG

Dr Ucok Abdul Rauf Damenta Mag rer Pulp resmi menjabat sebagai Pj Wali Kota Palembang menggantikan H Ratu Dewa pada 19 Juni 2024 yang dilantik oleh Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni.

Kehadiran Ucok Abdul Rauf berarti menambah kekuatan baru untuk Kota Palembang, setelah Ratu Dewa mengundurkan diri.

"Ada energi baru, Pak Ucok sebagai Pj Wali Kota yang baru, didampingi Ratu Dewa sebagai Pj Sekda. Mudah-mudahan duet maut ini dapat memajukan pembangunan di Kota Palembang," kata Agus Fatoni.

Ucok Abdul Rauf Damenta merupakan seorang berdarah Batak dan lahir di Solo pada 30 Desember 1966.

"Saya asli Batak, lahir di Solo, tetapi kini merantau di Palembang," ungkap Ucok kepada Infosumsel.id beberapa waktu lalu.

Merangkum dalam berbagai sumber dan wawancara langsung Ucok Abdul Rauf sebelumnya merupakan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dilantik dan juga Direktur Jenderal Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri.

Ternyata, Ucok Abdul Rauf memiliki banyak pengalaman kerja di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Sebelum menjadi Pj Wali Kota Palembang, Ucok pernah menjabat dalam posisi-posisi penting di Kemendagri. Seperti Inspektur II Itjen Kemendagri, Plt Direktur PAPD di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Kasubdit Penamaan dan Kode Desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Plt Direktur SUPD II Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, Kasubdit Pekerjaan Umum Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, Kasubdit Perencanaan SDA, Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, Kabagren Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, dan Kasubag Program Ditjen Bina Bangsa Kemendagri.

Tak hanya itu, Ucok juga pernah memiliki pengalaman kerja di luar lembaga pemerintah sebagai Director of Capacity Development at Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) (2019 - saat ini). Coordinator for The Good Government Study in Rhein-Necar Region Germany at Institute for Science and Technology Study (2004 - 2005).

Asisten Pengawas Kerja Magang pada Pembangunan Wilayah di Negara Bagian Jerman (Das Ministerium des Innern und fur sport des Landes Rheinland-Pfalz, Speyer Germany (September 2002 - Oktober 2003). Peneliti pada UICSGAR (2020 - Sekarang).

Director of Capacity Development at Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) (2019 - saat ini). Coordinator for The Good Government Study in Rhein-Necar Region. Germany at Institute for Science

and Technology Study (2004 - 2005).

Asisten Pengawas Kerja Magang pada Pembangunan Wilayah di Negara Bagian Jerman (Das Ministerium des Innern und fur sport des Landes Rheinland-Pfalz, Speyer Germany) (September 2002 - Oktober 2003).

Ucok Abdul Rauf Damenta merupakan lulusan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara,



LAN RI, Ucok melanjutkan S2 Public Administration di German University Administrative Sciences. Bahkan hingga S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia.

Ucok pun menyatakan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengisi kekosongan sementara waktu, dan dia akan mengoptimalkan waktu yang ada demi Kota Palembang.

"Menjadi Pj Walkot Palembang ini, tugas saya hanya untuk mengisi kekosongan.

Dalam waktu yang singkat, saya akan mengoptimalkan apa yang sudah ada," tuturnya.

Menurut Ucok, masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, termasuk penurunan angka stunting dan perbaikan infrastruktur.

"Kita masih memiliki beberapa pekerjaan yang perlu diperhatikan, seperti penurunan angka stunting dan lainnya," tutupnya. •



BIODATA

Nama : Ucok Abdul Rauf Damenta
Tempat Tanggal Lahir : Solo, 30 Desember 1966
Jabatan : Pj Wali Kota Palembang

PENDIDIKAN

- S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, LAN RI
- S2 Public Administration di German University Administrative Sciences
- S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia

KARIER

- Inspektur II Itjen Kemendagri
- Plt Direktur PAPD di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
- Kasubdit Penamaan dan Kode Desa
- Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
- Plt Direktur SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri
- Kasubdit Pekerjaan Umum Ditjen Bina Bangda Kemendagri
- Kasubdit Perencanaan SDA
- Ditjen Bina Bangda Kemendagri
- Kabagren Ditjen Bina Bangda Kemendagri
- Kasubag Program Ditjen Bina Bangda Kemendagri

- Director of Capacity Development at Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) (2019 - saat ini)
- Coordinator for The Good Government Study in Rhein-Necar Region Germany at Institute for Science and Technology Study (2004 - 2005)
- Asisten Pengawas Kerja Magang pada Pembangunan Wilayah di Negara Bagian Jerman (Das Ministerium des Innern und fur sport des Landes Rheinland-Pfalz, Speyer Germany) (September 2002 - Oktober 2003)
- Peneliti pada UICSGAR (2020 - Sekarang)
- Director of Capacity Development at Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) (2019 - saat ini)
- Coordinator for The Good Government Study in Rhein-Necar Region Germany at Institute for Science and Technology Study (2004 - 2005)
- Asisten Pengawas Kerja Magang pada Pembangunan Wilayah di Negara Bagian Jerman (Das Ministerium des Innern und fur sport des Landes Rheinland-Pfalz, Speyer Germany) (September 2002 - Oktober 2003)

Fauzi H Amro

SI JAGO BERPOLITIK SENATOR DPR RI

Politikus partai NasDem Fauzi H Amro sangat tenar di kancah politik Sumatera Selatan (Sumsel). Dia merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 setelah menang di Pileg 2024.

Partai NasDem berhasil mengumpulkan perolehan 427.494 suara dan perolehan jumlah tertinggi adalah Fauzi H Amro sebanyak 281.499 suara.

Pria kelahiran Remban, Musi Rawas Utara 7 Juni 1976 ini menjabat sebagai Ketua DPP BAPPILU Sumatera III.

Karir-karir politik Fauzi H Amro sangat luar biasa, bermula sempat dipercaya menjadi staf ahli Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi) DPR RI pada tahun 2005.

Lalu kegemilangannya di dunia politik semakin moncer ketika di tahun 2006 dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua DPW PBR Sumsel tahun 2006-2013.

Fauzi H Amro pada 2009 menjadi calon anggota DPR-RI dari PBR untuk daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1 yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Kota Lubuklinggau. Ketika itu Fauzi berhasil

memperoleh 68.000 suara.

Tahun 2014, Fauzi kembali menjadi calon anggota DPR-RI namun kali ini ia berlabuh di Partai Hanura dan berhasil memenangkan suara rakyat hingga duduk sebagai anggota komisi V DPR-RI periode 2014-2019.

Tugas pertama sebagai anggota DPR RI,

Fauzi dipercaya duduk di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Fauzi juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Hanura di DPR-RI. Fauzi Amro dikenal sebagai legislator yang dekat dengan masyarakat daerah pemilihan dan peduli terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Saat masih bertugas di Komisi V DPR, Fauzi mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Bandara Silampari untuk meningkatkan iklim investasi di Sumsel.

Tidak hanya sukses dalam dunia politik, dalam kehidupan pribadi Fauzi menikah dengan Baiq Yunita Arisandi telah dikarunia 3 orang putra, yakni Muhammad Azka Khenan AlFaris, Muhammad Fathir Akbar AlFaris, dan Muhammad Azzam Ramadhan AlFaris.

Kepiawayan dunia politiknya ternyata cerminan dari dunia pendidikan dan organisasi.

Fauzi memulai pen-



didikan dasar di SDN 01 Remban, Surulangun Rawas, Kabupaten Musirawas. Selanjutnya, Fauzi meneruskan pendidikan menengah di SMP Negeri 07 Kota Bengkulu dan dilanjutkan ke SPP DATI I Bengkulu.

Fauzi kemudian hijrah dari Pulau Sumatera untuk menuntut ilmu di Pulau Jawa. Fauzi berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Padjajaran (UNPAD) di Bandung. Fauzi juga melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI).

Sejak duduk di bangku sekolah, Fauzi dikenal aktif berorganisasi. Fauzi dipercaya teman-temannya untuk menjabat Ketua OSIS periode 1993-1994 di SPP DATI I Bengkulu.

Kemudian, di kampus Fauzi makin aktif berorganisasi. Dikenal sebagai mahasiswa yang berasal dari daerah, Fauzi tak rendah diri dan mampu menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Di kampus, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FAPET IPB dan Presidium Keluarg Mahasiswa IPB Tahun 1997-1998.

Fauzi juga memiliki pengalaman kerja yang luas. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Unit Pendidikan dan Penelitian Jonggol (UP3J), peneliti dan instruktur pada Pelatihan dan Manaje-

men Penggemukan Domba Mendiknas dan PB HMI pada 2002, peneliti di PT Lembu Sodo Mandiri, Ciawi, Bogor pada tahun 2001.

Kemudian, sebagai marketing officer di PT Kartika Naya tahun 2003, direktur

marketing di PT Daya Cipta Kreasindo tahun 2004. Hingga saat ini Fauzih masih menjabat sebagai Komisiaris Utama CV Muratara Jaya dan pemilik Faris Laundry & Dry Cleaning Palembang. •



BIODATA

Nama : Fauzi H Amro
TTL : Remban 7 Juni 1976
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPR RI periode 2024-2029

KELUARGA

Istri : Baiq Yunita Arisandi, Fauzih
Anak : 3
Muhammad Azka Khenan AlFaris
Muhammad Fathir Akbar AlFaris
Muhammad Azzam Ramadhan AlFaris.

PENDIDIKAN :

- SMA SPP DATI I Bengkulu

- D3 Institut Pertanian Bogor
- S1 Universitas Padjadjaran
- S2 Universitas Indonesia

KARIER

- Staf ahli Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi) DPR RI pada tahun 2005
- Ketua DPW PBR Sumsel tahun 2006-2013
- Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal
- Wakil Ketua Fraksi Hanura di DPR-RI
- Legislatur

Popo Ali Martopo SUKSES MEMBANGUN OKU SELATAN, KINI LIRIK SUMSEL

Politisi partai Golkar Popo Ali Martopo sukses membangun OKU Selatan sebagai Bupati, kini bakal maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024.

Pria kelahiran Muaradua Sumsel, 10 Mei 1982 ini sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi calon Gubernur Heri Amalindo. Keduanya maju dengan mengusung visi dan misi mirip seperti pemerintahan mantan Gubernur Alex Noerdin yakni hidupkan kembali sekolah berobat gratis.

Popo Ali Martopo merupakan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel selama dua periode 2016-2021 dan 2021-2024.

Popo menjadi bupati termuda di Sumsel karena saat awal menjabat berusia 33 tahun.

Popo dikenal sebagai pemimpin yang apa adanya, berwibawa, tegas namun disegani berbagai kalangan.

Anak dari pasangan Rozali Sera'i dan Jauleha merupakan putra kedua dari empat bersaudara, saudara sulung bernama Heri Martadinata, dan kedua saudara bungsunya bernama Septika Intan Isizu dan Agustina Anggeraini.

Popo menikah dengan wanita asal Palembang, Isyana Lonetasari dan dikaruniai dua orang anak. Anak pertama seorang putri bernama Cleo Aisya Saka Ali dan anak kedua seorang putra bernama Muhammad Vito Alvaro Zali.

Popo mengawali pendidikannya di SD Negeri 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1989-1994. Kemudian dia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Muaradua pada





1994-1996 dan SMA Negeri 3 Palembang pada 1997-2000.

Setelah itu, Popo terbang ke Australia untuk kuliah di Deakin University Melbourne dan mendapatkan gelar Bachelor of Commerce pada 2006. Sebagai putra daerah, Popo memutuskan terjun ke dunia politik pada 2009.

Kemudian dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di periode 2009-2014. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten OKU Selatan periode 2010-2013.

Kemudian menjabat sebagai Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten OKU Selatan periode 2014-2017.

Karir politik Popo Ali cukup gemilang. Terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumsel di priode 2009-2014.

Selain itu Popo menjabat sebagai ketua Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten OKU Selatan priode 2010-2013 serta menjabat sebagai Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten OKU Selatan tahun 2014 -2017.

Mempunyai moto dapat berguna bagi orang banyak, Popo Ali terpilih sebagai Bupati Kabupaten OKU Selatan

periode 2016- 2020.

Saat itu dilantik oleh Gubernur Sumsel era H Alex Noerdin di usia yang belum genap menginjak 34 tahun sebagai Bupati termuda di Provinsi Sumsel.

Popo Sukses membangun OKU Selatan buktinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten OKU Selatan

Dewan Juri Top BUMD Awards 2024, Rabu 20 Maret 2024 Ajang penghargaan yang diselenggarakan Majalah Top Business ini diadakan di Hotel Raffles Jakarta.

Pemkab OKU Selatan meraih Top BUMD Awards 2024 Perumda Air Minum Bintang 4 dan Top Pembina



kembali meraih prestasi di panggung nasional dengan memborong dua kategori penghargaan Top BUMD Awards 2024.

Penghargaan tersebut diberikan secara obyektif dan independen oleh

BUMD 2024. Penghargaan ini diberikan kepada Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan dedikasinya dalam mengelola BUMD PDAM Tirta Saka Se-labung.

Kuda Hitam di Pilgub Sumsel 2024

Munculnya nama Popo Ali Martopo digandeng oleh Heri Amalindo menjadi pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel di Pilgub 2024, Pasangan Heri Amalindo-Popo Ali (Hapal) menjadi kuda hitam untuk kontestan lainnya.

Dua pasangan kontestan dinilai kuat Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) maupun Mawardi Yahya-Anita Noeringhati (Matahati) tidak bisa dinilai remeh.

Pasalnya Hapal diam-diam melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan petinggi dan sesepuh Partai Golkar asal Sumsel, Kahar Muzakir di Jakarta.

"Iya, ada pertemuan antara Pak Popo Ali sebagaimana diketahui dia juga adalah Kader Golkar di kantor petinggi atau sesepuh Golkar asal Sumsel dan dikenal sebagai Anggota DPR RI 5 periode, Pak Kahar Muzakir," kata Jubir Muda Hapal, Okta Alfarisi beberapa waktu lalu.

Dilanjutkannya, pertemuan Heri Amalindo-Popo Ali dengan Kahar Muzakir dilakukan secara terpisah. Popo Ali lebih dulu menghadap, tak lama pada hari yang sama Heri Amalindo menemui Kahar.

Dalam pertemuan itu, kata Okta, banyak hal yang disampaikan Kahar ter-

hadap kader Golkar dan PDIP tersebut. Termasuk dukungan penuh para kader Golkar kepada Popo Ali untuk maju di Pilkada sebagai Bacawagub Sumsel mendampingi Heri Amalindo.

"Banyak hal yang disampaikan Pak Kahar, termasuk juga dukungan penuh atas majunya kader Golkar Popo Ali yang saat ini menjadi Bupati OKU Selatan untuk maju sebagai Cagub Sumsel mendampingi Pak Heri Amalindo," katanya.

Menurutnya, dukungan Kahar terhadap Hapal bukan tanpa alasan. Disebut Kahar, jika keduanya saat ini masih menjabat bupati aktif, Heri Amalindo



sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Popo Ali Bupati OKU Selatan.

Keduanya memiliki wilayah, basis massa atau pemilih yang tak bisa dianggap remeh Paslon HDCU maupun MATAHATI.

“Pak Kahar tadi juga berharap agar Hapal didukung sepenuhnya oleh petinggi dan kader Golkar di sumsel untuk maju di Pilkada,” ungkapnya.

Okta juga menyampaikan pesan Kahar soal duet Hapal yang diibaratkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres Februari yang lalu. Tokoh senior yang berdampingan dengan anak muda di kontestasi politik.



“Popo Ali melengkapi pasangan antara senior dengan anak muda. Harapan kita kehadiran Pak Popo Ali bisa mewakili anak muda di Sumsel. Seperti kita tahu, bahwa anak muda adalah simbol kebangkitan dengan terpilihnya Gibran sebagai Wapres. Tentunya, ini harus diikuti di daerah-daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Saling melengkapi dan akan jadi kolaborasi yang tepat,” jelasnya.

Dengan dukungan Kahar, ia berharap surat rekomendasi Golkar bisa diberikan kepada Paslon Hapal untuk bisa melangkah di Pilkada Sumsel.

“Kami percaya dan yakin, Golkar

akan memberi rekomendasi kepada Paslon Hapal di Pilkada Sumsel,” katanya.

Meski belum mendapat dukungan Parpol secara resmi, Okta menyebut



Pilkada Sumsel telah terlampaui.

“PDIP, Golkar dan PAN kita harapkan memberi dukungan terhadap Hapal. Komunikasi dengan PAN juga masih terus jalan, kita optimis dukungan dari



jika Hapal akan dipilih PDIP, Golkar dan PAN untuk bersaing di Pilkada Sumsel. Ketiga Parpol itu telah intens menjalin komunikasi dengan Hapal. Total dukungan 3 Parpol itu sebanyak 27 kursi, maka syarat maju 15 kursi di

3 Parpol ini,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kahar juga pernah ditemui Paslon MATAHATI pada Mei lalu. MATAHATI juga mendatangi Ketum Golkar Airlangga Hartarto pada saat yang bersamaan. • IRY

BIODATA

Nama : Popo Ali Martopo, B.Commerce
Tempat Tanggal Lahir : Muaradua Sumsel, 10 Mei 1982
Agama : Islam
Istri : Isyana Lonetasari
Anak : Cleo Aisya Saka Ali
Muhammad Vito Alvaro Zali.

PENDIDIKAN

- SD Negeri Gunung 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (1989-1994)
- SMP Negeri 1 Muaradua (1994-1996)
- SMA Negeri 3 Palembang (1997-2000)

- S1 Deakin University, Melbourne, Australia (2000-2006)

ORGANISASI

- Ketua KNPI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2010-2013)
- Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2014-2017)

KARIER POLITIK

- Anggota DPRD Prov. Sumsel dari Partai Persatuan Pembangunan (2009-2014)
- Bupati OKU Selatan (2016 sampai sekarang)

Ishak Mekki

2 KALI JABAT BUPATI OKI, SUKSES JADI WAKIL GUBERNUR DAMPINGI ALEX NOERDIN

Nama mantan Wakil Gubernur Ishak Mekki kembali mencuat diusulkan menjadi pendamping Herman Deru untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 pasca ditinggal Mawardi Yahya.

Hanya saja usulan tersebut tidak bisa direalisasikan, pasalnya Herman Deru secara resmi dan tegas menggendeng Mantan Bupati Lahat Cik Ujang sebagai Calon Wakil Gubernur Sumsel dalam Pilgub Sumsel 2024.

Meski begitu mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini menyatakan bangga terhadap masyarakat yang mampu menjaga kondusivitas perpolitikan di Sumsel.

"Saya bangga dengan masyarakat Sumsel, meskipun intensitas mulai tinggi, suhu mulai naik, namun kondusivitas Sumsel masih terjaga. Terimakasih

atas respon masyarakat Sumsel terhadap saya baik sebagai anggota legislatif, maupun mantan Wagub Sumsel 2013-2018, Alhamdulillah," ujarnya.

Ishak Mekki merupakan putra Daerah Sumsel kelahiran Perigi, Kayu Agung 1 Maret 1958, istri Tartila Ishak ini menempuh pendidikan dan tercatat sebagai alumni dari Universitas Sriwijaya.

Ishak Mekki pernah menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) sejak 2004 hingga 2013, sebelum terpilih menjadi Bupati OKI, Ishak Mekki mengawali karier sebagai Kasubsi Teknik Penyehatan dan Lingkungan Dinas PU Kabupaten OKI pada tahun 1991.

Dua tahun menjabat kasi, karier Ishak Mekki makin moncer, terbukti tahun

1996 Ia langsung menjabat sebagai Kepala Dinas PU OKI selama empat tahun.

Setelah itu, pada tahun 2002 karier Ishak Mekki menjabat Kepala Dinas PU BM Sumsel selama dua tahun.

Kemudian Ishak Mekki kembali ke OKI kali ini



la mencalonkan diri sebagai Bupati OKI dan langsung terpilih. Ia mencalonkan untuk kedua kalinya sebagai Bupati OKI dan kembali terpilih lagi.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai bupati OKI selama dua periode, Ishak Mekki mencoba peruntungan menjadi calon wakil Gubernur Sumsel berpasangan dengan Alex Noerdin.

Nama Ishak Mekki dikenal sebagai Wakil Gubernur Sumsel tahun 2013-2015 mendampingi Alex Noerdin. Setelah selesai bertugas menjadi Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumsel, namun sayang ia kalah dalam Pilgub Sumsel 2018 lalu.

Tak terpilih menjadi gubernur, Ishak Mekki mencoba keberuntungannya ke senayan. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumsel 1.

Saat ini Ishak Mekki menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi V 2019-2024 Dapil Sumsel 1. Selain itu, Ishak Mekki dari fraksi Demokrat kembali bersaing di Pilkada 2024, Dapil 1 bersama delapan petahan lainnya.

Dalam pengumuman KPU RI, nama Ishak Mekki menjadi salah satu bakalcag yang kembali memperebutkan 17 kursi di DPR RI.

Bahkan Ishak Mekki digadangi sebagai bakal calon legislatif (baleg) DPR RI yang potensial terpilih.

Perlu diketahui, pada masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumsel tahun 2015-2017 terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh gugus tugas tindak pencegahan dan penanganan tin-

dak pidana perdagangan orang Sumsel dengan korban 15 orang.

Seperti Tahun 2015 sebanyak 4 kasus dengan korban 7 orang, tahun 2016 sebanyak 5 kasus dengan korban 8 orang dan tahun 2017 sebanyak 1 kasus dengan korban 2 orang.

Penyebabnya bisa terjadi oleh kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, terlalu percaya kepada agen

atau perekrut dan lainnya. Disamping itu, masalah pelakunya sendiri biasanya orang terdekat (orang tua, paman, kenalan) dan geromo atau mucikari.

Mereka juga melakukan modus dengan berbagai cara seperti pengiriman tenaga kerja, duta seni dan budaya, perkawinan pesanan, pengangkatan anak, pemalsuan dokumen (KK/KTP), kerja paksa, penculikan dan lainnya. •IRY1



BIODATA

Nama : Ishak Mekki
Tempat Tanggal Lahir : Kayu Agung, 1 Maret 1958
Istri : Tartila Ishak
Pekerjaan : Politikus

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kasubsi Teknik Penyehatan & Lingkungan Dinas PU Kab OKI (1991)
- Kasi Bina Marga Dinas PU Kab OKI (1994-1996)
- Kepala Dinas PU Kab OKI (1996-2002)
- Kepala Dinas PU BM Prop.Sumsel (2002-2004)
- Bupati OKI (2004-2013)
- Wakil Gubernur Sumsel (2013-2018)
- Anggota DPR RI (2019-2024) Dapil Sumsel 1

RIWAYAT ORGANISASI

- Ketua KNPI Kabupaten OKI (1995-1999)
- Ketua MPI KNPI Kabupaten OKI (1999-2003)
- Bendahara I KNPI Prov Sumsel (1997-2000)
- Ketua Umum Pengda Sumsel PSASI (Ski Air) (2004-sekarang)
- Ketua MPC Partai Demokrat Kab OKI (2006-sekarang)
- Ketua Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) (2002)
- Ketua Dewan Pembina Universitas Islam OKI (2007-sekarang)
- Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sumsel (2010-2015)
- Ketua Pengda IPSI Sumsel Tahun (2012-sekarang)



3 MENGUAK TAKDIR BANGKA BELITUNG

Sudah tiga nama beredar sebagai bakal calon dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung. Awal Agustus akan lebih jelas lagi status pencalonannya.

Bekas Gubernur Erzaldi Rosman Djohan, mantan Wakil Gubernur Hidayat Arsani, dan pensiunan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Naziarto adalah tiga nama yang sejauh ini beredar. Erzaldi akan berpasangan dengan Yuri Kemal Fadhlullah.

Pada awal Juli 2024, Erzaldi mendapatkan tambahan dukungan berupa rekomendasi pencalonan dari Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan langsung rekomendasi itu kepada Erzaldi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Rekomendasi itu merupakan tambahan dukungan lantaran Erzaldi menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Babel. Erzaldi, putra bekas Bupati Bangka Rosman Djohan, menjabat Gubernur Babel periode 2017-2022.

Rekomendasi untuk Erzaldi satu pa-

ket dengan pasangannya, calon wakil gubernur Yuri Kemal Fadhlullah, putra politisi Yusril Ihza Mahendra, "Tentu, keluarga besar Partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh, bukan hanya selama masa kampanye, tetapi juga Insyaallah saat terpilih kembali dalam pemerintahan ke depan," kata AHY selepas mengumumkan dukungan partai ke Erzaldi-Yuri.

AHY juga menjelaskan partai mendukung Erzaldi kembali maju karena dia menilai gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022 itu menorehkan catatan yang baik selama memimpin provinsi tersebut. "Harapannya, semua yang telah dicapai selama kepemimpinan Bapak selama ini bisa dilanjutkan dan yang belum tercapai bisa kita lakukan lompatan perbaikan-perbaikan sesuai yang kita harapkan bersama," kata AHY ke Erzaldi.

Erzaldi, yang datang sendiri tanpa



Yuri saat menerima surat rekomendasi itu, berterima kasih atas dukungan Demokrat. "Dengan harapan dukungan ini Inshaallah akan membawakan keberhasilan dan keberkahan bagi masyarakat Bangka Belitung," kata Erzaldi setelah menerima surat rekomendasi.

Saat menjabat Gubernur periode 2017-2022, Erzaldi berpasangan dengan Abdul Fatah. Namun untuk kontestasi pemilihan gubernur periode 2024-2029, Erzaldi memilih berpasangan dengan Yuri. Sebelum menjabat sebagai gubernur Bangka Belitung periode lalu, pernah menjabat sebagai bupati dua periode di Kabupaten Bangka Tengah.

Sedangkan Yuri, sebagaimana ayahnya, juga berprofesi sebagai advokat dan sempat tampil menjadi anggota tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi. Yuri juga sempat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang untuk daerah pemilihan Bangka Belitung. Namun, usahanya ke Senayan kandas karena perolehan suara PBB yang tak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

"Alhamdulillah. Terimakasih atas surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat melalui Ketua Umum Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kepada saya. Ini nutrisi dan energi untuk terus membangun Bangka Belitung.

Satu kehormatan mendapat sambutan hangat. Pun saya menyadari amanat ini adalah tanggung jawab yang besar sekaligus cobaan," tulis Erzaldi di akun instagramnya, Jumat, 5 Juli 2024.

Tak hanya itu, melalui unggahannya, ia mengaku dukungan Demokrat membuatnya lebih tenang, karena mempunyai kesamaan visi dengan dirinya. "Saya merasa tenang karena Partai Demokrat punya kesamaan visi,

satu arah dan sama persepsi dalam membangun bangsa di pemerintahan yang sedang berjalan serta di masa mendatang," lanjutnya.

Menurut Erzaldi, mandat dari Partai Demokrat menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan Bangka Belitung di periode keduanya. "Dan Inshaallah bersama Demokrat, mandat ini mampu saya elaborasikan bersama 1,4 juta masyarakat Bangka Belitung untuk melanjutkan pembangunan di periode kedua, yang tantangannya relevan menunggu di depan mata," ujarnya.

Calon wakilnya pun sudah fixed memenuhi kriteria keterwakilan wilayah yakni dari Bangka dan Belitung. Se-



• INFO PILKADA

jak awal pemasangan figur dari dua pulau utama Babel itu adalah kriteria wakil untuk Erzaldi. "Gambarannya memang begitu, (berpasangan) dari Belitung," kata Erzaldi.

Rekomendasi Partai Demokrat untuk Erzaldi sekaligus memupus peluang calon lain yang mendaftar ke partai berlogo bintang mercy itu. Salah satunya adalah Hidayat Arsani, Wakil Gubernur Babel periode 2014-2017

ini sedang tidak baik-baik saja.

"Saya mendaftarkan diri demi kepentingan Bangka Belitung. Saya tidak ke sini (Demokrat) kalau pemimpin kita bagus. Tolong catat, artinya kita punya pilot tidak profesional," kata Dayat di DPD Partai Demokrat Babel.

Karena itu, sambungnya, ia mencalonkan diri untuk mengganti pemimpin yang dianggap belum memuaskan. "Saya sendiri pun belum

alnya jadi wakilnya, mungkin partai ini (Demokrat) ke depannya bisa mendukung saya, termasuk bisa membawa kesejahteraan masyarakat Babel," tegasnya.

Dengan peningkatan kesejahteraan itu, sambungnya, layanan dasar untuk warga Babel diharapkan dapat meningkat. "Misi saya pertama adalah masalah kesehatan. Karena ada 480 ribu orang yang tidak membayar



yang berlatar belakang Partai Golkar dan berprofesi sebagai pengusaha swasta.

Dayat, nama ringkasnya, sempat mendaftar ke Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di tingkat provinsi pada awal April 2024. Kala itu Hidayat menegaskan niatnya maju sebagai calon Gubernur demi kepentingan rakyat Bangka Belitung. Kata dia, Babel saat

tentu memuaskan, tapi saya akan meningkatkan lebih memuaskan lagi dari yang lain," ujarnya.

Dalam pencalonannya Dayat mengaku masih kekurangan satu partai. Dengan alasan ini, dia datang untuk meminta dukungan dari partai lain. "Kan saya Partai Golkar kurang satu (partai). Mudah-mudahan Demokrat ini bisa bergabung dengan saya. Mis-

BPJS," ujar Dayat yang berjuduk Panglima itu.

Kelesuan ekonomi lokal Babel menyusul tindakan hukum terhadap tambang dan smelter timah pun menjadi perhatian Dayat. Menurut dia, persoalan timah di Babel perlu disikapi secara serius dan bijaksana. Hal ini lantaran menurutnya perekonomian masyarakat di Babel sebagian besar menggantungkan nasib dari sektor pertambangan bijih timah..

"Kita semua tahu akhir-akhir ini sebagian besar masyarakat kita khususnya

para penambang rakyat mengeluhkan sulitnya mencari nafkah dari sektor pertambangan bijih timah. Nah ini saya pikir masalah ini harus segera kita carikan solusi secara bersama,” ungkap Panglima Dayat..

Akan halnya Naziarto yang purna tugas pada 1 April 2024 sejak menjabat Sekdaprov pada 2020, langkahnya menuju pemilihan gubernur sudah mulai tampak dengan kemun-

hemat saya. Tidak cukup hanya dengan nafsu ingin menjadi Gubernur, ingin menjadi Bupati, ingin menjadi Walikota, tetapi harus dipikir dengan matang,” ujarnya

Menurut dia, selain harus memikirkan apa yang akan dilakukan ketika berhasil ataupun tidak berhasil, hal lain yang harus dipikirkan adalah seperti apa cara mencapai keinginan tersebut. “Mungkin kita mengukur diri

dan (suratan takdir) Yang di Atas. atau yang Maha Kuasa.

Dengan bekal ukuran dan kriteria tadi, maka ia pun mulai menjajaki pencalonan sebagai gubernur “Saya selama ini berkecimpung di Provinsi, jadi sekda empat tahun 40 hari, mengalami empat Gubernur. Jadi menurut hemat saya, saya tau lika-liku laki-laki yang ada di provinsi,” tuturnya.

Toh soal jahitan dukungan partai-partai politik pengusung yang masih belum pasti. “Belum ada deal-deal, jadi tidak boleh saya partai ini, kalau belum ada hitam di atas putih, belum. Sabar dulu, tunggu sampai bulan Agustus, kan masih panjang,” ujarnya.

Jika semuanya sudah pasti, kata



Saya sendiri pun belum tentu memuaskan, tapi saya akan meningkatkan lebih memuaskan lagi dari yang lain.

Naziarto, tentu ia menggelar deklarasi pencalonan. “Insya Allah di awal-awal Agustus,” ujarnya.

Sebagai gambaran, untuk maju menjadi calon gubernur Babel, minimal harus mendapatkan dukungan 9 dari 45 atau 20 persen kursi DPRD. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan, dari 18 partai politik, hanya sembilan yang berhasil meraih kursi legislatif dengan total 45 kursi di DPRD Bangka Belitung.

Perolehan terbanyak diraih PDI Perjuangan dengan sembilan kursi. Kemudian, Golkar delapan kursi dan Gerindra tujuh kursi. Selanjutnya, Nasdem dan PKS sama-sama meraih enam kursi, Demokrat dan PPP sama-sama tiga kursi, PKB dua kursi, dan Partai Bulan Bintang satu kursi.

Jadi, masih ada peluang untuk partai lain menjalin dukungan untuk pasangan calon. Tapi, waktunya memang makin sempit. ●



culan baliho pencalonannya. Baliho itu antara lain terpampang di Simpang Kantor Gubernur, Pangkalpinang, dan Simpang Empat Pemakaman Selindung, Sungailiat, Kabupaten Bangka pada akhir 2024.

Dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada akhir April 2024, Naziarto mengakui niatnya maju dalam Pilgub Babel 2024. “Saya berpikir, kita harus mempersiapkan diri secara fisik maupun mental. Karena dalam proses-proses Pilkada, kita harus mengedepankan banyak hal menurut

juga, apakah bisa untuk mencapai hal tersebut, karena menurut hemat saya memang kadang-kadang potongan memang ada, bahan yang akan dipotong ada, ibarat kita ingin menjahit pakaian. Tetapi apakah kita bisa dijahit, tahu-tahu potongnya ada, bahannya tapi jahitannya kurang,” ungkapnya mengibaratkan perlunya dukungan berbagai partai politik.

Selain itu, Naziarto juga mengemukakan kriteria pribadinya untuk maju Pilgub, yakni 5 Tas. Mulai dari popularitas, integritas, elektabilitas, Isi Tas,

Pilgub Sumbar 2024 **MAHYELDI -VASCO RUSEIMY BELUM ADA LAWAN**

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat (Sumbar) 2024 akhirnya mengusung Ketua DPP Partai Gerindra Vasco Ruseimy sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) mendampingi Mahyeldi Ansharullah.

Bahkan Partai Gerindra sudah menerbitkan surat rekomendasi bagi kedua pasangan itu bertarung di Pilgub Sumbar 2024.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengungkapkan hal tersebut dalam postingan di akun media sosial Instagram @andre_rosiade.

"DPP Gerindra dan DPP PKS secara resmi mengusung Pasangan Mahyeldi dan Vasco untuk maju sebagai Cagub dan Cawagub Sumbar di Pilkada 27 November 2024," ungkapnya.

Seperti diketahui Pria yang akrab disapa Buya Mahyeldi itu merupakan Ketua DPW PKS Sumbar.

Sementara itu, Vasco Ruseimy merupakan kader muda Partai Gerindra dan dikenal sebagai seorang pengusaha, YouTuber sekaligus politisi. Di kanal YouTube nya dia memiliki 1,21 juta subscriber. Lewat channel Macan Idealis, Vasco membahas berbagai macam topik terkini yang menarik dan edukatif diulas bersama narasumber.

Vasco Ruseimy dinilai menjadi sosok yang tepat untuk mendampingi calon gubernur petahana Mahyeldi Ansharullah. Kehadiran Vasco, akan menguntungkan bagi masyarakat di Tanah Minang.

"Kehadiran Vasco menjadi wakil Mahyeldi ini kan positif ke depan. Karena Vasco termasuk rezimnya pemerintah Pak Prabowo, ini akan sangat bagus untuk mengejar ketertinggalan pemerintahan Mahyeldi sebelumnya," ujar Direktur Executive Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chania-go, Kamis 18 Juli 2024.

Dengan adanya Vasco, pembangunan di Sumbar akan beriringan dengan pemerintahan pusat. Sehingga, kesulitan-kesulitan di masa pemerintahan sebelumnya, kini bisa dengan mudah diakses karena Vasco berada di rezim pemerintahan.

"Sekarang Gerindra rezimnya penguasa, saya pikir itu positif untuk pembangunan Sumatera Barat untuk mengejar ketertinggalan, oleh karena itu ada kemungkinan bisa dikerjakan yang selama ini sulit aksesnya didapatkan oleh incumbent,"

t u -

turnya.

Tak hanya itu, Pangi juga menilai pasangan Mahyeldi - Vasco adalah duet yang komplit dan saling melengkapi. Apalagi ceruk pasar pemilih mereka

juga berasal dari kalangan yang berbeda. Sehingga akan menyatukan masyarakat Sumbar dalam kekompakan dan kebersamaan untuk kemajuan daerah.

"Ceruk pasar Mahyeldi kan pemilihnya religius ya, sementara pemilihnya Vasco ini kan kalangan Milenial dan Gen Z, jadi mereka sudah bisa saling melengkapi," katanya.

Duet komplit Mahyeldi - Vasco Ruseimy, membuat keduanya menjadi sosok yang potensial memimpin Sumbar ke depannya. Apalagi sebagai petahana Mahyeldi memiliki elektabilitas yang masih sangat kuat di Sumbar.

"Kalau saya cermati, belum ada sosok lain yang berani melawan pasangan ini. Elektabilitas



pasangan ini terlalu kuat," katanya.

Bahkan, Pangi menilai, Pilgub Sumbar berpotensi hanya akan diikuti satu pasang cagub dan cawagub. Karena sejauh ini belum ada sosok yang berani melawan pasangan Mahyeldi - Vasco Ruseimy.

"Tampaknya akan ada potensi kotak kosong. Tapi itu masih 50-50 lah. Sebagai negara demokrasi kita tidak ingin seperti itu. Demokrasi harus berjalan," katanya.

Sebelum menjadi Gubernur petahana Sumbar, Mahyeldi adalah Wali Kota Padang selama dua periode yakni pada 2014-2019 dan 2019-2024.

Pada periode kedua wali kota, dia ikut kontestasi Pilgub Sumbar bersama Audy Joinaldy dengan dukungan PKS dan PPP. Mereka pun memenangkan gelaran pemilu tersebut.

Mahyeldi memulai karier politiknya saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2004-2008.

Mengutip dari laman Pemprov Sumbar, pria kelahiran Bukittinggi pada 1966 silam itu



memiliki gelar adat Datuak Marajo.

Setelah menjadi Wakil Ketua DPRD Sumbar, dia kemudian menjadi Wakil Wali Kota Padang untuk periode 2009-2014. Saat itu, sorotan baginya adalah ikut menata kembali wilayah dan perekonomian yang semrawut pascagempa berkekuatan M7,6 pada 2009

silam.

Sementara itu bakal calon wakilnya untuk Pilgub Sumbar, Vasco lahir pada 13 Juli 1986 di Sumbar. Ia menempuh pendidikan di SMA 1 Jakarta dan melanjutkan ke bangku kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Gas Petrokimia pada 2004.

Sebelum berkiprah di Gerindra, Vasco berkecimpung di Golkar sejak 2008 hingga 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Wasekjen.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi sayap Golkar. Vasco tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPP GEMA MKGR dan Wakil Ketua Umum AMPI.

Pada 2018, Vasco memilih hengkang dari Golkar dan bergabung ke Partai Berkarya bentukan Tommy Soeharto. Ia kemudian dipercaya menjadi ketua DPP. •



PILWAKOT PALEMBANG 2024 ADEM AYEM, TIDAK ADA PERANG VISI MISI

Iklim panggung politik Pilwakot Palembang 2024 terasa adem ayem alias dingin dan tenang. Hal itu efek dari tidak adanya intrik dan gosip yang dilemparkan oleh para kontestan.

Koordinator Wilayah Sumsel Peneliti Lembaga Riset Sosial Politik Public Trust Institute (PUTIN), Fatkurohman menjabarkan tidak adanya serangan yang terjadi selama jelang Pilwakot Palembang 2024.

"Dari sana sudah bisa ditebak kalau Pilwakot Palembang 2024 akan berjalan tenang. Tidak seperti Pilgub

an akan melakukan serangan dengan mencermati kegagalan para pertahanan.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sebelum yang salah dijadikan isu untuk kontestan non pertahanan.

"Tidak ada juga kritisi dari pemerintan sebelumnya baik dari kontestan lain dan warga Palembang," punga-

Dia menyebutkan tidak ada program yang diutarakan para calon Wali Kota Palembang hanya memikirkan logistik saja.

"Calon Wali Kota hanya memikirkan kekuatan logistik saja tetapi tidak pernah memperlihatkan program yang jelas," kata dia.

Dia menjabarkan banyaknya spanduk di Kota Palembang hanya mem-



Sumsel 2024 adanya serangan dari kontestan lainnya," kata dia

Dijelaskannya kontestan di Pilwakot Palembang 2024 terlihat memiliki emosional yang lebih tenang dan tidak suka melakukan manuver. Bahkan tidak ada isu besar yang dilemparkan yang menarik untuk disimak oleh warga Palembang.

"Tidak ada juga isu yang bisa dikritisi oleh warga Palembang yang dilempar para calon Wali Kota Palembang. Dari sana bisa kita lihat iklim politik di Pilwakot Palembang 2024 biasa-biasa saja," jelasnya.

Menurutnya biasanya para kontest-

kasnya.

Sementara itu para kontestan diprediksikan akan maju di Pilwakot Palembang 2024. Yakni, Ratu Dewa (Sekda Palembang), Fitrianti Agustinda (mantan Wakil Wali Kota Palembang), Prima Salam (Ketua DPC Gerindra Palembang), Yudha Pratomo Mahyudin (Ketua DPC Demokrat) dan Akbar Alfaro (Politisi Gerindra)

Sementara itu Direktur Eksekutif Democracy Study Center Teras Indonesia Haekal Hafafah mengatakan, calon Wali Kota Palembang di Pilwakot 2024 terkesan tidak memiliki program untuk memajukan Kota Palembang.

perlihatkan nama dan foto saja. Tetapi masyarakat tidak pernah tahu jelas apa program dari para calon Wali Kota di Palembang tersebut.

"Jangan sampai Pilwakot jadi kekuatan logistik teknik-teknik kemenangan kekuatan logistik saja. Program-program juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palembang," ucapnya.

Program-program penting di Palembang sangat banyak seperti pengangguran, tenaga kerja, kesehatan, macet dan banjir.

"Bahkan arah pembangunan Palembang saja tidak jelas apakah kota industri apa kota wisata. Banyak orang-

orang di Palembang liburan malahan datang ke Lampung bukan orang Lampung yang datang ke Palembang,” pungkasnya

Tidak ada perang visi dan misi atau program dari para kontestan tersebut. Alhasil Democracy Study Center Teras Indonesia membuat panggung adu lihai untuk melihat siapa paling moncer dan layak menjadi pemimpin.

Teras Indonesia akan menghadirkan bakal calon Wali Kota Palembang diantaranya Ratu Dewa, Basyaruddin Akhmad, Syafran Syaropi dan Charma Afrianta di Rocca Cafe Palembang Rabu 3 Juli 2024. Namun pada hari pelaksanaan satu kontestan tidak datang Ratu Dewa absen terkesan menghindari debat adu visi dan misi tersebut

“Misi saya punya program untuk memberikan gaji kepada RT Rp2 juta. Membuat dokter panggilan via call untuk lansia. Pembangunan nyaman dan modern soal banjir. Sarana prasarana pendidikan kurang sekolah khususnya di Kecamatan Gandus dan Alang Alang Lebar. Visi menjadikan Palembang kota yang adab istiadat dan sejahtera,” kata Charma Afrianto.

Charma menyebutkan warga Palembang jangan hanya memilih pemimpinnya karena isi tas dan elektabilitas saja. Tetapi pilih yang benar-benar bisa berbuat untuk Kota Palembang.

“Kalau isi tas jadi faktor utama banyak orang kaya di Palembang bisa menjadi Wali Kota. Saya sudah maju melalui jalur independen digagalkan sekarang saya kembali maju mendaftar dari Partai PDI Perjuangan. Walaupun tidak menjadi Wali Kota nantinya hanya Wakil Wali Kota saya akan tetap maju demi masyarakat Palembang,” ungkapnya.

IR Basyaruddin Akhmad Asisten II Pemprov Sumsel menyebutkan visi dan misinya ada empat. Yakni, standar pelayanan sarana prasarana (banjir dan pemukiman masyarakat), standar pelayanan pemerintah (perizinan), standar pelayanan sosial (masyarakat miskin dan pengangguran) dan standar kegiatan ekonomi (meningkatkan pariwisata).

“Khusus pariwisata jangan lagi orang

Palembang liburan ke Lampung kedepannya warga Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung mereka akan berkunjung ke Palembang saya sudah ada triknya,” jelasnya.

Dia juga menolak kalau pemilih atau masyarakat Palembang akan memberikan peluang menjadi pemimpin kepada calon yang memiliki isi tas dan elektabilitas saja.

“Tidak hanya popularitas tidak han-



ya elektabilitas dan isi tas. Semua itu tidak menjamin bisa memajukan Kota Palembang. Pemimpin yang berkualitas dipilih dari pemilih yang cerdas,” tegasnya.

Sementara M Syafran Syaropi politisi Golkar menyebutkan visi dan misinya urusan kedua terpenting baginya pemimpin harus memiliki tiga sifatnya yakni itikad baik atau niat yang baik seorang pemimpin, taat asas dan mempunyai jiwa pemimpin.

“Karena apabila memiliki sifat itu visi dan misi untuk memajukan Palembang akan terwujud. Itikad baik itu penting taat asas dan jiwa kepemimpinan itu penting untuk pemimpin di Palembang,” lanjut dia.

Dia juga menegaskan elektabilitas di Palembang tidak mencerminkan apakah calon pemimpin itu akan bisa menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat Palembang 5 tahun kedepannya.

“Tidak ada guna punya elektabilitas!

Terpenting tentang moralitas,” pungkasnya.

Unik! Semua Calon Wali Kota Palembang 2024 Masih Jomblo

Pilwakot Palembang 2024 tergolong unik karena semua kontestan hingga sekarang belum menunjukkan pasangannya alias masih jomblo. Hal ini dipastikan juga tidak banyak disadari oleh publik Palembang.

Pilwakot Palembang 2024 mun-

cul dengan nama kontestan paling banyak namun belum mendapatkan pasangan. Ini nama-nama kontestan seperti Ratu Dewa, Fitrianti Agustinda, Prima Salam, Yudha Pratomo Mahyudin, Akbar Alfaro, IR Basyaruddin Akhmad, M Syafran Syaropi dan Charma Afrianto.

Disinyalir para kontestan di Pilwakot Palembang 2024 terkesan cek ombak untuk melihat situasi politik. Sepertinya para kontestan tidak permasalahan bahkan apabila hanya direkomendasikan partai kedepannya menjadi Wakil Wali Kota di Pilwakot 2024.

IR Basyaruddin Akhmad menyebutkan sengaja belum mencari pendamping karena masih ingin melihat situasi kedepan.

“Politik itu dinamis saya nantinya mau jadi Wali Kota apa jadi Wakil Wali Kota tidak masalah. Mau lihat dulu kondisi kedepannya seperti apa,”kata dia. ●

SALING SERANG CALON GUBERNUR DI PILKADA SUMSEL 2024

Kompetisi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 semakin panas antara mantan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya. Kendati demikian kontestan lain Heri Amalindo masih berpeluang untuk menjadi kuda hitam.

Mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya maju bersama Anita Noeringhati (MATAHATI). Mawardi Yahya memulai serangan dengan menyebutkan sengaja maju agar mantan Gubernur Sumsel Herman Deru tidak kembali memimpin Sumsel.

Mawardi Yahya tidak ingin Herman Deru kembali menjadi Gubernur pada periode 2024-2029.

Pasalnya, saat Herman Deru menjadi Gubernur Sumsel periode 2018-2023 dinilainya kinerjanya biasa-biasa saja.

"Sumsel dipimpin Herman Deru biasa-biasa saja tidak ada lompatan yang berarti. Seorang pemimpin itu harus ada keberanian dan lompatan asal selamat itu tidak bisa kita harus ada terobosan," kata dia.

Dilanjutkannya dari sana dia tidak ingin Herman Deru kembali menjadi Gubernur Sumsel dan membuat masyarakat tidak mendapatkan apapun dari kinerja biasa-biasa saja tersebut.

Diakuinya saat itu dia hanya sebagai Wakil Gubernur tidak bisa memberikan kebijakan hanya sebagai ban serep saja.

"Saya memang Wakil Gubernur Sumsel tetapi kebijakan itu ada ke-

pada Gubernur saya hanya ibaratkan ban serep saja. Kalau saya kembali dicalonkan sebagai Wakil Gubernur bersama Herman Deru Sumsel akan kembali biasa-biasa saja. Alasan itu membuat saya harus berani memberikan terobosan dan bisa berbuat kepada masyarakat Sumsel," tuturnya.

Dia menjabarkan semua rentetan mantan Gubernur Sumsel dari masa ke masa memberikan peninggalan yang berarti untuk masyarakat. Namun Herman Deru tidak berhasil meninggalkan apapun untuk Sumsel dan masyarakatnya.

"Ramli Hasan Basri membangun situs bahwa benar kerajaan Sriwijaya itu di Sumsel. Lalu Rosihan Arsyad membuka cikal bakal bandara dan mempersiapkan masa depan PON. Kemudian Syahrial Oesman berhasil melanjutkan PON membangun Sumsel dan membuat klub sepakbola Sriwijaya FC. Selanjutnya Alex Noerdin mampu mem-

perkenalkan Sumsel di dunia Internasional lewat Asian Games dan membangun fasilitas olahraga serta LRT. Kalau Herman Deru apa yang sudah ditinggalkannya?," jelas dia.

Serangan telak berikutnya dilayangkan oleh Anita Noeringhati saat memberikan pidato di duel dua tim legend SFC itu bertajuk Big Match MATAHATI Reuni Legend Sriwijaya FC di stadion Geloran Sriwijaya Jakabaring (GSJ) beberapa waktu lalu.

Di hadapan ribuan fans Laskar Wong Kito, Anita Noeringhati meriakan cukup 1 periode saja di Liga 2. Seakan-akan mengkritik di masa 1 periode Herman Deru menjadi Gubernur Sumsel tidak mampu membawa SFC ke Liga 1 yang terus terpuruk ke Liga 3.

"SFC sepakbola yang dicintai masyarakat Sumsel cukup 1 periode saja di Liga 2. Tentunya membutuhkan dukungan masyarakat Sumsel! Ayo kita kembali kejayaan SFC bersama



MATAHATI,"tegasnya.

Hal itu dibalas oleh calon Wakil Gubernur, Cik Ujang yang menyebutkan bersama calon Gubernur Herman Deru bakal menang dan meraih suara sekitar 75 persen suara di Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut dikatakan mantan Bupati Lahat ini saat kegiatan pengukuhan Tim Keluarga dan Relawan, Kabupaten Muara Enim, PALI dan Prabumulih HDCU di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu, Minggu 14 Juli 2024

makin banyak. Oleh sebab itu kepada seluruh tim-tim mari koordinasi dan menjalin silaturahmi serta berdiskusi, bersosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang akan dilanjutkan oleh HDCU nanti.

"Kita sudah membuat posko pemenangan. Makanya kepada seluruh tim yang baru dilantik bisa berdiskusi di posko untuk bekerja dan bersosialisasi sampai ke tingkat kecamatan, desa-desa hingga ke pelosok," tegasnya.

Herman Deru sendiri tengah terjerat kasus hukum menjadi saksi kasus

2021, yang jerat eks ketua KONI Sumsel Hendri Zainuddin, digelar.

Dalam sidang, majelis hakim kembali memerintah jaksa penuntut umum untuk memanggil mantan Gubernur Sumsel Herman Deru. Kondisi itu membuat Herman Deru tidak terlihat di publik memberikan keterangan terkait langkah-langkahnya di Pilgub 2024.

Sementara itu pesaing terkuat berikutnya Heri Amalindo- Popo Ali (Hapal) digandang akan menjadi kuda hitam. Kendati tidak diperhitungkan



"Kita optimis HDCU menang 75 persen di Kabupaten Muara Enim. Saya merasa bangga dan terima kasih kepada seluruh partai dan tim yang baru saja dilantik dan harus bekerja keras, jaga kekompakan, dan kekeluargaan sampai ketingkat desa-desa untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumsel HDCU," harap H Cik Ujang.

Pasalnya dia membentuk dan melantik 10 tim bernama tim keluarga dan relawan yakin apabila semua tim bersatu melakukan kerja keras akan berhasil.

Apalagi tim-tim yang dibentuk se-

dugaan korupsi pencairan deposito dan dana hibah KONI Sumsel serta pengadaan barang dan jasa tahun



SFC sepakbola yang dicintai masyarakat Sumsel cukup 1 periode saja di Liga 2. Tentunya membutuhkan dukungan masyarakat Sumsel!

berdasarkan keterangan dari Jubir Hapal Okta Alfarisi telah bertemu petinggi dan sesepuh partai Golkar asal Sumsel Kahar Muzakir di Jakarta.

Menurutnya, dukungan Kahar terhadap Hapal bukan tanpa alasan. Disebut Kahar, jika keduanya saat ini masih menjabat bupati aktif, Heri Amalindo sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Popo Ali Bupati OKU Selatan.

Keduanya memiliki wilayah, basis massa atau pemilih yang tak bisa dianggap remeh Paslon Herman Deru- Cik Ujang (HDCU) maupun Mawardi-Anita Noeringhati (Matahati).●



KOLABORASI BAWASLU DAN STAKEHOLDER STRATEGI SUKSESKAN PILKADA 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan strategi kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Strategi tersebut bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak terkait.

“Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara dan peserta pemilu serta kontribusi dari masyarakat,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Sumatera, yang digelar Kemenko Polhukam di Medan, Selasa, 9 Juli 2024.

Dikatakan Bagja, dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan fungsi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara. Anggaran tersebut diperlukan juga untuk keamanan dan data kependudukan.

“Pemda juga punya peran untuk mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar. Serta mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan

hak pilih,” ungkapnya.

Dari sisi penyelenggara, kata Bagja, harus taat pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan. Tidak melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang. Terutama Bawaslu dengan cara berpikir yang utuh, tidak parsial, memandang untai proses sebagai sebuah kesatuan.

“Cara Bawaslu dan jajarannya mengawasi pemilu menjadi prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan. Penentuan metode pengawasan ini tentunya mempertimbangkan aspek kelembagaan, aspek lokalitas wilayah pengawasan, serta berbagai potensi kerawanan,” tuturnya.

Bagja menambahkan, Bawaslu sebagai pengawal pemilu dan demokrasi harus mampu mengawal terciptanya proses transisi kekuasaan secara adil, demokratis dan legitimate, serta mendorong kepercayaan rakyat terhadap prosedur demokrasi dalam menjembat-

ani proses transisi kekuasaan.

"Peran krusial Bawaslu ini dapat dijalankan dengan dukungan seluruh elemen kebangsaan. Salah satunya terbuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang secara sadar dan aktif terlibat untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilu," ujarnya.

Tingkatkan Kualitas Penanganan Pelanggaran

Anggota Bawaslu, Puadi, meyakini pihaknya mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang berkeadilan. Untuk itu, dia meminta para pengawas pemilu untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam menangani pelanggaran.

"Mereka (masyarakat) banyak berharap kepada penyelenggara untuk bisa mengafirmasi keadilan (dalam pemilihan). Penguatan ini untuk pemilihan menjadi fokus agar kita bisa menjalankan tugas semakin baik," kata Puadi dalam Rapat Kerja Strategi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024 Wilayah Jawa dan Kalimantan di Yogyakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Beberapa hal yang harus ditingkatkan kualitasnya, menurut Puadi, seperti kompetensi hukum beracara dan melakukan pembuktian. Hal lainnya, pengawas pemilu juga harus tahu dan paham argumentasi hukum dalam perbedaan antara UU 7/2017 tentang Pemilu dengan UU 10/2016 tentang Pemilihan seperti beda waktu penanganan pelanggaran.

"Diskusikan juga di forum ini mengapa di UU Pemilihan tidak ada pemeriksaan in absentia," cetus kandidat doktorat itu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu ini mengingatkan para pengawas pemilu juga perlu menyiapkan langkah strategis apabila ada rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Selain itu, dia meminta Bawaslu daerah untuk mengidentifikasi peta kerawanan di wilayah masing-masing.

"Jadi kemarin (Pemilu 2024) dihadapkan dengan masalah apa yang sangat krusial, berkaitan dengan politik uang atau netralitas ASN-nya. Termasuk beberapa wilayah pascaputusan MK untuk dilakukan PSU, PUSS, penyandingan data," terang dia.

Perkuat Nilai-Nilai Pancasila

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, meminta seluruh jajaran Bawaslu memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu.

Herwyn menjelaskan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni menjaga integritas. Pasalnya, tu-

mengingatkan seluruh jajaran berlaku adil dalam mengambil putusan. Hal itu sesuai dengan sila kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Keadilan yang kita terapkan yaitu berdasarkan ketentuan UU, putusan yang tidak berpihak dan bukan karena godaan dari pihak lain," ujar laki-laki asal Manado itu.

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan



gas sebagai pengawas pemilu memiliki banyak godaan dan cobaan dari berbagai pihak.

"Pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pasti akan mendapat godaan yang enak-enak. Kita sebagai pengawas pemilu yang berjiwa Pancasila harus bisa menjauhi mental bisa dibujuk, mental bisa dibeli dan lain sebagainya," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Penanaman Nilai Pancasila dan Pembinaan Mental dan Spiritual Jajaran Bawaslu se-Indonesia, di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam kesempatan itu, dia juga

Fuady menjelaskan etik dan integritas merupakan hal yang tidak terpisahkan. Dia mengimbau seluruh jajaran menjaga integritas dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

"Berintegritas adalah orang yang mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab," jelasnya.

Harapannya, dengan menjaga integritas mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. "Tidak lupa harus kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas dalam rangka menyukseskan pemilihan 2024," pesannya. ●

USULKAN PELANTIKAN 3 GELOMBANG

Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024 dipastikan tidak akan diterima oleh semua peserta layaknya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 14 Februari lalu.

Sejumlah perkara uji materi terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk mengantisipasi adanya uji materi di MK, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan pelantikan secara bertahap tiga gelombang.

"Fakta di lapangan setelah 27 November, tidak semua menerima. Mungkin ada yang menolak, ada yang tidak setuju. Dan haknya untuk melakukan gugatan di MK," ujar Tito saat memberikan pengarahan terkait Pilkada pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta Convention Center, Rabu, 10 Juli 2024.

Mendagri meminta masukan terkait usulan skenario pelantikan hasil Pilkada Serentak yang akan dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang.

Tito menyebut pihaknya sudah berdiskusi dengan KPU terkait usulan pelantikan kandidat pemenang Pilkada secara bertahap.

"Baru pendapat saya dan diskusi dengan KPU, belum masuk ke Komisi II DPR. Resminya di Komisi II DPR mungkin pekan depan. Kami akan mengusulkan menjadi pelantikan bertahap," tuturnya.

Pelantikan tahap pertama diusulkan digelar pada 1 Januari 2025. Hal ini dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masa jabatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 berakhir paling lama tahun 2024 yang diterjemahkan ke 31 Desember 2024.

Oleh karena itu, Tito mengusulkan



agar kepala daerah yang terpilih tanpa sengketa atau gugatan sebaiknya dilantik pada 1 Januari 2025.

"Ngapain lama-lama? Selesai berakhir sesuai undang-undang itu, 1 Januari, yang enggak ada masalah-masalah. Lantik serentak sehingga enggak ada kekosongan," ujarnya.

Apabila terjadi gugatan setelah proses tahapan Pilkada selesai, pelantikan kepala daerah bisa diundur hingga Februari 2025. Usulan gelombang kedua pelantikan ini mempertimbangkan masa berlaku gugatan hingga 45 hari di MK.

Sementara gelombang ke tiga khusus digelar bagi daerah dengan penyelenggaraan Pilkada yang berlarut-larut. "Ini skenario yang akan disampaikan ke Komisi II. Kalau ada masukan, tolong disampaikan," ujar Tito.

Memasuki tahapan Pilkada, mantan Kapolri ini juga meminta para kepala daerah untuk tidak menelantarkan pekerjaannya karena fokus memikirkan kontestasi kemenangan.

"Tetap semua pekerjaan dijalankan dengan lancar bagi teman-teman yang running yang menjabat sekarang bisa saja sebetulnya makin gencar kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk naikin elektabilitas

tanpa melanggar aturan," ujarnya.

Saat ini, Tito menyebut sebanyak 270 kepala daerah yang sedang menjabat adalah mereka yang dipilih dari hasil Pilkada 2020 yang masa jabatannya berakhir 2024. Para kepala daerah ini hanya perlu mengajukan cuti untuk terlibat dalam kampanye yang akan dimulai pada 25 September mendatang.

Bagi penjabat kepala daerah yang akan maju Pilkada, mereka harus melepas status sebagai aparatur sipil negara ataupun TNI/Polri saat waktu penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Saat ini, terdapat 276 penjabat kepala daerah. Mereka harus mengundurkan diri sebelum 22 September untuk bisa maju di Pilkada Serentak.

Sebelum surat keputusan pengunduran diri ditandatangani, penjabat kepala daerah diminta tetap aktif bekerja menjalankan tugas pemerintahan.

"Khusus Pj, saya minta saya diberi tahu paling lambat tanggal 17 Juli tolong yang akan running memberi tahu, 40 hari sebelum masa pendaftaran 27 Agustus. Saya sudah menerima lebih kurang 10 yang menyatakan ingin mengundurkan diri untuk ikut running," kata Mendagri.

Untuk anggota DPR dan DPD yang

menjadi kontestan Pilkada juga wajib mengundurkan diri dari jabatannya di legislatif.

"Kalau kepala daerah hanya cuti. Kenapa? Sebab, pada 2020 mendaftar menjadi eksekutif. Kalau anggota legislatif, waktu mendaftar ingin menjadi wakil rakyat. Maka, ketika dia pindah jalur ke eksekutif, wajib mengundurkan diri," tutur Tito.

Tito juga menyebut bahwa Kemendagri merencanakan penelitian untuk membandingkan kinerja kepala daerah hasil Pilkada dengan penjabat kepala daerah.

"Saya pengin tahu, jujur pengin tahu bagus mana kepala daerah dari hasil Pilkada dengan penunjukan. Bukan tidak demokratis. Sekadar ingin melakukan penelitian secara akademik," tuturnya.

Hasil penelitian yang menurut dia bisa dipertanggungjawabkan ini akan menjadi bahan masukan kepada pengambil keputusan baik presiden maupun DPR. Ke depan, diharapkan ada rekrutmen kepala daerah yang mampu memberi kesempatan kepada semua orang dengan biaya politik rendah dan hasilnya bisa lebih baik. ●





Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto

KAWAL RUU TNI/POLRI

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri.

"Bapak Presiden yang menginstruksikan agar pembahasan RUU dilakukan dengan hati-hati, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan putusan MK," kata Hadi dalam acara Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Hadi, RUU yang mengatur dua instansi negara ini harus dibahas dengan melibatkan elemen masyarakat dari mulai akademisi, NGO hingga tokoh masyarakat.

Pelibatan ini perlu dilakukan agar pemerintah mengetahui beragam perspektif baru tentang baik atau buruknya RUU TNI dan Polri.

Setelah diskusi dengan masyarakat, seluruh masukan itu akan ditampung dan dibahas dalam Daftar Intervensi Masalah (DIM) yang akan dilakukan Kemenko Polhukam.

Dengan demikian, RUU yang akan disahkan akan menjadi landasan TNI dan Polri bertugas dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.

"Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri," jelas Hadi.

Hadi menegaskan, pemerintah tidak hanya mengupayakan perubahan Undang-undang TNI dan Polri harus sesuai persyaratan formil pembentukan Undang-undang. Lebih dari itu, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Saya menekankan, bahwa pemerintah tidak sekadar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan UU. Namun juga yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab ke-

butuhan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi TNI dan Polri,” kata Hadi.

Hadi menjelaskan, kedua RUU perubahan tersebut naskahnya telah diinisiiasi oleh DPR dan sudah disampaikan pada presiden. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara kemudian menunjuk Menko Polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan dua RUU tersebut.

“Secara khusus Bapak Presiden melalui Mensesneg menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Itulah sebabnya, kata mantan Panglima TNI tersebut, Kemenko Polhukam menyelenggarakan acara dengar pendapat publik. Sejumlah kalangan antara lain akademisi, LSM, NGO, hingga jurnalis hadir sebagai perwakilan representatif masyarakat. Acara ini juga turut dihadiri para perwakilan kementerian/lembaga terkait.

“Diharapkan pemerintah mampu menghadirkan dialektika dan mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang mendukung maupun yang kontra. Akan terwujud satu keseimbangan antara kebutuhan pengembangan organisasi TNI dan Polri serta kebutuhan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hadi.

Hadi juga memastikan dwifungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

“Sudah tidak ada lagi dwifungsi (era orba) itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah,” kata Hadi.

Menurut Hadi, dwifungsi TNI di masa lalu membuka ruang bagi tentara untuk tidak hanya masuk ke bidang pertahanan, melainkan politik. Karenanya, pada masa lalu terdapat fraksi ABRI yang duduk di bangku DPR untuk membuat beragama keputusan politik.

Kini, lanjut dia, dwifungsi TNI hanya diperuntukkan untuk menempatkan anggota TNI ke pos-pos kementerian atau lembaga guna mendukung kinerja pemerintah.

“Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk men-

jawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden,” kata Hadi.

Kapasitas TNI yang ditempati di beberapa pos kementerian atau lembaga juga akan dibatasi dengan peraturan yang diatur dalam RUU maupun peraturan kementerian atau lembaga terkait. Karenanya, dengan adanya dwifungsi TNI ini, Hadi berharap TNI bisa memberikan kontribusi lebih guna menjalankan program-program pemerintah.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan empat RUU terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan DIM oleh kementerian terkait.

“Saat ini daftar inventarisasi masalah dari empat RUU tersebut sedang disusun,” kata Dini Purwono dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Dini mengatakan RUU Kementerian Negara, RUU Imigrasi, RUU TNI dan RUU POLRI merupakan RUU yang menjadi inisiatif DPR. Proses penyusunan DIM, kata Dini, dilakukan oleh ke-

menterian maupun lembaga terkait, seperti RUU TNI dan Polri oleh Kemenko Polhukam.

Dua RUU tersebut telah disetujui untuk menjadi RUU inisiatif DPR pada saat Rapat Paripurna DPR, Selasa, 28 Mei 2024. Pembahasan RUU TNI dan Polri tersebut sejauh ini berfokus pada perubahan usia pensiun untuk bintang, tamtama, dan perwira.

Sejauh ini sudah ada sekitar dua kali pembahasan RUU TNI di Baleg DPR RI. Adapun salah satu faktor pendorong RUU itu digulirkan karena untuk menyesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga memuat perubahan usia pensiun.

Dalam draf RUU tersebut, batas usia pensiun anggota Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan bahwa anggota Polri pensiun pada usia 60 tahun, tetapi bisa 65 tahun bagi pejabat fungsional. ●



**Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum,
Dini Purwono**

MENHUB PAMER INAPORTNET JANGKAU 264 PELABUHAN

Kementerian Perhubungan menekankan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet perlu ditingkatkan, sehingga bisa lebih efisien dan kompetitif.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menuturkan, penguatan sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif perlu diwujudkan bersama. Hal itu sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Sistem digital menjadi satu tero-

bosan untuk mendukung dalam peningkatan layanan. Apalagi, ke depan bakal ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan.

"Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh kementerian dan pemerintah daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah," kata Budi dalam seminar dengan tema 'Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia' di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Budi mengatakan, dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan.

Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Win-

dow (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam mempermudah kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat, serta kapal meninggalkan pelabuhan.

"Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan," jelas Menhub.

Dia mengungkapkan, Inaportnet sudah menjangkau 264 unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan laut. Selain itu, telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan.

Budi menegaskan, pihaknya terus berkolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan min-



eral dari hulu ke hilir.

"Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan," papar menteri asal Sumatera Selatan itu.

Budi menilai, implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Indonesia menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) 2023.

Menurutnya, hasil sidang tersebut telah mengadopsi amendemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.

Selain itu, lanjut Budi, penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.

"Saya berharap kepada semua lini kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," kata Budi.

Rampungkan PSN

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan pihaknya telah menyelesaikan 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor transportasi. Menurutnya, masih ada sekitar 10 proyek bercap PSN yang jadi pekerjaan rumah Kemenhub saat ini, di mana empat proyek di antaranya akan kelar tahun ini.

Dia menjelaskan, sederet pembangunan PSN pada sektor transportasi akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga mobilitas, layanan logistik, serta pertumbuhan titik ekonomi baru di berbagai daerah semakin

lancar.

"Alhamdulillah, sebanyak 25 dari 233 PSN yang dicanangkan berada pada sektor transportasi, pembangunannya telah diselesaikan Kementerian Perhubungan," ungkap Budi dalam keterangannya, Jumat, 19 Juli 2024.

Dia menjabarkan, saat ini ada 10 proyek PSN sektor transportasi yang masih dalam proses penyelesaian. Namun, ada 4 proyek yang ditarget akan selesai hingga akhir tahun ini. Rinciannya, ada dua proyek sektor kereta api, yakni KA Logistik Lahat-Kertapati dan Double Track Jawa Selatan. Semen-

Bandara Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Kediri, Bandara Lombok, Bandara Komodo, Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun, Bandara Nabire Baru, serta Bandara Siboru Fakfak.

Lalu, ada juga 7 proyek kereta api, antara lain KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, KA Rantau Prapat-Kota Pinang, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KA Bandara Yogyakarta, dan KA Makassar-Parepare.

Terakhir, 11 proyek pembangunan pelabuhan yang telah diselesaikan



tara itu, dua proyek lainnya ada di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sorong.

Sementara itu, 6 proyek lainnya yang direncanakan selesai di atas 2024 atau akan diteruskan di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Enam proyek itu meliputi 4 proyek sektor kereta api, yakni MRT Jakarta North-South, MRT Jakarta East-West Fase I, LRT Jakarta Velodrome-Manggarai, dan Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur.

Kemudian, dua proyek lainnya berada sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi dan Pelabuhan New Palembang.

Pembangunan PSN sektor transportasi yang telah diselesaikan meliputi 7 proyek bandara, 7 proyek kereta api, serta 11 proyek pelabuhan.

Pada sektor kebandarudaraan, ada

meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, serta Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Budi mengakui ada keterbatasan anggaran pemerintah untuk membuat pembangunan infrastruktur transportasi. Maka dari itu, pembangunan PSN seharusnya tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak.

Kemenhub sendiri membuka diri dan mengundang pihak swasta untuk berkolaborasi mengelola infrastruktur transportasi, baik pada sektor udara, laut, serta perkeretaapian.

"Sejalan dengan itu, kami pun berusaha mempermudah regulasinya," ujar Budi. ●

AWASI BARANG IMPOR ILEGAL JANGAN TINDAS PEDAGANG

Kementerian Perdagangan resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 yang ditandatangani 18 Juli lalu, Satgas tersebut akan bekerja hingga 31 Desember 2024.

Inisiasi Kementerian Perdagangan untuk membentuk Satgas Pengawasan

memiliki urgensi tinggi. Industri tekstil Indonesia sedang terdampak membanjirnya produk impor yang masuk secara ilegal. Hal itu mengakibatkan banyaknya pabrik tekstil yang tutup, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya, hingga turunnya pemasukan negara.

"Ada keluhan dari berbagai pemangku kepentingan tentang maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Standar Nasional Indonesia (SNI) serta pemenuhan standar-standar lainnya," ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta,

HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Ketua Umum PAN ini menjelaskan tiga tujuan utama pembentukan satgas tersebut. Pertama, menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan masalah impor. Kedua, menciptakan koordinasi antar-instansi yang efektif dalam pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Ketiga, menjalin komunikasi serta informasi antar-instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan per-



Barang Impor Ilegal ini merupakan hasil gerak cepat sinergi pemerintah untuk memberantas impor ilegal yang memengaruhi ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan dalam negeri.

Menurut Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, pembentukan satgas tersebut

Jumat, 19 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan, anggota Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal berasal dari 11 kementerian dan lembaga. Mereka adalah Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Polri; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan

masalah impor.

Menurut Zulhas, terdapat tujuh jenis barang yang akan diawasi Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Ketujuh jenis barang tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah

jadi lainnya.

"Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir," ungkap Zulhas.

Sebagai langkah selanjutnya, para anggota satgas akan menjalankan tugas, antara lain menginventarisasi permasalahan; menetapkan sasaran, program, dan prosedur kerja; memeriksa perizinan berusaha dan persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya; mengklarifikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha; dan menindak secara hukum sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Zulhas menyampaikan, pengawasan yang akan dilakukan satgas meliputi pengawasan berkala dalam rentang waktu tertentu, pengawasan khusus yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat, dan pengawasan terpadu jika butuh penanganan yang melibatkan instansi lainnya.

"Kepmendag tentang satgas kami umumkan baru hari ini. Setelah merampungkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pada Senin depan, satgas paling cepat mulai bekerja pada Selasa (22 Juli 2024, red)," terangnya.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan sepenuhnya mendukung pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

"Sebagai bagian dari pemerintah, kami melihat ini sebagai upaya mendukung industri manufaktur di Indonesia sebagai penopang kekuatan ekonomi bangsa," ujar Agus di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Agus, pembentukan satgas merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam hal ini, yang menjadi kata kunci keberhasilan upaya ini adalah penegakan hukum.

"Pasalnya, pemerintah telah mengetahui modus-modus impor ilegal yang selama ini dilakukan. Namun, bila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang serius, komitmen pemberantasan impor ilegal hanya akan menjadi hangat-hangat tahi ayam," kata Menperin.

Ia menekankan, penegakan hukum harus berlaku konsisten, tidak hanya di awal pelaksanaan kebijakan maupun

ketika sedang menjadi sorotan, baik dari publik, pelaku industri, atau para ekonom.

"Setelah sorotan itu turun, praktik-praktik (impor ilegal) akan muncul kembali. Itu yang kami, dan saya yakin Kemendag juga, tidak inginkan," imbuhnya.

Selain itu, Agus juga sepakat dengan usulan pemindahan pintu masuk (entry point) tujuh komoditas impor tadi ke pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa. Pertimbangannya adalah bahwa pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa telah mengalami kelebihan kapasitas.

"Segi positif lainnya, pemindahan entry point ini dapat membentuk kegiatan ekonomi baru di daerah. Ini merupakan usul yang baik sekali dan kami dukung juga 100 persen, mudah-mudahan nan-

jangkan menindas pedagang dalam melakukan razia atau penertiban terhadap barang-barang impor yang disebut-sebut membanjiri pasar dalam negeri.

Hal itu disampaikan Arief setelah mendapat kabar bakal ada penertiban oleh Satgas Barang Impor Ilegal bentukan Kementerian Perdagangan di sejumlah lokasi di Jakarta.

Menurut Arief, berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah melalui satgas dari Kementerian Perdagangan bersama aparat penegak hukum akan melakukan razia ke gudang-gudang dan toko-toko di Jakarta. Konon langkah itu dilakukan untuk menertibkan komoditas impor seperti garmen, tekstil, elektronik, produk keramik dan lainnya guna mencegah adanya barang ilegal.

Arief menilai, tindakan tersebut meru-



ti disetujui dalam Ratas (rapat terbatas)," kata dia.

Agus menilai, dua langkah tersebut merupakan hal yang baik dan positif bagi industri dalam negeri. Kesepakatan antara Menperin dan Mendag ini juga menunjukkan bahwa pemerintah satu visi untuk mendukung para pelaku industri.

Menurut dia, pelaku usaha dan pelaku industri bisa melihat bahwa kedua kementerian yang menjadi ujung tombak dalam membina industri ini memiliki satu pandangan.

"Dengan demikian, para pelaku industri dan calon investor tidak perlu ragu-ragu bahwa pemerintah melindungi industri dalam negeri untuk penyembuhan ekonomi," ujar Agus.

Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta pemerintah

pakan langkah yang kurang tepat. Dia menilai para pedagang tidak bisa disalahkan karena mereka membeli dari importir yang sudah bayar pajak. Lagi pula, Bea Cukai, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan mengizinkan impor barang-barang tersebut.

"Kok sekarang mau dirazia dan disita. Ini namanya anak buah Jokowi yang menangani masalah tersebut tidak becus dan mau menindas rakyat," tutur Arief di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Dia juga mempertanyakan soal sikap pemerintah yang terkesan tidak tanggung jawab. Padahal, para pedagang ini juga membayar pajak hingga bea dan cukai.

"Ini salah alamat nih. Coba barangnya bisa masuk dari mana? Pintunya (impor) siapa yang buka siapa yang tanggung jawab," ujar Arief. ●



BERSINERGI DAN BERKOLABORASI TEKAN ANGKA KEMISKINAN

Sejak dilantik menjadi Pj Walikota Palembang pada Rabu 16 Juni 2024 lalu, Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta, berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya. Ia pun siap melanjutkan program-program yang dilakukan para pendahulunya. Termasuk di dalamnya program pengentasan kemiskinan, melalui peningkatan lapangan kerja.

Bakal singkatnya masa kepemimpinan A Damenta yang akrab disapa, sebagai Pj Wali Kota Palembang yang diprediksi hanya beberapa bulan saja, tak menyurutkan niatnya untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan kota ini.

Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa yang juga adalah Pj Walikota Palembang sebelumnya, A Damenta juga siap menjalin kolaborasi.

Program yang telah dipersiapkan yakni menekan angka pengangguran Kota Palembang. Sebanyak 40 perusahaan yang telah bekerjasama dengan Pemkot Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja,

membuka 3000 lowongan pekerjaan.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palembang, terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kota Palembang dan juga stakeholders terkait.

Berbagai Upaya dilakukan oleh Pemkot Palembang untuk menurunkan angka pengangguran, yakni:

Melakukan pelatihan kerja (Teknik Las, Listrik, Otomotif, Menjahit dan Desain Grafis), dengan target 144 orang pekerja.

Melakukan magang kerja ke Jepang dengan target magang sebanyak 1.000

orang.

Mengadakan fair atau pameran kesempatan kerja dengan target lowongan pekerjaan mencapai 5.000 lowongan pekerjaan dengan 10.000 target pencari kerja.

"Kita akan berusaha menurunkan angka pengangguran di kota Palembang, pada kesempatan di tahun 2024 ada 40 perusahaan dengan 3000 lowongan pekerjaan yang disediakan," katanya.

Untuk dia sangat memberikan apresiasi kepada Dinas ketenagakerjaan bersama tim dalam upaya menurunkan angka pengangguran.

"Selain itu juga hubungan bilateral dengan negara-negara lain juga mem-

berikan kesempatan putra terbaik kita untuk bekerja diluar negeri. Seperti Jepang, Australia dan Korea,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kolaborasi bersama dinas serta OPD terkait menyediakan unit pelayanan seperti menyediakan pembuatan KTP, KK untuk mempermudah proses para pencari kerja. Sehingga mereka tidak usah lagi mendatangi OPD terkait untuk mengurus berkas mereka.

“Tadi bersama Kadin Disnaker mengelilingi stan ada beberapa bank seperti BNI dan perusahaan lain menerima banyak lowongan pekerjaan. Ini sangat menjanjikan sekali,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Rediyan Deddy Umrien menambahkan tahun 2024 pelamar pekerjaan sebanyak 3.450. Namun dari seluruh SDM ini, dinilai oleh perusahaan sesuai kriteria mereka.

“Dalam hal ini juga kami terus berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Palembang dengan mengikuti berbagai macam pelatihan yang disediakan oleh Disnaker Kota Palembang sebagai bekal mereka,” tegas Kadisnaker.

Diakuiinya, mengenai tenaga kerja untuk magang di negara Jepang dari Kota Palembang terus bertambah grafiknya.

“Prinsipnya negara Jepang menilai untuk bekerja seperti yang dikatakan Pak Sekda adalah bekerja dengan disiplin dan semangat. Untuk para pencari kerja yang sudah diterima pada tahun 2023, mencapai angka 50 persen sudah bekerja,” ucapnya.

Selesaikan Pengerjaan Infrastruktur

Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, Pj Wali Kota Palembang Ukok Abdul Rauf Damenta, turut memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat sehingga kemiskinan pun bisa dikendalikan.

Ukok Abdul Rauf Damenta, dalam rapat evaluasi Rekonstruksi Pembangunan Infrastruktur Kota Palembang di kantor Dinas PUPR Kota Palembang, mempersilakan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengisi dan menyelesaikan target pekerjaan di tahun 2024.

Hal ini dibenarkan Ukok, bahwa ini berkaitan dengan poin kinerjanya seba-

gai Pj Walikota dalam 6 bulan ke depan.

“Ya saya berikan kepada mereka kesempatan dalam menyelesaikan beberapa target, ini bukan saya paksakan. Dan kalau sudah selesai pengerjaannya mereka maka akan kita lakukan evaluasi capaian target. Ini juga berkaitan dengan evaluasi kinerja saya tentunya,” sahut Ukok Damenta.

Kemudian masalah jalan yang rusak di

Palembang.

la menambahkan, prioritas yang diutamakan di Kota Palembang ini, melakukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik. Seperti menjaga lingkungan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Sebab, menurutnya, percuma jika semua infrastruktur diperbaiki kalau dari masyarakatnya tidak menanamkan rasa



beberapa ruas jalan di Kota Palembang, Ukok Damenta mengaku dirinya sudah memantau hal tersebut.

“Dalam kesempatan ini para OPD sepakat untuk kerja sendiri-sendiri dan berkolaborasi dengan stakeholders terkait agar semua pekerjaan berjalan dengan baik,” katanya, usai memimpin rapat Infrastruktur di kantor PUPR Kota

peduli akan kebersihan.

“Maka dari itu, perlunya peran utama dari masyarakat untuk menjaga kota kita untuk bersih adalah modal utama yang harus dimiliki. Kemudian jika itu sudah berjalan dengan baik maka kota ini akan terlihat indah dan menjadi kunjungan para pelancong dari dalam dan luar,” sahut dia. ●



Presiden RI, Joko Widodo

TIKET PESAWAT INDONESIA TERMAHAL LEPAS SAJA KE MEKANISME PASAR

Pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," kata Luhut dikutip melalui akun Instagram resminya, *luhut.pandjaitan*, Kamis, 11 Juli 2024.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukuan larangan dan pembatasan barang impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan. Adapun porsi perawa-

tan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Luhut juga menyoroti mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurut dia, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian.



"Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas," kata Luhut.

Ia mengatakan seluruh langkah efisiensi tersebut akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. "Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," kata Luhut.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan keluhan masyarakat terkait harga tiket penerbangan yang tinggi. Berdasarkan data IATA, kata Luhut, pada 2024 ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ucapnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kre-

atif, Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

"Itu sudah diadakan rapat koordi-

nasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," ujar Sandi di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Sandi menjelaskan, satgas tersebut



Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra

terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Sandi menyampaikan, bukan hanya bahan bakar Avtur yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri. Namun, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

"Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar Sandi.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, menambahkan, pihaknya sudah ada pembahasan dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman Investasi soal tiket pesawat di Indonesia yang mahal.

Ia menegaskan isu soal tiket pesawat di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah, termasuk Kemenko Marves serta stakeholders lain untuk menyiapkan solusi yang tepat atas persoalan ini.

Menurut Nisa, Kemenparekraf senantiasa mendukung perjalanan wisata, termasuk melalui penerbangan pesawat atau jalur udara. Pihaknya juga mendukung maskapai-maskapai nasional dan multinasional membuka rute-rute baru ke berbagai destinasi-

nasi lewat promosi di beberapa platform.

"Mempromosikan jika ada rute penerbangan-penerbangan yang baru karena untuk kami ketika ada flight baru atau ada penambahan frekuensi ini akan mempermudah," tambah dia.

Dia mengatakan, dengan mempromosikan penerbangan rute-rute baru, maka akan turut berdampak pada tambahan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat berjadwal, menyusul usulan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia agar pemerintah melepas ke mekanisme pasar terkait persoalan itu.

Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Sigit Hani Hadiyanto, menyampaikan, ka-

jian itu masih dilakukan seiring dengan usulan dari maskapai penerbangan melalui Indonesia National Air Carrier Association (INACA). Meski begitu, Sig-it tidak menjelaskan lebih mendalam terkait evaluasi tarif batas atas dan bawah tersebut.

"Memang sekarang, berlaku tarif batas atas dan bawah. Namun, aspirasi INACA, nanti akan menjadi konsiderasi," jelasnya di sela Indonesia AERO Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Sementara itu, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, berharap Kemenhub dapat memutuskan agar aturan harga tiket pesawat tak lagi mengacu pada tarif batas atas (TBA), tetapi sesuai dengan mekanisme pasar.

"Memang kami berharap bahwa tarif tiket itu diserahkan ke mekanisme masyarakat," ujar Denon.

Meski begitu, Denon mengaku pihaknya memahami bahwa pemerintah menetapkan TBA dan TBB adalah demi keterjangkauan dan melindungi masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, tarif batas atas dan batas bawah diberlakukan agar tidak terjadi praktik jual rugi (predatory pricing).

"Jadi, di situlah fungsinya 'government' sehingga keseimbangan ekonomi ini bisa tetap terjaga dan iklim usaha tetap sehat," ucapnya.

Denon menambahkan, pemerintah juga sudah menerima usulan INACA terkait revisi tarif batas atas dan batas bawah.

"Kita direspons positif juga oleh Kemenhub. Kita tunggu jawaban kementerian, sehingga tarif ini bisa bervariasi solusinya, tidak digeneralisir. Ini mungkin yang sedang kita upayakan," kata Denon.

Denon juga berharap pemerintah memberikan relaksasi pada industri penerbangan dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

Amerika Serikat (AS).

Dia menyebutkan sejumlah relaksasi yang diharapkan, di antaranya perpajakan dalam pengadaan suku cadang pesawat, insentif, tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC), maupun harga bahan bakar avtur.

"Nanti saya mesti tanya sama kementerian kira-kira relaksasi apa yang mau diberikan. Karena ada banyak, ada perpajakan, ada insentif, ada PSC, ada kemudian harga avtur," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk harga avtur pihaknya sudah menjalin komunikasi langsung dengan PT Pertamina.

"Jadi, ini juga bagian dari upaya yang dilakukan oleh INACA agar kementerian terkait bisa mencari solusi terkait dengan naiknya nilai tukar mata uang dolar AS terhadap rupiah," katanya lagi.

Ia juga menuturkan, pihaknya meminta bantuan lintas kementerian baik Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan

lah meningkatkan traffic penerbangan dalam waktu dekat.

"Sehingga cost management untuk tadi yang ditanyakan apakah ini masih cukup promising karena kita negara kepulauan, which is nggak ada pilihan lain untuk traveling di Indonesia dengan penerbangan, harus dipikirkan oleh lintas kementerian," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiাপুত্র, berharap

tersendiri karena pengaruh yang besar terhadap biaya (cost).

"Oleh sebab itu, kita diskusi agar TBA dikaji. Artinya jangan TBA selama lima tahun tidak naik karena kurs dan harga avtur selama lima tahun terakhir juga berubah," katanya.

Apabila tarif batas atas tiket pesawat tidak kunjung berubah atau tidak naik sejak ditetapkan 2019, Irfan khawatir semua maskapai akan menghadapi



Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan

Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas hingga Kemenhub maupun BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero).

Denon menambahkan, INACA berupaya untuk melakukan pertemuan dengan organisasi atau institusi yang menjadi cost contributor terhadap kegiatan operasional, sehingga bisa mereduksi biaya operasional sebagai langkah merespons nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Selain insentif, Denon mengatakan bahwa hal yang harus dilakukan ada-



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno



Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja

pemerintah dapat meninjau ulang TBA tiket pesawat sejalan dengan perubahan kondisi eksternal lima tahun terakhir.

Irfan mengatakan, nilai tukar atau kurs (exchange rate) serta harga avtur yang fluktuatif menjadi tantangan

permasalahan yang serupa.

"Usulan kita lebih fleksibel terhadap kondisi eksternal. Exchange rate maupun harga avtur kan kita tidak bisa kontrol. Kita juga tidak bisa minta Pertamina untuk terus-terusan kasih diskon, bukan begitu caranya kan," kata dia. •



OBRAL INSENTIF DEMI IKN

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 11 Juli lalu. Beleid yang terdiri dari 14 pasal itu memuat aturan turunan sebagai landasan dalam percepatan pembangunan IKN.

Dalam salinan dokumen dijelaskan, Perpres dibuat untuk memberi panduan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Secara spesifik, Perpres tersebut dikeluarkan Jokowi untuk mengakomodir kepentingan dunia usaha yang ingin terlibat dalam pembangunan IKN.

"Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial, serta mendorong keterlibatan pelaku usaha pelopor dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperlukan per-

an dan kebijakan pemerintah," tulis Jokowi dalam aturan terbaru seperti dikutip Senin, 15 Juli 2024.

Melalui Perpres percepatan pembangunan IKN, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang memberi kepastian hukum pada investor yang ingin berinvestasi. Beberapa poin yang dibahas adalah insentif untuk pelaku usaha pelopor hingga Harga dan alokasi penggunaan tanah.

Perpres juga secara terbuka menjelaskan batas Waktu penggunaan hak guna usaha (HGU) tanah di IKN yang bisa dimanfaatkan investor. Merujuk ketentuan terbaru, pemerintah memberikan HGU maksimal 190 tahun kepada para investor.

Adapun poin Perpres Percepatan

Pembangunan IKN sebagai berikut:

1. Ekosistem Kawasan Inti IKN

Merujuk Pasal 2 Perpres Nomor 75 disebutkan bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan IKN bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan yang dimaksud meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial.

Layanan dasar yang menjadi garis Utama IKN meliputi hunian, Kesehatan, Pendidikan, sosial dan budaya, energi dan listrik, telekomunikasi dan digital, transportasi dan air minum. Fasilitas lain adalah sanitasi, pemakaman, ruang terbuka hijau serta fasilitas keagamaan.

Adapun fasilitas komersial yang menunjang pembangunan Kawasan inti IKN adalah hotel, pusat perbelanjaan dan toko, restoran dan pusat rekreasi atau hiburan.

2. Pembiayaan Pembangunan Fasilitas IKN

Pembangunan layanan dasar dan layanan komersial di IKN dapat berasal dari dua sumber. Pertama adalah dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dilaksanakan berdasar ketentuan.

Asal pendanaan kedua bisa dari sumber lain yang sah. Untuk sumber lain ini maka penyediaan layanan dilakukan melalui penunjukan langsung.

3. Pemberian Insentif Investor IKN

Dalam hal pelibatan pihak lain di luar kementerian dan Lembaga negara untuk pembangunan IKN, selanjutnya pemerintah menyediakan insentif. Pemberian insentif ini diatur dalam Pasal 3.

Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Insentif juga dapat diberikan oleh kementerian dan Lembaga negara atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara lebih spesifik, Jokowi juga menyatakan bahwa Kepala Otoritas

berhak menetapkan pelaku usaha pelopor yang bisa terlibat dalam percepatan pembangunan. Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha pelopor adalah mereka yang telah menandatangani letter of intent dengan OIKN.

4. Harga Tanah di IKN

Mengenai penggunaan tanah di IKN, otoritas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 memiliki kewenangan dalam menetapkan Harga tanah di IKN. Harga tanah dibedakan menjadi dua yaitu untuk pengelolaan aset



Meski begitu terdapat jangka Waktu yang perlu dipenuhi pelaku usaha pelopor untuk memulai investasi di IKN. Perpres mensyaratkan pelaku usaha pelopor yang mendapatkan insentif harus sudah memulai pembangunan di IKN paling lama 5 tahun sejak berlakunya UU Nomor 21 tahun 2023 atas perubahan UU IKN.

dalam pengawasan (ADP) IKN dan untuk investasi di IKN.

Dalam menentukan harga tanah, Otoritas menetapkan zona penilaian tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik. Nilai tanah yang ditetapkan OIKN, menjadi acuan kementerian agraria untuk menentukan zona nilai tanah.

Selanjutnya kementerian yang mengurus soal agraria wajib mempublikasi zona nilai tanah yang dibuat. Adapun kontribusi atas pengelolaan aset oleh OIKN kepada pelaku usaha pelopor dikenakan tarif Rp0 dan bisa dibayar secara angsuran.

5. Pengusahaan Tanah IKN

Mengenai penguasaan tanah di IKN, Jokowi memberi dua garis besar. Pada Pasal 8 disebutkan pengusahaan tanah yang masuk aset dalam pengawasan (ADP) oleh masyarakat bisa berasal dari pelepasan Kawasan hutan secara fisik paling singkat 10 tahun. Penguasaan tanah harus dilakukan dengan itikad baik dan dibukti-

tulis Perpres.

Dalam hal ganti rugi, tim terpadu akan melihat kondisi tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah. Adapun pergantian diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali dan bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan atas penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat, dapat dilakukan konsinyasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanganan dalam permasalahan bersumber dari APBN.

satu siklus dan dapat diperpanjang untuk siklus kedua maksimal 80 tahun. Selanjutnya juga ada ketentuan mengenai hak pakai maksimal 80 tahun dan diperpanjang maksimal 80 tahun.

Pemberian hak atas tanah dilakukan oleh kementerian terkait berdasarkan permohonan OIKN. Selanjutnya dilakukan evaluasi kepada para pelaku usaha yang mendapatkan hak atas tanah setelah lima tahun pertama.

7. Pemanfaatan Infrastruktur IKN

Selain mengatur mengenai tanah dan pemberian insentif, Perpres yang diterbitkan Jokowi juga mengatur



kan dengan Riwayat penguasaan.

Inventarisasi penguasaan tanah oleh masyarakat dilakukan oleh tim terpadu. Tim ini dibentuk dan diketuai langsung oleh Kepala OIKN. Adapun anggota tim juga berasal dari kementerian terkait.

“Penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat diberikan per bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi,”

6. HGU dan HGB di IKN

Mengenai penggunaan tanah di IKN, dalam Pasal 9, Jokowi menyatakan bahwa OIKN memberi jaminan kepastian hukum hak atas anak. HGU diberikan dalam siklus pertama dan dapat diperpanjang pada siklus kedua. Satu siklus hak guna usaha paling lama 95 tahun.

Adapun hak guna bangunan (HGB) diberikan paling lama 80 tahun untuk

mengenai pemanfaatan infrastruktur yang telah disiapkan di IKN. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa pengelolaan infrastruktur oleh OIKN dituangkan dalam berita acara.

OIKN bertanggung jawab mengalokasikan anggaran biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur. Pengelolannya pun bisa dialihkan oleh OIKN kepada kementerian atau oleh pengelola yang di-

tunjuk.

Hal lain yang diatur adalah pemanfaatan lereng atau galian yang terbentuk akibat pembuatan jalan. Merujuk pasal 12, galian tersebut menjadi bagian dari alokasi tanah yang sudah diberikan. Para investor juga dapat memanfaatkan lereng yang menjadi dampak dari pembangunan.

Rayu Investor

Lewat Perpres 75/2024, pemerintah berharap makin banyak investor yang mau menanamkan modal di Nusantara.

"Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang mau bangun kalau tidak ada tanahnya," kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Jokowi untuk ke sekian kalinya mengguyur IKN dengan insentif. Selain HGU dan HGB dua siklus yang



Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang mau bangun kalau tidak ada tanahnya

mencapai 190 tahun, Pemerintah juga menyiapkan tarif hingga Rp0 atau pembayaran secara angsuran untuk investor yang mau mengelola Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Perpres tersebut.

Pemerintah juga menyiapkan insentif pajak untuk investasi tanah dan/atau bangunan di IKN. Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Salah satu bentuk insentif pajak yang ditawarkan adalah pengurangan pajak penghasilan atau PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/ban-

gunan di IKN. Jika tanah dan/atau bangunan dialihkan kembali, maka tidak diberikan fasilitas pengurangan, termasuk melalui perjanjian pengikatan jual-beli, akan diberikan pengurangan PPh sebesar 100 persen.

Fasilitas pengurangan diberikan sampai dengan 2035, dengan cara wajib pajak meminta surat keterangan bebas atau SKB secara elektronik di kantor pajak tempat wajib pajak berstatus pusat terdaftar.

Selain PPh, insentif pajak lainnya yang diberikan adalah fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas ini diberikan atas bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, atau gudang yang diserahkan oleh orang pribadi tertentu, badan tertentu dan/atau Kementerian/Lembaga tertentu.

Investor dalam negeri yang menanamkan modal di IKN, akan mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk nilai penanaman modal paling sedikit Rp10 miliar. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) PP 12/2023. Sektor yang dapat memanfaatkan insentif tersebut adalah pusat perbelanjaan, dan penyediaan sarana wisata dan jasa akomodasi/hotel berbintang.

Lalu, penyediaan fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), serta stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik. Besaran insentif pajak yang diberikan adalah sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan yang terutang. Nominal pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen juga berlaku untuk sektor keuangan yang berinvestasi di IKN.



Otorita IKN juga menyiapkan diskon pajak besar-besaran kepada perusahaan tambang yang ikut merehabilitasi hutan di wilayah IKN. Insentif pajak yang diberikan dapat berupa tax deduction hingga 200 persen.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Badan Otorita IKN, Pungky Widaryanto, mengatakan, perusahaan tambang yang merehabilitasi hutan di kawasan IKN akan mendapatkan tax deduction hingga 200 persen. "Misalnya perusahaan ingin merehabilitasi 2.000 hektare hutan di IKN dan menghabiskan Rp100 miliar itu. Itu bisa diklaim dua kali lipat sebagai pengurang perhitungan pajak," ujar Pungky pada 27 Desember lalu.

Insentif yang hadir tak hanya berupa lahan atau pajak. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN akan diberikan insentif, baik itu berupa uang atau percepatan kenaikan jabatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan dirinya diminta Jokowi untuk menggodok insentif tersebut seperti serupa bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Dalam pemberian insentif, pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi. ●

DISRUPSI

Gunawan Effendi

Gangguan atau disrupsi yang muncul seiring revolusi teknologi informasi dan komunikasi benar-benar sudah sampai ke tingkat perorangan. Tanpa pandang bulu, status sosial ekonomi, maupun ruang dan waktu.

Paling nyata dan terasa dampaknya bagi Indonesia adalah gangguan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang pangkalannya berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Terdeteksi pada Kamis, 20 Juni 2024, gangguan itu berasal dari cyber attack, serangan terhadap proses komputer yang menyimpan informasi di dunia maya untuk melayani kehidupan nyata.

Begitulah maka yang terganggu dalam serangan siber terhadap PDNS 2 antara lain layanan imigrasi dan penerimaan peserta didik baru. Namun, lebih banyak lagi gangguan di kehidupan nyata yang terdampak oleh serangan siber ini.

Yang mendesak kemudian, intensitas gangguan siber itu akan meningkat dengan berkembangnya kecerdasan buatan, artificial intelligence (AI). Sejatinya, kecerdasan buatan itulah inti revolusi TIK: banyak hal dapat dikerjakan oleh komputasi (hitung-hitungan digital) yang diprogram sesuai dengan kepentingannya. Jadi, kecerdasan buatan dapat menggantikan keterampilan dasar manusia: membaca, menulis (termasuk melukis), berhitung, berbicara, dan menyimak (bukan sekadar mendengarkan) dan menyimpan hasilnya untuk digunakan sewaktu-waktu. Nah, gangguan atau disrupsi terhadap keterampilan dasar dan memori buatan itulah yang menjadi sasaran serangan siber.

Para pemuka bisnis dan pemimpin politik secara global sudah sejak beberapa tahun lalu, sejak pandemi Covid-19 mereda, diingatkan oleh World Economic Forum tentang bahaya cyber attack yang menysasar titik temu (intersection) antara konstelasi global dan kecerdasan buatan yang meningkatkan risiko keamanan dunia maya dan nyata sekaligus. Ini terkait dengan proses pemilihan politik yang berlangsung sedikitnya di 45 negara pada 2023-2024. Sisi ekonomi dan bisnisnya, 45 negara yang menyelenggarakan Pemilu itu mencakup lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.

Untuk memahami titik temu antara dunia maya dan keamanan pemilu, World Economic Forum dalam laporan Global Security Outlook 2024 menyebut enam bidang risiko yang

harus diperhatikan seiring dengan berlangsungnya pemilu. Untuk Indonesia, relevan juga dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang terjadwal pada Rabu, 27 November 2024:

- Misinformasi dan disinformasi: kampanye terorganisir yang menyebarkan misinformasi melalui media sosial atau saluran lain sehingga dapat mempengaruhi opini publik, menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu, dan mempengaruhi hasil pemilu.

- Deepfakes (pemalsuan mendalam): Pada jenis disinformasi khusus ini, video atau rekaman audio deepfake yang dihasilkan AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu tentang kandidat atau memanipulasi persepsi publik.

- Disinformasi otomatis: Algoritma AI dapat digunakan untuk menghasilkan dan menyebarkan disinformasi dalam jumlah besar, sehingga lebih sulit untuk dideteksi dan dilawan.

- Iklan tertarget: Penargetan mikro yang digerakkan oleh AI terhadap misinformasi dan disinformasi pemilu melalui iklan yang dipersonalisasi dapat digunakan untuk memanipulasi opini atau menekan jumlah memilih.

- Masalah privasi data: ketika informasi pemungutan suara diambil dari tanda

pengenal nasional, catatan tempat tinggal, atau metode lain yang terhubung dengan informasi identitas pribadi (PII), pemrosesan otomatis dapat membuka peluang kebocoran data pribadi yang tidak relevan dengan ihwal pemungutan suara.

- Manipulasi algoritmik media sosial: Algoritma AI pada platform media sosial dapat dimanipulasi untuk memperkuat pesan politik tertentu atau menekan pesan lain, sehingga mempengaruhi opini publik.

Toh di balik kesulitan selalu tersedia peluang. Peluangnya adalah tumbuh dan berkembangnya bisnis yang menjamin keamanan siber. Katakanlah Satpam Siber.

World Economic Forum mencatat, pada 2022, perekonomian keamanan siber tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian dunia. Pada 2023, pertumbuhannya malah empat kali lebih cepat. Meskipun investasi organisasi dalam ketahanan siber secara keseluruhan sedang meningkat, inovasi dan pertumbuhan yang pesat sering kali menyebabkan pengembangannya tidak merata. ●





TEROBOSAN JELANG PILKADA 2024

Aspek akseptabilitas (penerimaan) kesepakatan antarpartai memang berpengaruh terhadap pencalonan. Namun, akan banyak kemungkinan pasangan calon lepas dari pola koalisi partai yang terbentuk dalam Pilpres, seperti Koalisi Indonesia Maju.



Toh tetap ada terobosan sehingga mulai pertengahan Juli 2024, para pasangan calon kepala daerah mulai bisa mensosialisasikan gagasannya untuk para pemilih.

Sebelumnya, langkah itu terhambat oleh belum keluarnya rekomendasi partai-partai politik di tingkat pusat. Harap maklum, rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah salah satu syarat utama menjadi pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Namun, upaya mengikuti pola koalisi yang terbentuk dalam Pilpres untuk Pilkada serentak 2024 banyak menghadapi kendala. Toh Partai Demokrat tercatat mengawali terobosan kendala itu pada Rabu, 10 Juli 2024 dengan menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur secara sekaligus untuk Pilkada serentak 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan langsung rekomendasi itu untuk beberapa paslon sekaligus. Salah satunya ialah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Pasangan Khofifah-Emil memang sudah banyak

mengantongi rekomendasi dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024.

Sebagai latar belakang, Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju, sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi ini merupakan gabungan partai politik yang terdiri atas 10 partai politik.

Empat partai politik parlemen mendominasinya: Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, empat partai non-parlemen yaitu PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, satu partai lokal yaitu Partai Aceh serta satu partai nonpartisipan Pemilu 2024 yaitu PRIMA. KIM mengusung Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan Wali Kota Surakarta, Gibran





Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024.

Toh AHY tak berhenti hanya di pasangan Khofifah-Emil yang selaras dengan KIM. "Insya Allah ada enam provinsi yang akan kita serahkan," kata AHY saat membuka acara di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Keenam provinsi itu meliputi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau, Sulawesi Utara (Sulut) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Jawa Timur. AHY memberikan rekomendasi secara satu per satu ke setiap bacalon di Markas DPP Demokrat, Jakarta Pusat.

Pertama, AHY menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido. Anwar merupakan kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Ketua DPD Sulteng sekaligus Anggota DPR RI.

Pasangan selanjutnya adalah Zoelkiflimansyah dan Suhaili Fadhil Thohir untuk Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB). Zoelkiflimansyah merupakan kader PKS sekaligus Gubernur NTB pertahana. Berikutnya, Pilgub Riau, Partai Demokrat mengusung duet Muhammad Nasir dan

Muhammad Muwardan. Muhammad Nasir merupakan adik dari eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Sama seperti Riau, Partai Demokrat kembali mengusung kadernya di Pilgub Sulawesi Utara (Sulut). Partai Demokrat mengusung Eks Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut sebagai bacagub Sulut. Ayah dari Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut itu akan berduet bersama Politikus Golkar, Michaela Elsiana Paruntu.

Lalu di Pilgub Sultra, Partai Demokrat mendukung paslon Lukman Abunawas dan Laode Ida. Lukman Abunawas merupakan Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, sementara Laode merupakan politikus Partai Demokrat yang pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Paslon terakhir yang diumumkan ialah Eks Gubernur dan wagub Jawa Timur 2018-2023, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kini, keduanya kembali dipasangkan sekaligus mengantongi dukungan Partai Demokrat untuk Pilgub Jatim 2024 mendatang.

Dari rekomendasi Partai Demokrat itu, sudah tampak pola koalisi dalam KIM mulai bergeser. Misalnya dengan

pencalonan Muhammad Nasir dan Muhammad Muwardan di Pilgub Riau. Pencalonan Nasir-Muwardan oleh Partai Demokrat kelak akan berbeda dengan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar.

Begitu pula dengan rekomendasi paslon untuk Gubernur NTB Zoelkiflimansyah dan Suhaili Fadhil Thohir. Tak ada warna KIM pada pasangan Zoel-Suhaili.

Apapun, terobosan AHY dengan rekomendasi Partai Demokrat memicu partai-partai lain yang tergabung dalam KIM megumumkan rekomendasinya masing-masing. Tercatat, beberapa hari kemudian, Selasa, 16 Juli 2024, giliran Partai Gerindra yang mengumumkan rekomendasi untuk Pilkada serentak 2024. Namun, beberapa antaranya belum memiliki pasangan calon.

Toh ada titik temu antara Gerindra dan Demokrat di Pilgub Riau. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra memberikan rekomendasi kepada pasangan Nasir-Wardan.

Rekomendasi itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Gerindra Ahmad Muzani, Selasa, 16 Juli 2024. "DPP Gerindra resmi mengeluarkan rekomendasi kepada M Nasir dan HM Wardan. Kami harap keputusan

• INFO KHUSUS

ini akan diamankan dan diperjuangkan seutuhnya oleh DPD, DPC, dan ranting partai Gerindra ke seluruh Riau,” kata Ahmad Muzani.

Dalam konteks Riau, paslon gubernur Nasir-Wardan sudah memenuhi syarat untuk maju di Pilgub 2024. Sebelumnya, Nasir telah mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1 kursi), Demokrat (8 kursi), Gerindra (8 kursi). Pasangan ini telah mengamankan 17 kursi, sementara syarat mengajukan pasangan calon oleh partai politik (Parpol) hanya 13 kursi.

Selain itu, pasangan ini juga telah mendapat dukungan dari partai non parlemen yakni Partai Solidaritas Indonesia

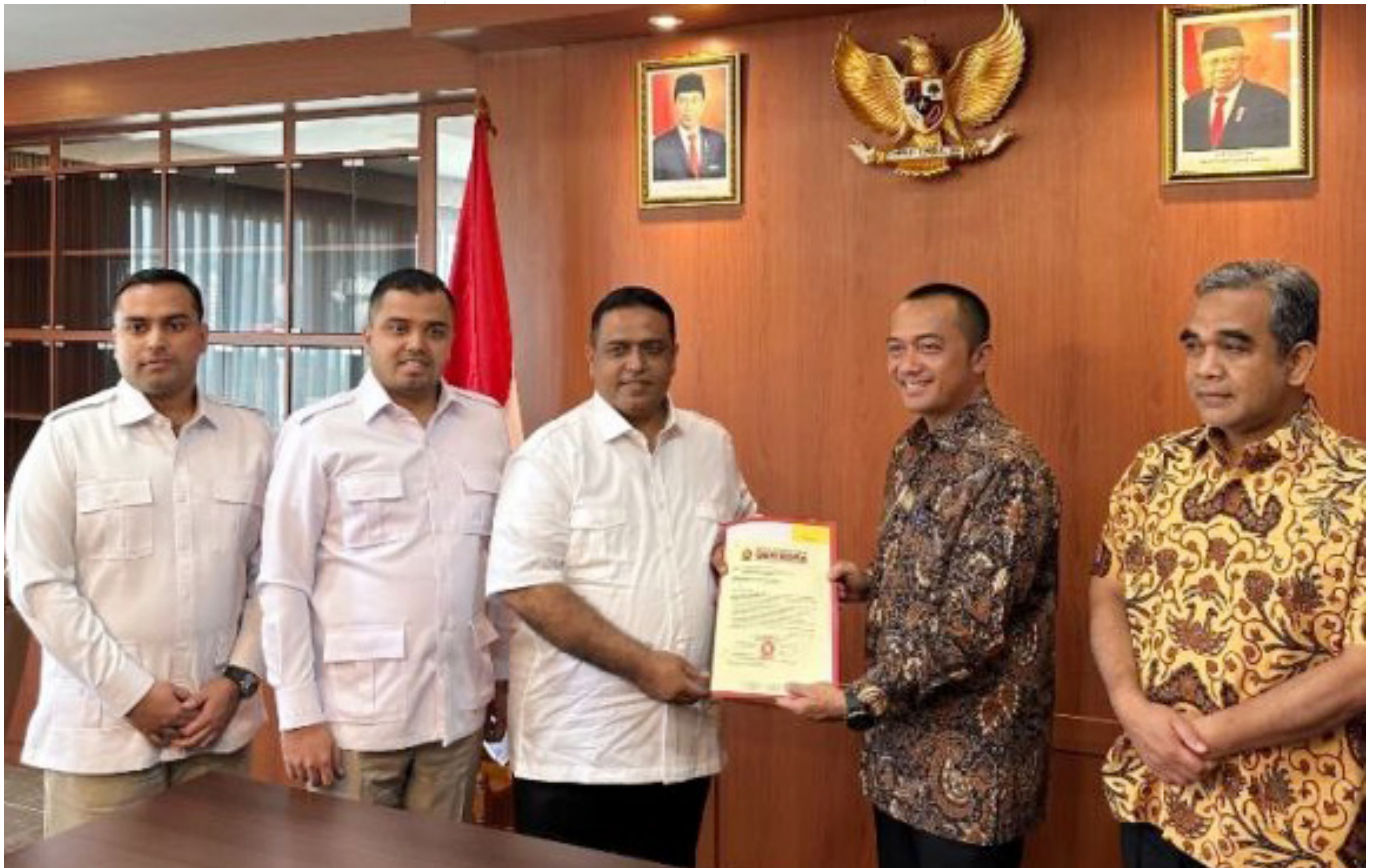
han bupati dan wali kota.

“Karena pelaksanaan pilkada 2024 semakin dekat, Pak Prabowo sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra harus memutuskan untuk mengajukan orang-orang terbaik yang dianggap bisa mewakili daerah provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Muzani.

Untuk Pilgub di Sulawesi Utara, Partai Gerindra mengusung Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yulius Selvanus sebagai cagub, namun belum menunjuk cawagubnya. Di Sumatera Utara ada nama Bobby Nasution sebagai cagub dan Bupati Asahan Surya sebagai wakilnya. Kemudian, di Sumatera Barat, Gerindra mengusung Mahyeldi Anshrullah

dra mengusung Erzaldi Rosman Djohan sebagai cagub dan Yuri Kemal Fadlullah sebagai wakilnya. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gerindra mendukung pasangan cagub-cawagub Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), Gerindra mengusung Raudatul Jannah sebagai cagub dan Ahmad Rozanie Himawan Nugraha sebagai wakilnya.

Perhelatan di Kalimantan Utara, Gerindra mengusung Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala sebagai wakilnya. Selanjutnya, di Papua Barat ada nama Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani sebagai pasangan cagub-cawagub.



(PSI). Ketua DPD Gerindra Riau M Rahul menyatakan, dukungan dari Gerindra tersebut sudah dalam bentuk rekomendasi bukan surat tugas. “Sudah dalam bentuk rekomendasi, bukan surat tugas lagi. Kita akan solidkan kader hingga ke bawah untuk kemenangan,” katanya.

Bersamaan dengan penyerahan rekomendasi untuk Pilgub Riau, Gerindra juga merekomendasikan paslon Gubernur lainnya. Hingga ke paslon untuk Pilkada tingkat kabupaten-kota, pemili-

sebagai cagub dan Vasko Ruseimy sebagai wakilnya.

Selanjutnya, di Kalimantan Timur, Gerindra mengusung Rudy Mas’ud sebagai cagub dan Seno Aji sebagai cawagub. Di Lampung ada nama Rahmat Mirzani Djausal sebagai cagub, namun belum menunjuk cawagub. Kemudian di Provinsi Riau, Muhammad Nasir sebagai cagub dan Muhammad Wardan sebagai wakilnya.

Di Kepulauan Bangka Belitung, Gerin-

Muzani mengatakan, Partai Gerindra berharap seluruh kader partai di masing-masing daerah memperjuangkan agar nama-nama cagub-cawagub tersebut agar bisa menang pada pilkada serentak 2024 Hal tersebut, Muzani menegaskan, sesuai arahan dari ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo, kata Muzani, berharap bahwa cagub-cawagub yang diusung Gerindra dapat menyampaikan program-program yang mem-

bawa kemajuan bagi daerahnya dalam kampanye Pilkada 2024.

Nah, dua hari setelah Muzani mengumumkan rekomendasi dari Gerindra, Partai Golkar juga mengambil langkah politik serupa. Kali ini Partai Golkar mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk mendukung 10 pasangan calon (Paslon) gubernur-calon wakil gubernur maju Pilkada 2024 di 10 provinsi.

Nama-nama pasangan calon dan daerah yang diumumkan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, yaitu Muhammad Afif Bobby Nasution-Surya (Sumatera Utara), Syamsuar-Mawardi Saleh (Riau), Rohidin Mersyah-Meriani (Bengkulu), Rudy Mas'ud-Seno Aji (Kalim-

final dari partai setelah mempertimbangkan serangkaian faktor, termasuk survei-survei internal. "Surat keputusan ini sifatnya final dan mengikat, dan itu menjadi persyaratan untuk diajukan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) setempat," kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Dari daftar nama pasangan calon itu, Partai Golkar memasangkan kader-kadernya dengan kader dari partai lain, misalnya Surya, yang merupakan calon wakil gubernur di Sumatera Utara mendampingi menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution dari Partai Ger-

Jitmau, kader Golkar yang maju cagub Papua Barat Daya berpasangan dengan Samaudin dari PDI Perjuangan.

Di luar nama-nama paslon untuk pilkada tingkat provinsi, Partai Golkar juga mengeluarkan 21 surat keputusan untuk mendukung pasangan calon di tingkat kabupaten-kota. Pergeseran pola koalisi KIM dalam Pilpres pun akan semakin terbuka jika wilayah pemilihan menyangkut kabupaten dan kota.

Apapun, Lodewijk berharap Golkar dapat memberikan dukungan kepada pasangan calon di 37 provinsi dan 508 kabupaten-kota sampai batas waktu yang ditentukan KPU yaitu masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2024



antan Timur), Raudatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan (Kalimantan Selatan), Sutarmidji-Ria Norsan (Kalimantan Barat), Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala (Kalimantan Utara), John Tabo-Ones Pahabol (Papua Pegunungan), Lambertus Jitmau-Samsudin Anggiluli (Papua Barat Daya), dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Eles-tianto Dardak (Jawa Timur).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus menjelaskan surat keputusan merupakan penetapan

indra. Selain itu, ada juga Rohidin Mersyah sebagai calon gubernur Provinsi Bengkulu juga berpasangan dengan Meriani, kader Partai Gerindra.

Syamsuar sebagai cagub Riau, Raudhatul Jannah alias Acil Odah sebagai cagub Kalimantan Selatan berpasangan dengan kader Partai NasDem. John Tabo, kader Partai Golkar, yang maju sebagai cagub Papua Pegunungan berpasangan dengan Ones Pahabol dari Partai Demokrat. Kemudian, ada Lambertus

pada 27-29 Agustus 2024. "Artinya, tinggal satu setengah bulan lagi waktu kami menyiapkan pasangan calon dari masing-masing partai," kata Sekjen Partai Golkar itu.

Alhasil, langkah AHY menerobos aspek akseptabilitas (penerimaan) koalisi partai-partai dalam KIM akhirnya akan membentuk peta dukungan. Di luar aspek akseptabilitas, hasil Pilkada memang lebih ditentukan oleh elektabilitas paslon di wilayah masing-masing. •

ANTARA 15, 10, DAN 6 PASANGAN CALON

Pola pembentukan pasangan calon Pilkada berdasarkan koalisi partai-partai politik dalam Pilpres 2024 memang diupayakan. Namun, peta politik di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota memang berbeda. Menambah kompleksitas Pilkada serentak pertama dalam sejarah Indonesia.

Tiga partai dengan perolehan suara terbesar dalam Pemilu Legislatif 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, tampak repot menyusun pasangan calon dalam Pilkada 2024. Harap maklum, serentak berarti mencakup pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk 37 provinsi, 415 kabupaten,

dan 93 kota. Totalnya, rekomendasi partai akan mencapai 545 paslon.

Hingga akhir Juli 2024 saja, satu bulan menjelang pendaftaran paslon ke Komisi Pemilihan Umum menurut wilayah pemilihan masing-masing, belum separuh rekomendasi paslon yang keluar untuk pemilihan Gubernur. Apalagi untuk pemilihan bupati dan wali kota.

Sejauh ini, sebulan menjelang pendaftaran, Partai Golkar dan Partai Gerindra yang paling banyak mengeluarkan rekomendasi. Partai Golkar misalnya, baru mengeluarkan 10 rekomendasi untuk 10 paslon gubernur dan wakilnya dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada. Sedangkan Partai Gerindra sudah mengeluarkan 15 rekomendasi untuk Pilgub, itu pun belum semuanya lengkap dengan calon wakilnya.

Berikut daftar rekomendasi paslon gubernur dari Partai Golkar yang diumumkan pada Kamis, 18 Juli 2024

1. Sumatera Utara: M Bobby Afif Nasution-Surya
2. Riau: Syamsuar-Mawardi
3. Bengkulu: Rohidin Mersyah-Meriani
4. Kalimantan Timur: Rudy Mas'ud-Seno Aji
5. Kalimantan Selatan: Raudatul Janah-Akhmad Rozanie Himawan
6. Kalimantan Barat: Sutarmidji-Ria Norsan
7. Kalimantan Utara: Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala



8. Papua Pegunungan: John Tabo-Ones Pahabol
 9. Papua Barat Daya: Lambertus Jit-mau-Samsudin Anggalilu
 10. Jawa Timur: Khofifah Indar Par-awansa - Emil Dardak
- Selanjutnya, rekomendasi dari Partai Gerindra yang diumumkan pada Selasa, 16 Juli 2024:
1. Sulawesi Tengah: Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri
 2. Jawa Timur: Khofifah Indar Par-

- hammad Wardan
10. Kepulauan Bangka Belitung: Erzaldi Rosman Djohan dan Yuri Kemal Fadlullah
11. Nusa Tenggara Barat: Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhama-yanti Putri
12. Kalimantan Selatan: Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie Himawan Nugraha
13. Kalimantan Utara: Zainal Arifin Pali-wang dan Ingkong Ala

terus melakukan survei pendalaman dari berbagai macam potensi kader dan tokoh-tokoh yang beredar di masyarakat untuk diharapkan memimpin, baik gubernur, bupati, wali kota atau wakilnya di seluruh Indonesia," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

"Mapping melalui survei dan pandangan, serta pendapat pemikiran yang terekam terus kami dalam dan Pak Prabowo selalu memonitor situasi



- awansa dan Emil Elestianto Dardak
3. Banten: Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah
4. Sulawesi Utara: Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus
5. Sumatera Utara: Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya
6. Sumatera Barat: Mahyeldi An-sharullah dan Vasko Ruseimy
7. Kalimantan Timur: Rudy Mas'ud dan Seno Aji
8. Lampung: Rahmat Mirzani Djausal
9. Riau: Muhammad Nasir dan Mu-

14. Papua Barat: Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani.
 15. Sulawesi Tenggara: Andi Suma-gerukka
- Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengemukakan partainya terus memetakan atau mapping pemenangan di berbagai wilayah. Dia menyatakan pula, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, memantau pula situasi perkembangan politik di daerah-daerah menjelang pilkada.
- "Kami dari Partai Gerindra, sedang

dan kondisi itu di setiap provinsi, kabupaten/ kota," kata Muzani menambahkan.

Muzani menambahkan, Prabowo juga terus menyerap aspirasi dari berbagai tokoh dalam mematangkan keputusan pencalonan di pilkada. Dia mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM). "Pak Prabowo juga selalu mendengar apa kata tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh profesi dan tokoh-tokoh di

daerah tentang siapa yang layak untuk memimpin menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota," kata dia.

Toh upaya memprioritaskan kader-kader partai untuk maju di Pilkada 2024 yang berlangsung secara serentak memang tak terhindarkan. Ini juga yang menambah kompleksitas penyusunan paslon. Setidaknya membuat pola

gan, masih ada dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan masih dalam komunikasi Partai Demokrat," kata Dasco dalam sambutannya.

Alhasil, kata Dasco, "...Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sekjen Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, akan menyerahkan Surat Keputusan dari Partai Gerindra terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur

ada PKS, PAN, NasDem, PSI, Insya Allah beberapa partai lain dalam proses pembicaraan," ujarnya.

Hingga akhir Juli 2027, paslon Andra Soni-Dimyati sudah mengantongi tujuh dukungan partai: Gerindra, NasDem, PKS, PAN, PPP, PSI dan teranyar Partai Demokrat.

Andra Soni mengatakan, selain Demokrat akan ada PKB dan PPP yang juga akan memberikan rekomendasi



Koalisi Indonesia Maju bergeser.

Di Banten, misalnya, Gerindra mencalonkan pasangan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah sejak rekomendasinya keluar pada Minggu, 30 Juni, 2024. Penyerahan dukungan oleh Gerindra di kawasan Tangerang Selatan dihadiri oleh perwakilan NasDem, PSI, PAN dan PKS. Dimyati adalah anggota DPR dari PKS.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan meski PKB dan PPP tidak hadir, namun telah menyatakan dukungan. "Yang belum hadir tapi sudah menyatakan dukun-

Banten Pak Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusumah." Ia menegaskan, rekomendasi itu sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sedangkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berterima kasih kepada partai lain yang telah datang dan mau mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Dengan partai lain, sambungnya, masih ada proses pembicaraan.

"Kemudian kami bersyukur berterima kasih kepada partai-partai yang menyertai untuk mendukung pasangan ini

dalam waktu dekat. "InsyaAllah PKB dan PPP juga. 8 partai jadinya KBM," ungkapnya Jumat, 19 Juli 2024 kemarin.

Andra yang masih menjabat Ketua DPRD Banten ini menyampaikan terima kasih kepada partai Demokrat yang baru memberikan rekomendasi kepada dirinya. "Insya Allah dengan rekomendasi ini, kami akan menjalankan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diskusikan sebelumnya bersama teman-teman Demokrat yaitu membawa Banten lebih maju, sejahtera. InsyaAllah kami akan mengemban tugas untuk memenangkan Pilkada nanti,"

ungkapnya

Tinggal dua partai besar tersisa yang dapat mencalonkan paslo gubernur di Banten: Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pada titik ini PDIP membuka skenario memasang Rano Karno-Airin Rachmi Diany pada Pilkada Banten November 2024 mendatang. Malah partai berlambang banteng moncong putih itu telah memberikan surat rekomendasi kepada perempuan mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu.

Juru bicara PDIP, Deddy Yevri Hantaru Sitorus mengatakan, partainya telah memberikan surat rekomendasi kepada Airin Rachmi Diany untuk maju Pilkada Banten. "Yang pasti PDIP sudah memberikan surat rekomendasi kepada Airin," ujarnya, Rabu, 17 Juli 2024.

Disinggung apakah Rano Karno untuk mendampingi Airin, Deddy menyebut Rano Karno sudah pernah menjadi Gubernur Banten. Tinggal kesiapan Airin bersedia atau tidak menjadi wakilnya. "Walaupun memang belum dapat memastikan bahwa ada skenario Rano-Airin untuk Pilkada Banten nanti. Soalnya nanti bisa berubah skenarionya, gimana nanti," ucap Deddy.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa keputusan partainya mengusung Airin Rachmi Diany pada Pilkada Banten belum final. Menurut dia, saat ini partainya masih melakukan pemetaan wilayah terkait rencana pencalonan Gubernur Banten. "Selain itu, kami juga masih memetakan nama-nama calon serta mengamati hasil survei," ujarnya, Kamis, 11 Juli 2024.

Puan juga menyebut PDIP masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. "Dengan siapa akan bersama, atau siapa calon yang disandingkan, masih kami coba komunikasikan dengan partai lain," ujarnya.

Dari kubu Partai Golkar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lodewijk F Paulus mengemukakan, partai berlogo beriring itu belum memerintahkan eks Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany untuk mencari calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi di Pilkada

Banten 2024. "Belum. Bu Airin sampai sekarang masih belum mendapat surat instruksi. Mungkin nanti kita lihat," ujar Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024.

Terkait PDIP yang mengklaim sudah memasang kadernya sebagai wagub Airin di Banten, Lodewijk menyebut pasti ada saja pihak yang ingin mendekat ke Golkar dalam rangka mencari koalisi. Namun, dia menegaskan, Airin belum diperintahkan untuk mencari koalisi dan cawagubnya.

"Kita namanya ikhtiar, jabatan amanah. Amanah tentunya juga ada proses tahapannya pilkada kita ikutin semua. Doain saja yang terbaik Allah kasih," ujar Airin di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 10 Juli 2024.

Airin menjelaskan, berdasarkan pengalamannya mengikuti pilkada selama ini, ada berbagai proses yang harus dilalui, salah satunya adalah mendaftar. "Tapi pokoknya doain. Allah kasih yang terbaik, Allah kasih amanah di saat waktu dan tempat yang tepat menurutnya.



"Kita pertama berikan surat perintah penugasan. Sudah dilaksanakan oleh Bu Airin. Setelah proses survei dan sebagainya, baru kita berikan surat instruksi. Intinya surat instruksi itu bagaimana perintah membangun koalisi, perintah mencari pasangan calon untuk cawakada. Nah Bu Airin belum sampai ke situ, baru surat perintah penugasan," tuturnya.

Meski demikian, Lodewijk tidak menampik Golkar telah berkomunikasi dengan PDIP terkait Pilkada Banten. "Kan pasti komunikasi pasti berjalan. Semuanya berjalan. Coba lihat, satu calon ke mana-mana, tinggal nanyainnya ke mana kita belum tahu," imbuh Lodewijk.

Sehari sebelumnya Airin Rachmi Diany mengatakan dirinya hanya bisa berikhtiar terkait kepastian dirinya maju dalam Pilkada Banten 2024 atau tidak.

Karena jabatan itu kan amanah," sambung Airin.

Ia pun menepis anggapan Golkar kesulitan mendapat koalisi di Banten karena dicurigai ingin mendominasi di banyak daerah. "Eggak seperti itu, enggak mungkin. Pilkada itu tidak mungkin kita bisa mendominasi sendiri, apalagi serentak. Sangat, sangat tidak mungkin. Nanti kita lihat saja hasilnya, siapa yang mendominasi, siapa yang didominasi," imbuh Airin.

Apapun, dari Pilgub Banten tercemin, penyusunan pasangan calon gubernur memang kompleks. Karena itulah, sebulan menjelang pendaftaran ke KPU, partai-partai besar sekalipun baru merekomendasikan 15, 10, dan enam calon gubernur.

Pola Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres pun bergeser. Kita tunggu dinamika selanjutnya. ●



SENI KEMUNGKINAN DALAM PILKADA

Politik adalah seni tentang apa yang mungkin, apa yang bisa dicapai – seni yang terbaik berikutnya. Apa hubungannya ucapan politisi Jerman Abad XIX, Otto von Bismarck, dengan politik menjelang Pilkada 2024?

Ya penentuan pasangan calon juga sejenis seni sehingga membuka banyak kemungkinan. Bahkan pelantikan wakil menteri pun dikaitkan dengan kemungkinan pasangan calon untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah.

Begitulah, peta kemungkinan pasangan calon untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah langsung berubah setelah Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryonodiangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Semula, sempat masuk bursa calon gubernur Jateng.

Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono, yang baru saja dilantik sebagai

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), sempat masuk bursa calon gubernur Jawa Tengah (Jateng). Kini, Sudaryono memastikan dirinya tidak maju Pilgub Jateng.

"Tentu dengan penugasan yang baru ini, untuk Pilkada Jawa Tengah, saya sudah mendapatkan instruksi untuk tidak maju di Pilkada Jawa Tengah dan fokus untuk membantu Menteri Pertanian dan membantu Presiden serta Wakil Presiden," ujar Sudaryono usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut dia, beban tugas sebagai Wamentan tidak ringan. Sehingga, ia menegaskan tak akan maju Pilkada

Jateng. "Untuk pencalonan gubernur dengan pelantikan ini, saya nyatakan, saya tidak, partai Gerindra tidak mengusung saya, dan saya tidak berkampanye untuk gubernur lagi," sambung politisi yang pernah menjadi asisten pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto itu.

Sejak akhir Mei 2024, nama Sudaryono kian mencuat untuk menjadi salah satu calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra. Adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengemukakannya

Menurut dia elektabilitas Sudaryono di berbagai lembaga survei sudah semakin meningkat. Dengan faktor terse-



but, dia pun berharap Partai Gerindra secara resmi nantinya mengusung mantan ajudan pribadi Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah,” kata Muzani, Kamis, 23 Mei 2024.

Muzani menyatakan, partainya yang berlambang kepala Garuda itu sudah memiliki sejumlah nama kader internal yang bakal diusung di sejumlah daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Meski masih dalam tahap finalisasi, namun menurutnya semua ketentuan dan penetapan akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Tapi, soal calon gubernur, bupati dan wali kota di Gerindra itu ada di Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo,” katanya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa ada tiga nama yang sudah disiapkan untuk Pilgub Jakarta 2024. Namun, dia belum bisa menyebutkan tiga nama tersebut karena nantinya akan diumumkan oleh pimpinan partai.

Nama-nama tersebut, kata dia, sudah diperbincangkan dengan partai-partai

lainnya. Karena dia menilai Pilgub Jakarta akan lebih eksklusif dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. “Nanti semua calon gubernur yang ditetapkan akan bertemu dengan Prabowo



Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah

sebagai ketum partai Gerindra,” kata dia.

Alhasil, dinamika politik berikutnya Sudaryono malah menjadi Wakil Menteri Pertanian. Kemungkinan Ketua DPD Jateng untuk maju di Pilgub Jateng pun pupus.

Nah, dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pelantikan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan politik menukar

tiket untuk diberikan kepada Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang akan maju pada Pilkada Jateng 2024. Ujang menilai hal itu merupakan kompromi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Dengan begitu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan serta merta mendukung Ahmad Luthfi. “Masih dinamis dan dalam konteks itu KIM kelihatannya akan tumplek mendukung Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah untuk dimenangkan,” kata Ujang, Jumat, 19 Juli 2024.

Mnurut dia, Ahmad Luthfi maupun partai yang mendukungnya bakal menentukan wakil yang pas untuk di Jawa Tengah. Dalam hal tersebut, Ujang tidak menampik bahwa Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berpotensi untuk didukung mendampingi Ahmad Luthfi.

Menurut dia, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo itu belum memiliki elektabilitas yang kuat di Jakarta. Kaesang sejauh ini memang disebut-sebut akan maju di Jakarta atau Jawa Tengah. Sedangkan berdasarkan beberapa survei, nama Kaesang cukup

memiliki potensi di Jawa Tengah.

“Jangan-jangan memang Kaesang (mendampingi Ahmad Luthfi) karena di Jakarta kan Kaesang nggak laku ya, surveinya satu persen kan, jadi sulit,” katanya.

Setelah pelantikan Sudaryono, nama Ahmad Luthfi pun dipertimbangkan beberapa partai di KIM untuk Pilkada Jateng, salah satunya Partai Golkar yang menunggu langkah Irjen Polisi Ahmad Luthfi untuk pensiun dari Polri sebelum serius mengusungnya pada Pilkada Jateng. Partai Golkar melihat

tokoh tersebut. Menurut dia, sebagai anggota Polri aktif yang belum bekerja untuk politik, Ahmad Luthfi memiliki perolehan suara yang terbilang tinggi ketimbang nama lainnya.

Selain itu, dia juga menyoroti nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Selain Jateng, nama Kaesang digadagadag mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. “Kita lihat ada Pak Kaesang apa bisa ke sana, atau ada calon lain yang kita akan tawarkan untuk Jateng. Jadi

bertemu dengan Kaesang Pangarep.

Dia menceritakan, awalnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendorong Jusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur jika Kaesang mau maju menjadi calon gubernur Jakarta. “Tapi, setelah pertemuan tersebut, faktanya berkembang, Jusuf Hamka atau Babah Alun mendapat surat instruksi sebagai gubernur maupun sebagai bakal cagub dan bakal cawagub, daerah khusus Jakarta,” kata Lodewijk di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 18 Juli 2024.



peta politik di Pilkada Jawa Tengah berubah usai Ketua DPD Jateng Partai Gerindra Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa kandidat di Pilgub Jateng kini mengerucut kepada sosok Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Eks Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. “Yang menarik katanya Pak Sudaryono itu mundur dari pencalonan sebagai bakal calon gubernur. Ini peta politiknya akan berubah,” katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 18 Juli 2024.

Lodewijk kemudian membandingkan hasil survei elektabilitas tokoh-

kita tunggu beberapa hari ini. Perkembangan Jakarta dan Jawa Tengah memang menarik,” pungkasnya.

Presiden Jokowi pun mendukung putranya terjun dalam Pilkada 2024. “Ya di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semua wilayah Indonesia,” kata Jokowi singkat kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024, saat akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dalam perkembangan berikutnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan partainya memberi instruksi Jusuf Hamka dari yang sebelumnya sebagai calon wakil gubernur menjadi calon gubernur dibuat setelah pimpinan Golkar

Kini, Golkar sedang menunggu hasil survei elektabilitas Jusuf Hamka jika dicanangkan sebagai calon gubernur Jakarta. Jika hasil survei dianggap baik, maka Golkar akan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada Jusuf Hamka sebagai pertanda secara resmi dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. “Jadi kita tunggu sepuluh hari ini kita lihat hasil survei kayak apa,” kata Lodewijk.

Jadi, politik sebagai seni kemungkinan untuk mencapai yang terbaik memang tercermin dalam penentuan pasangan calon kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024. Toh waktu yang membatasi pentas seni itu. Pendaftaran pasangan calon dijadwalkan tutup pada Kamis, 29 Agustus 2024. ●

info indonesia www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network

INFO PASANG
 NUR AISAH
 + 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
 JL. Raya Kalibata No. 8
 Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
 Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 [facebook](https://www.facebook.com/infoindonesia) @infoindonesia.id  [twitter](https://twitter.com/_infoindonesia) : @_infoindonesia

 [Instagram](https://www.instagram.com/info_indonesia) @info_indonesia.id  [YouTube](https://www.youtube.com/infoindonesiatv) : infoindonesiatv



INOVASI **UNTUK** NEGERI
nfo indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #45 JULI 2024



**KAESANG-JUSUF HAMKA
BISA KALAHKAN
ANIES**